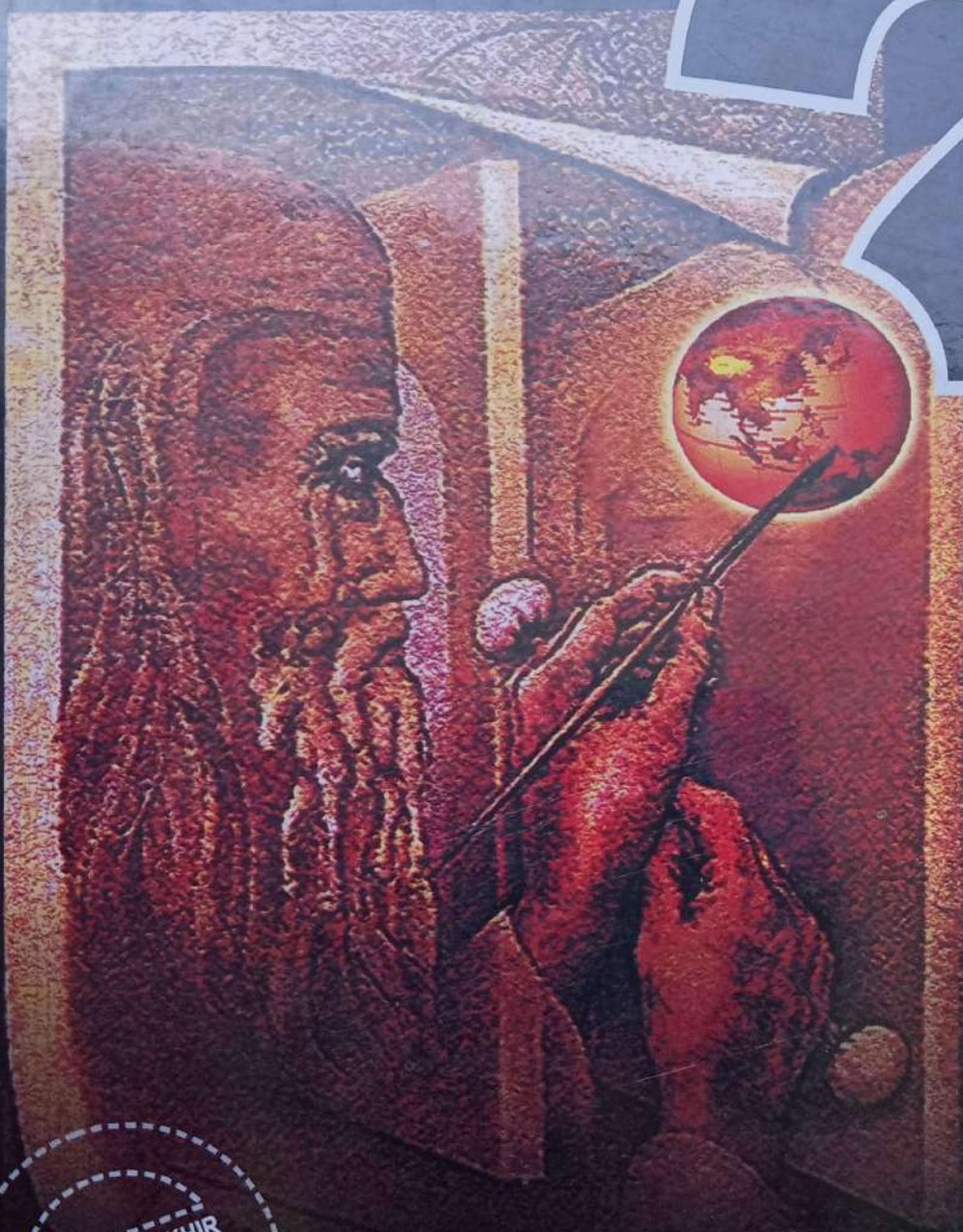


Dalam sejarah, dehumanisasi tidak mungkin terjadi.

(Kuntowijoyo)

tw
TIARA WACANA



KARYA TERAKHIR
KUNTOWIJOYO

KUNTOWIJOYO

Kata Pengantar:
Prof. Dr. Djoko Suryo

PENJELASAN SEJARAH

(HISTORICAL EXPLANATION)

KUNTOWIJOYO

**PENJELASAN
SEJARAH**
(Historical Explanation)

KATA PENGANTAR:
Prof. Dr. Djoko Suryo



Kuntowijoyo

Penjelasan Sejarah (*Historical Explanation*)

@2008 Kuntowijoyo

Kata Pengantar : Prof. Dr. Djoko Suryo

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia
oleh Penerbit Tiara Wacana

Pemerhati Naskah : Muhammad Yahya

Tata Letak : Aye Z. Wafa

Perwajahan : Hanif Rabbani

cetakan pertama: Februari 2008

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan

Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*

Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008

xvi + 180 hlm; ISBN 979-1262-04-7

indeks

Penerbit **Tiara Wacana**

Jalan Kaliurang Km 7,8, Kopen Utama 16, Sleman, Yogyakarta

Telp/faks. (0274) 880683 e-mail: yogya@tiarawacana.co.id



PRAKATA

— Trilogi Karya yang Terwariskan

Catatan perjalanan bangsa Indonesia amat sering diwarnai oleh persoalan tentang sejarahnya sendiri, dari persoalan validitas data, perbedaan cara penafsiran, dan variasi metode dalam pengajaran sejarah. Kompleksitas persoalan seperti itu juga telah menjadi perhatian dari para teoritisi sejarah, dan ini tentunya memberi sumbangan besar bagi perkembangan ilmu sejarah itu sendiri. Hal ini setidaknya ditunjukkan oleh kemauan para sejarawan untuk melakukan simbiosis dalam memandang realitas sejarah. Fenomena sejarah tidak lagi terpolakan secara kaku pada dikotomi dua objek penelitian, yakni antara sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai struktur. Perpaduan kedua pendekatan itu sudah berlangsung dan mulai mentradisi, dan masing-masing pendekatan terus melengkapi dan mengembangkan perkakas metodologinya: per-



kakas ilmiah untuk “memahami sejarah” di satu sisi, dan perangkat keilmuan untuk melakukan “analisis sejarah” di sisi yang lain.

Buku karya Prof. Dr. Kuntowijoyo ini dapat ditempatkan sebagai contoh konkrit dari pengembangan dalam pendekatan *hermeneutics*, pendekatan untuk “memahami sejarah”. Sekalipun demikian, didalamnya ditemukan pula upaya penulis buku ini untuk menjembatani kesenjangan di antara kedua pendekatan tersebut. Upaya seperti ini setidaknya tampak dari “permaafan” Kuntowijoyo sekiranya pembaca “harus” menggunakan istilah “analisis sejarah” ketimbang istilah “penjelasan sejarah”.

Materi buku *Penjelasan Sejarah* ini bertumpu pada dua bahasan yang mendasar dalam ilmu sejarah, yakni tentang hakikat ilmu sejarah dan tentang cara memahami berbagai jenis penjelasan sejarah. Terhadap bahasan pertama, Kuntowijoyo menegaskan bahwa ilmu sejarah adalah ilmu yang mandiri, dalam arti memiliki filsafat ilmu sendiri, persoalan sendiri, serta penjelasan sendiri. Argumen filosofisnya adalah, ilmu sejarah tidak lain merupakan serangkaian upaya untuk menafsirkan, memahami dan mengerti (*hermeneutics* dan *verstehen*). Argumen ini menjadikan ilmu sejarah bersifat khas, baik pada ruang lingkup maupun penjelasannya. Dari ruang lingkungannya, ilmu sejarah dikenali sebagai ilmu diakronis, yakni berurusan dengan proses, atau dengan gejala-gejala yang memanjang dalam waktu tetapi berada dalam ruang yang terbatas. Sementara dalam hal penjelasan, ilmu sejarah senantiasa berkenaan dengan peristiwa tunggal (*ideographic, singularizing*). Kuntowijoyo tampak konsisten dalam menerangkan bangunan ilmu dari ilmu sejarah tersebut (di samping melalui buku ini, lihat pula dua karyanya yang lain, yakni *Pengantar Ilmu Sejarah* [1995], dan *Metodologi Sejarah* [1994, 2003, ed. kedua]). Oleh karenanya dapat dikatakan, buku ini ber-



sama dua buku yang mendahuluinya merupakan suatu kesatuan karya, suatu trilogi penjelasan Kuntowijoyo tentang ilmu sejarah. Jika pun di antara ketiganya terdapat pengulangan pada beberapa bahasan, maka —meminjam dalih rasional yang digunakan Kuntowijoyo pada karyanya yang lain— hal itu bisa ditafsirkan sebagai suatu penegasan.

Setiap penjelasan sejarah, dengan demikian, senantiasa berkenaan dengan peristiwa tunggal. Namun, penekanan pada aspek ideografis ini haruslah memiliki acuan teleologis, yakni agar unit-unit sejarah menjadi dapat dimengerti secara cerdas (*intelligibility*). Acuan ini, oleh Kuntowijoyo, dimaksudkan untuk menjernihkan kerancuan antara penjelasan sejarah dan penjelasan kausal (sebab-akibat). Ditegaskannya, kausalitas hanyalah salah satu bentuk dari penjelasan sejarah. Untuk mempertegas maksud tersebut, penulis buku ini merangkum enam kaidah penjelasan sejarah, yakni konsistensi; generalisasi; inferensi (kesimpulan) statistik dan metode statistik; pembagian waktu; cakupan *sejarah deskriptif-naratif*; bersifat multi-tafsir.

Lantas, bagaimanakah penjelasan sejarah harus dikerjakan? Kuntowijoyo dengan piawai mengajak pembaca untuk melakukan “wisata akademik”, yakni dengan mengamati bagaimana sejarawan bekerja (“historians at work”). Kuntowijoyo membekali pembaca dengan “panduan wisata” yang berupa rangkaian “review” konkret atas berbagai karya sejarawan. Tidak kurang dari 60 sumber bacaan direview penulis buku ini guna menjelaskan delapan tema, yakni periodisasi (7 sumber bacaan), kausalitas (11 sumber bacaan) analisis struktural (9 sumber bacaan), paralelisme (7 sumber bacaan), generalisasi konseptual (9 sumber bacaan), *rapprochement* antara sejarah dan teori sosial (7 sumber bacaan), kuantifikasi (5 sumber



bacaan), dan sejarah naratif (5 sumber bacaan) — selengkapnya, lihat pada “Daftar Bacaan untuk Review”.

Ada sedikit catatan singkat yang perlu ditambahkan untuk rangkaian review tersebut, khususnya untuk tema sejarah naratif. Pada tema ini, oleh penulisnya, semula direncanakan ada 7 sumber bacaan yang hendak direview. Namun, hingga 22 Februari 2005 — tanggal meninggalnya penulis buku ini— ada dua sumber acuan yang belum sempat direview, yakni (i) Peter Laslett, *The World We Have Lost: England Before the Industrial Age* (New York: Charles Scribner's Sons, 1965); (ii) Samuel P. Hays, *The Response to Industrialism 1885-1914* (Chicago: The University of Chicago Press, 1957). Begitupun, hal itu tidak mengurangi “keutuhan” buku ini sebagai buah pikiran terakhir dari Prof. Dr. Kuntowijoyo tentang ilmu sejarah. Malahan, hal ini dapat digunakan sebagai tonggak warisan untuk mendorong kreativitas riset dari sejarawan-sejarawan muda. Tentunya harapan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk memperkuat kecenderungan antikuranisme dalam karya-karya sejarawan. Pasalnya, Kuntowijoyo dikenal sebagai sejarawan yang sangat mendorong sejarawan muda untuk membiasakan diri menulis topik-topik sejarah kontemporer, sebagaimana dikutipkan paragraf terakhir “Kata Pengantar Penulis” dalam karyanya *Metodologi Sejarah* (2003-ed. kedua) berikut ini.

Sejarawan, sama seperti ilmuwan lain, punya hak penuh berbicara masalah-masalah kontemporer. Dengan pikiran bahwa ilmu sejarahnya itu *contemporaneous* sejarawan-sejarawan muda akan melangkah ke dunia jurnalistik, politik, birokrasi, dan LSM dengan mantap. Bahkan, mereka yang bekerja di pengalengan ikan, pertukangan sepatu, perusahaan batik, pabrik biskuit, dan dunia usaha lain tetap dapat menjadi sejarawan. *Titik*. (“cerpenis adalah penulis



cerpen, apa pun pekerjaannya”). Tanggalkan anggapan bahwa hanya mereka yang bekerja sebagai dosen universitas dan institusi-institusi ilmiah berhak disebut sejarawan!

Persiapan penyusunan buku ini dilakukan setelah penulis buku ini meninggal dunia. Karenanya, kehadiran buku ini hanya dimungkinkan lantaran ada kepeduliaan yang begitu besar dari Ibu Susilaningih (isteri almarhum Prof. Dr. Kuntowijoyo). Ibu Susi, demikian panggilan singkatnya, bukan hanya mendokumentasikan secara rapi rangkaian naskah dalam buku ini, namun juga “mengalami sejarah” penulisan naskah dan penyusunan buku ini. Untuk itu, kami merasa amat beruntung karena dipercaya untuk mengolah “warisan” naskah ini. Kami juga sangat berterima kasih atas bantuan Ibu Susi terkait hal-hal teknis yang diperlukan dalam penerbitan buku ini, baik dalam penelurusan naskah asli, maupun dalam menyediakan buku-buku acuan review yang dibahas dalam buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. Djoko Suryo yang berkenan meluangkan pikiran melalui “Kata Pengantar”.

Pengetahuan, menurut Pierre Bourdieu, adalah modal budaya bagi cendekiawan dalam melestarikan posisi sosialnya. Segenap sumbangan pikiran Kuntowijoyo dalam ilmu sejarah kiranya dapat pula menjadi modal budaya bagi para sejarawan muda dalam mengemban amanat masing-masing sebagai produsen ilmu pengetahuan.

Selamat Membaca!

Yogyakarta, Januari 2008

Penerbit



KATA PENGANTAR

— Prof. Dr. Djoko Suryo

Buku *Penjelasan Sejarah* karya Prof. Dr. Kuntowijoyo ini hadir dengan menyajikan salah satu aspek penting dalam pembahasan Ilmu Sejarah. Buku ini pada dasarnya merupakan pembahasan lebih lanjut dari buku *Metodologi Sejarah*¹, yang edisi pertamanya terbit pada tahun 1994 dan edisi kedua pada tahun 2003. Pada buku *Metodologi Sejarah*, penulis lebih menekankan pembahasannya pada segi-segi yang berkaitan dengan pembicaraan tentang kerangka pemikiran teoretik atau konseptual, pendekatan (*approach*), sumber-sumber sejarah, jenis-jenis kajian sejarah. Pada buku *Penjelasan Sejarah*, penulis lebih memusatkan pembicaraannya pada salah satu aspek teori sejarah, yaitu teori penjelasan sejarah (*historical explanation theory*). Substansi kedua buku tersebut saling berkaitan,

1 Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. Edisi Kedua (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003).



sehingga keduanya dapat digunakan sebagai bahan seri pembahasan tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan Teori dan Metodologi Sejarah.

Isi pokok buku *Penjelasan Sejarah* ini terbagi dalam sembilan bab. Masing-masing bab memuat bahasan penjelasan sejarah yang berkaitan dengan dimensi teoretis dan metodologis dalam kajian sejarah. Bab I membahas tentang hakikat sejarah dan pengertian tentang penjelasan sejarah. Bab II membicarakan penjelasan sejarah yang berkaitan dengan persoalan periodisasi. Bab III menguraikan segi-segi penjelasan sejarah yang berkaitan dengan persoalan kausalitas sejarah. Bab IV menelaah penjelasan sejarah melalui konsep analisis struktural. Bab V mengkaji penjelasan sejarah melalui konsep paralelisme dalam sejarah. Bab VI mengupas persoalan penjelasan sejarah melalui konsep generalisasi sejarah. Bab VII mencermati persoalan *Rapprochement* Sejarah dan Teori Sosial yang penting dalam penjelasan sejarah. Bab VIII menerangkan pendekatan kuantitatif dalam penjelasan sejarah. Bab IX memberikan gambaran tentang sejarah Naratif sebagai salah satu bentuk penjelasan sejarah yang tidak kalah pentingnya digunakan dalam penulisan sejarah.

Pembaca akan dipermudah dalam mengikuti uraian keseluruhan buku ini, karena penulis memiliki kemampuan untuk menyajikan uraiannya pada masing-masing bab dalam bentuk bahasa penyajian yang sederhana, mudah dimengerti, mencakup banyak hal, dan dilengkapi dengan contoh-contoh yang kongkret. Sebagai contoh, pada Bab I (hlm. 1-18), penulis menegaskan, misalnya, bahwa hakikat sejarah pada dasarnya adalah ilmu mandiri yang bertugas untuk menafsirkan, memahami dan menuturkan gejala tunggal, dalam lingkup waktu memanjang dan lingkup ruang terbatas (hlm. 2-8). Penjelasan sejarah, menurut penulis, mencakup tiga hal, yaitu (1)



hermeneutics dan *verstehen*, menafsir dan mengerti; (2) penjelasan tentang waktu yang memanjang dan (3) penjelasan tentang peristiwa tunggal (hlm. 10). Sementara kaidah-kaidah penjelasan sejarah disederhanakan oleh penulis menjadi enam hal, yaitu (1) *regularity* (keajegan, keteraturan, konsisten); (2) generalisasi; (3) memakai inferensi (kesimpulan) *statistic* dan metode *statistic*; (4) pembagian waktu dalam sejarah, yaitu jangka panjang (waktu geografis), siklus jangka pendek (waktu sosial) dan peristiwa; (5) penjelasan dalam sejarah naratif, sejarah deskriptif atau sejarah yang bercerita; dan (6) penjelasan yang bersifat *multi-interpretable*, tergantung pada perspektif sejarawan (hlm. 10-11).

Secara implisit buku ini telah berhasil meramu hakikat penjelasan sejarah yang selama tiga dekade pada abad XX telah menjadi bahan perdebatan dan ketidaksepakatan di antara kaum positivis dan kaum idealis dalam pendekatan sejarah. Kaum positivis, pada satu pihak, antara lain diwakili oleh Karl Popper dan Carl Hempel, dan kaum idealis, pada pihak lain, antara lain diwakili oleh Dilthey, Collingwood, Croce, dan Max Weber. Perdebatan ini antara lain berkisar pada persoalan sebagai berikut. Haruskah semua penjelasan sejarah seragam dengan menggunakan model yang sama (deduksi) ataukah penjelasan dalam sejarah boleh memiliki logika sendiri? Apakah kaum positivis benar ketika ia menyatakan bahwa secara metodologis tidak ada perbedaan mendasar antara sejarah dan ilmu alam? Apakah sejarah (dipandang sebagai disiplin kognitif) *sui generis* atau tidak? Haruskah sejarawan menggunakan hukum (atau generalisasi universal) seperti ahli ilmu alam atau dapatkah ia mencapainya dengan cara berbeda?

Perlu dicatat bahwa selain pembahasan penjelasan sejarah yang diuraikan dalam buku ini, sesungguhnya masih terdapat segi-segi penjelasan sejarah lainnya yang menarik pula untuk diperbincang-



kan, namun belum tercakup secara eksplisit di buku ini. Misalnya, perbincangan penjelasan sejarah yang berkaitan dengan persoalan pendekatan dekonstruksi sejarah dan poskolonial yang muncul pada masa-masa mutakhir ini. Penjelasan dekonstruksi sejarah dan poskolonial tersebut pada hakikatnya timbul sebagai akibat dari pengaruh perkembangan posdisipliner dan posmodernisme. Mengenai hal ini, dapat disimak, antara lain dalam karya Alun Munslow, *Deconstructing History*² dan *The New History*³, serta karya Barbara Bush dalam *Imperialism and Postcolonialism*⁴. Akan tetapi, hal ini tidak mengurangi pentingnya substansi pokok penjelasan sejarah yang disajikan dalam buku ini sebagai pegangan untuk memahami penjelasan sejarah yang berlaku dalam kajian sejarah selama ini.

Akhir kata, buku *Penjelasan Sejarah* yang merupakan karya terakhir (almarhum) Prof. Dr. Kuntowijoyo ini diharapkan akan dapat menambah pemahaman kita terhadap kajian sejarah. Semoga karya Prof. Dr. Kuntowijoyo ini, dapat menambah khasanah bacaan Ilmu Sejarah, yang berguna bagi mahasiswa, pengkaji, peneliti dan peminat dalam bidang kajian sejarah serta masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Yogyakarta, Desember 2007

Djoko Suryo

2 Alun Munslow, *Deconstructing History*,. (London and New York: Routledge, 1997).

3 Alun Munslow, *The New History*. N (London, etc: Parson Longman, 2003).

4 Barbara Bush, *Imperialism and Postcolonialism*. (Harlow: Pearson Education Limited, 2006).



DAFTAR ISI

Prakata	v
Kata Pengantar — Prof. Dr. Djoko Suryo	xi
Daftar Isi	xv
1. Penjelasan Sejarah (<i>Historical Explanation</i>)	1
• Hakikat Sejarah	2
• Catatan	9
• Penjelasan Sejarah	10
2. Periodisasi	19
3. Kausalitas	35
• Studi Kasus	37
• Studi Perubahan	46
4. Analisis Struktural	59
5. Paralelisme	79



• Kemiripan	80
• Pengulangan	90
6. Generalisasi Sejarah	97
7. <i>Rapprochement</i> : Sejarah Dan Teori Sosial	117
8. Kuantifikasi	131
9. Sejarah Naratif	147
Daftar Bacaan untuk Review	159
Indeks	165
Biodata	177



PENJELASAN SEJARAH (*Historical Explanation*)

APAKAH penjelasan sejarah (*historical explanation*) itu? Penjelasan sejarah ialah usaha membuat unit sejarah *intelligible* (dimengerti secara cerdas).¹ Penekanan buku ini pada *intelligibility* sengaja dikerjakan karena banyak buku yang menyamakan penjelasan sejarah dengan penjelasan kausal, padahal kausalitas hanyalah salah satu dari penjelasan sejarah.

Mengapa sekedar “penjelasan” dan bukan “analisis” yang lebih meyakinkan dan pasti? Kata “analisis” memang juga dipakai secara

¹ John Passmore, “Explanation in Everyday Life, in Science, and in History” dalam George H. Nadel (ed.) *Studies in the Philosophy of History: Selected Essays from History and Theory* (New York: Harper Torchbooks, 1965), hlm. 16-34.



bergantian dengan “penjelasan”, di antaranya oleh Marc Bloch,² terutama ketika orang menganalisis hubungan kausal antar gejala sejarah. Akan tetapi, karena kata “penjelasan” lebih sesuai untuk sejarah pada umumnya, sedangkan kata “analisis” tidak sepenuhnya sesuai dengan hakikat ilmu sejarah, maka di sini dipakai kata “penjelasan”. Namun, kalau institusi di tempat Anda menghendaki, jangan ragu-ragu memakai kata “analisis”.

Selanjutnya, pengantar ini akan menerangkan: (1) hakikat ilmu sejarah, dan (2) arti penjelasan. Buku ini nanti akan menerangkan satu per satu penjelasan sejarah dengan menunjukkan bagaimana sejarawan bekerja (“historians at work”). Cara yang dipakai ialah melalui “review” atas karya-karya sejarawan (sedapat-dapatnya mengenai Indonesia) secara konkret, tidak teoretis tapi empiris.

HAKIKAT SEJARAH

Sejarah adalah ilmu yang mandiri. Mandiri, artinya mempunyai filsafat ilmu sendiri, permasalahan sendiri, dan penjelasan sendiri.

SEJARAH: MENAFSIRKAN, MEMAHAMI, MENGERTI. Kita mulai dengan menunjukkan kekhasan sejarah sebagai ilmu. Wilhelm Dilthey (1833-1911) membagi ilmu menjadi dua, yaitu ilmu tentang dunia “luar” atau *Naturwissenschaften* (ilmu-ilmu alam) dan ilmu tentang dunia “dalam” atau *Geisteswissenschaften* (ilmu-ilmu kemanusiaan, *humanities*, *human studies*, *cultural sciences*). Dalam

² Marc Bloch, *The Historian's Craft* (New York: Vintage Books, 1953), “Historical Analysis”, Chapter IV.



ilmu-ilmu kemanusiaan dimasukkannya sejarah, ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi sosial, psikologi, perbandingan agama, ilmu hukum, ilmu politik, filologi, dan kritik sastra.³

Menurut Dilthey, pendekatan kepada *Geisteswissenschaften* ialah dengan *hermeneutics* (*hermeneutikos* [Yunani], tafsir, interpretasi). Hermeneutika ialah memahami “inner context” dari perbuatan yang tidak dinyatakan dalam kata-kata pelaku itu sendiri.⁴ Dilthey memberi contoh bagaimana menafsirkan dialog Plato, sebuah dokumen tertulis. Pertama-tama ialah (1) meletakkan dialog dalam sebuah “inner context” untuk mengetahui latar belakang yang tersembunyi; kemudian (2) mengadakan interpretasi atas perkataan-perkataannya untuk mengetahui afiliasi politik, kekuatan, serta kelemahannya.

Ada kritik bahwa Dilthey mencampur-adukkan hermeneutika untuk *Geisteswissenschaften* dengan *verstehen* untuk sejarah, tertelung dalam historisisme (serba sejarah). Dilthey mengatakan, “Hidup dan sejarah mempunyai arti yang sama seperti huruf-huruf dalam satu kata.”⁵ Memang, kenyataannya bagi Dilthey, interpretasi berarti mengerti (*Verstehen, verstehen, to understand*), metode yang khusus diajakannya guna mendekati sejarah.

Akan tetapi, jalan pikiran Dilthey begini. Dilthey berpandangan bahwa (1) manusia hanya bisa dipahami melalui konsep tentang Hidup (*Life*), tidak dari konsep-konsep abstrak *Naturwissenschaften*; dan (2) manusia adalah makhluk yang menyejarah, karenanya hanya dapat diterangkan melalui sejarahnya. Katanya, “Seperti apa saja bentuk hidup itu, sejarah akan memberitahu kita.” Dapat disimpul-

3 Wilhelm Dilthey, *Pattern & Meaning in History* (New York: Harper Torchbooks, 1961), *passim*; Howard Nelson Tuttle, *Wilhelm Dilthey's Philosophy of Historical Understanding: A Critical Analysis* (Leiden: E. J. Brill, 1969), *passim*.

4 Dilthey, *Pattern & Meaning in History*, hlm. 77.

5 Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method* (London: Sheed and Ward, 1979), hlm. 213.



kan bahwa sejarah dan *Geisteswissenschaften* sebenarnya bertumpu pada metode yang sama, yaitu *Verstehen*.⁶

Verstehen adalah pengalaman “dalam” yang menembus jiwa dan seluruh pengalaman kemanusiaan. Karenanya, pengertian kita tentang suatu institusi, hukum, teori, karya seni, nilai, adalah “membuka” struktur yang ada di belakang kertas, tinta, batu, dan semua barang-barang kultural buatan manusia. Manusia dapat mengerti “makna dalam” dari benda-benda simbolis: salib, bendera, konstitusi, atau pemberontakan, dengan merujuk pada arti di balik hidup keseharian ini. Hal-hal tersembunyi itu dapat “dimengerti” meskipun tidak dapat diterangkan. Sejarah tidak pernah menjadi dimensi “luar”, tetapi selalu dijalani sebagai kesadaran.

Verstehen atau *understanding* adalah usaha untuk “meletakkan diri” dalam diri yang “lain”. Tidak ada *Verstehen* tanpa menghayati kompleks makna-emosi-nilai yang ada. *Verstehen* adalah mengerti “makna yang ada di dalam”, mengerti *subjective mind* dari pelaku sejarah. Demikianlah, *Verstehen* adalah menemukan “the I” dalam “the Thou” (aku dalam engkau).

Dari kekhasan ilmu sejarah itu jelaslah bahwa harus ada pendekatan khusus untuk menerangkan gejala sejarah (peristiwa, tokoh, perbuatan, pikiran, dan perkataan). Pendekatan yang digunakan untuk *Naturwissenschaften* tidak sesuai dengan hakikat *Geisteswissenschaften*. Abrasi pantai, tanah longsor, banjir bandang, dan peristiwa alam yang lain memang dapat di-“analisis” tentang sebab-akibat yang *pasti* berdasar teori ilmu yang didapat secara kumulatif. Demikian halnya dengan gejala teknik, kedokteran, astronomis, peternakan, geologi, dan sebagainya, tidak sesuai dengan

⁶ Tuttle, *Wilhelm Dilthey's, passim*.



sejarah. Istilah “penjelasan” memadai untuk menerangkan gejala sejarah.

SEJARAH: MEMANJANG DALAM WAKTU, TERBATAS DALAM RUANG. Ada satu aspek sejarah yang dilupakan Dilthey: sejarah adalah proses, sejarah adalah perkembangan.⁷ Untunglah, kekurangan itu dalam perjalanan disiplin ilmu sejarah digenapi - di antaranya - oleh John Galtung dalam *Theory and Method of Social Research*.

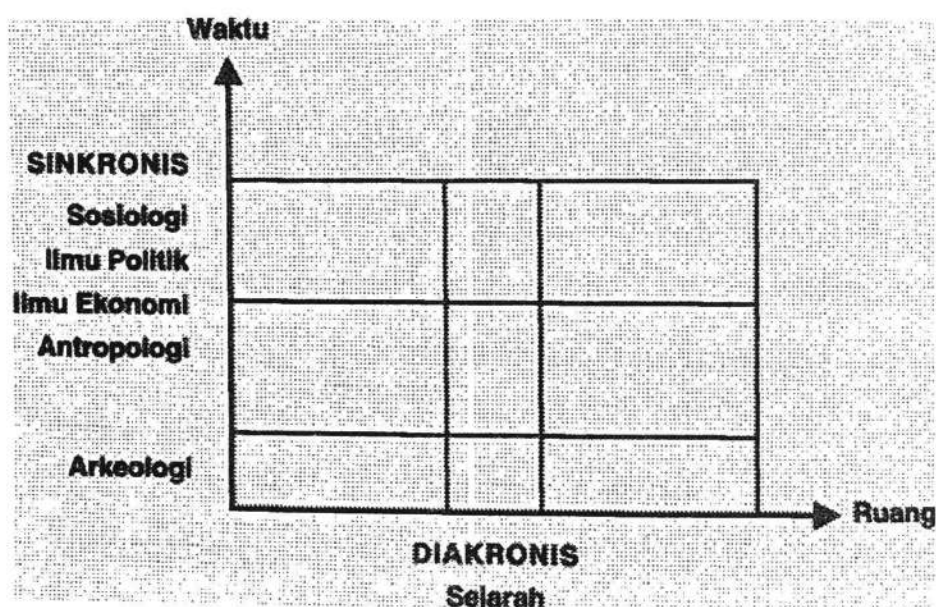
Menurut Galtung, sejarah adalah ilmu diakronis (*diachronic*; *dia* [Latin, melalui] dan *chronicus* [Latin, waktu]), sedangkan ilmu sosial yang lain adalah ilmu sinkronis (*synchronic*; *syn* [Yunani, bersamaan] dan *chronicus* [Latin, waktu]). Sejarah disebut ilmu diakronis, sebab sejarah meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Sebaliknya, ilmu sosial yang lain (sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, antropologi) adalah ilmu sinkronis, yaitu ilmu yang meneliti gejala-gejala yang meluas dalam ruang, tetapi dalam waktu yang terbatas.⁸ Gambar 1 menunjukkan hubungan antara ilmu sosial diakronis dan ilmu sosial sinkronis itu.

Beberapa contoh topik (fiktif) dari sejarah yang diakronis dan ilmu sosial lain yang sinkronis akan menerangkan peredaan itu secara lebih jelas. Topik sejarah yang diakronis, misalnya: “Sejarah Uni Sovyet, 1917-1989”; “Diplomasi Amerika: Gugurnya Politik Isolasi, 1898-2003”; “Perang Dingin, 1945-1989”; “Migrasi Orang Madura, 1900-2000”; “Dari Batavia ke Jakarta: Pemekaran Kota, 1602-2000”

7 Dilthey, *Pattern & Meaning*, hlm. 51, “General Introduction” oleh H. P. Richman.

8 John Galtung, *Theory and Method of Social Research* (New York: Columbia University, 1969), Chapter 1.

(judul-judul sengaja diberi angka tahun, semata-mata untuk menunjukkan sifatnya yang diakrois. Penelitian arsip memungkinkan orang untuk meneliti waktu yang panjang). Istilah *memanjang dalam waktu* itu meliputi juga gejala sejarah yang ada di *dalam* waktu yang panjang itu. Misalnya, topik-topik tentang “Perang Cina di Kartasura”; “Kebangkitan Nasionalisme di Indonesia”; “Sarekat Islam: 1911-1924”; “Ki Hadjar Dewantoro”; dan sebagainya.



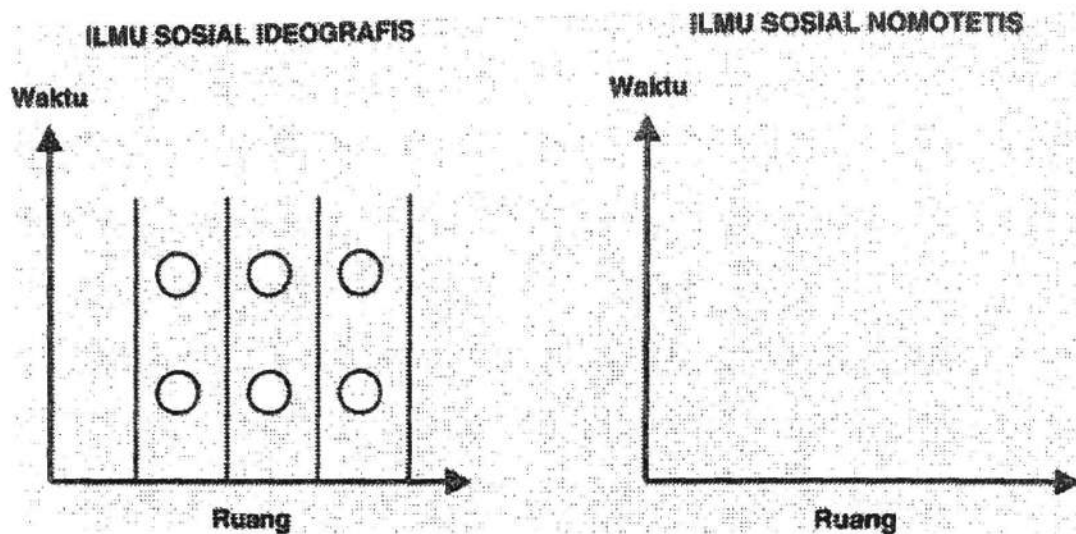
Gambar 1.
Hubungan Ilmu Sosial Diakronis dan Ilmu Sosial

Sementara itu, contoh topik-topik dari ilmu sosial lainnya misalnya adalah: “Tarikat Naqsyabandiyah-Qadiriyyah di Pesantren-Pesantren Jawa”; “Elit Agama: Kasus Jombang dan Daerah Tapal Kuda di Jawa Timur”; “Kota-Kota Metropolitan: Jakarta, Surabaya, dan Medan”; dan “Konflik Agama dan Penyelesaiannya: Maluku dan Poso” (metode survai dan interviu hanya memungkinkan topik yang kontemporer dengan jangka waktu yang pendek, tetapi bisa jadi ruangnya sangat luas).



Kita ingin mencatat bahwa ada persilangan antara sejarah yang diakronis dan ilmu sosial lain yang sinkronis. Artinya, ada kalanya sejarah menggunakan ilmu sosial, dan sebaliknya, ilmu sosial menggunakan sejarah. Ilmu diakronis bercampur dengan ilmu sinkronis. Amati topik-topik (fiktif) ini: “Peranan Militer dalam Politik, 1945-1999” yang ditulis seorang ahli ilmu politik; “Elit Agama dan Politik, 1945-2003” yang ditulis ahli sosiologi; “Kriminalitas, dari Batavia sampai Jakarta” oleh sejarawan dengan menggunakan teori *sociology of crime*; dan “Santet di Banyuwangi, 1980-2000” yang ditulis sejarawan dengan menggunakan teori antropologi.

SEJARAH: MENUTURKAN GEJALA TUNGGAL. Sejarah, sebagaimana *social science* yang lain, mempunyai penceritaan (*description*) dan penjelasan (*explanation*). Namun, sejarah berbeda dengan ilmu sosial yang lain. Dalam penceritaan, sejarah bersifat menuturkan gejala tunggal (*ideographic, singularizing*), sedangkan ilmu sosial lain menarik hukum umum (*nomothetic, generalizing*). Rinciannya begini: sejarah menuturkan suatu objek atau ide (*ideographic; ideo* [Yunani, ide] dan *graphein* [Yunani, menulis]) dan mengangkatnya sebagai gejala tunggal (*singularizing; singularis* [Latin, tunggal]). Sementara itu, ilmu sosial lain bermaksud menarik hukum (*nomothetic; nomos* [Yunani, hukum], dan *tithenei* [Yunani, menegakkan]), karenanya mengangkat gejala-gejala yang umum (*generalizing; generalis* [Latin, umum]). (Wilhelm Windelband menyebutnya *ideographic* [menuturkan gejala unik, individual, tersendiri] dan *nomothetic* [menarik hukum]). Gambar 2 akan memperlihatkan sejarah yang *ideographic* dan ilmu sosial lain yang *nomothetic*.



Gambar 2
Ilmu Sosial Ideografis dan Ilmu Sosial Nomothetis

Contoh topik (fiktif) memperjelas perbedaan itu. Topik untuk sejarah misalnya: “Revolusi Indonesia, 1945-1949”; “Revolusi Perancis, 1789”; “PRRI”, dan “Tragedi Tanjung Priok”. Hal apa pun yang dituturkan oleh sejarawan hanya berlaku secara khusus bagi Revolusi Indonesia, bagi Revolusi Perancis, bagi PRRI, dan bagi tragedi Tanjung Priok; tidak bagi peristiwa lainnya, apalagi bagi semua revolusi dan peristiwa berdarah.

Topik untuk ilmu sosial lain misalnya: “Industrialisasi dan Mobilitas Sosial”; “Ketimpangan Ekonomi dan Radikalisme Politik”; “Masyarakat Petani”; “Binatang Ekonomi”; “Masyarakat Industrial”; dan “Manusia Politik”. Dalam semua topik itu orang ingin meng-*generalize*. Atau, dengan kata lain, orang ingin membuat *teori* tentang mobilitas sosial, radikalisme, petani, perilaku pelaku ekonomi, masyarakat industri, dan pribadi para politisi.



CATATAN

Dalam sejarah historiografi, ada *rapprochement* antara ilmu sejarah dan ilmu sosial, sehingga penjelasan tentang hakikat ilmu sejarah di atas tidak sepenuhnya berlaku. Namun demikian, hakikat ilmu sejarah sangat perlu diketahui justru agar kita mengetahui betul bahwa ilmu sejarah mempunyai *raison d'être* sendiri. Aliansi-aliansi bisa dilakukan, tetapi sejarawan harus sadar bahwa dia sedang menulis sejarah.

Dalam tradisi historiografi Amerika muncul *The New History* pada 1912 dengan tokoh utama James Harvey Robinson. Ia menganjurkan pemakaian ilmu sosial dalam penulisan sejarah. Sebelumnya, historiografi Amerika didominasi oleh *scientific history* yang mengunggulkan sejarah faktual (tradisi Leopold von Ranke) yang masuk ke Amerika dari Jerman pada perempat ketiga abad ke-19.⁹

Sementara itu dalam historiografi Perancis pada tahun 1920-an ada minat terhadap “new kind of history” dengan berdirinya *Annales d'histoire économique et sociale* (1929) yang dirintis oleh Marc Bloch dan Lucien Febvre. Sama seperti koleganya di Amerika, mereka mengharapkan supaya sejarah mempunyai “wider and more human history”. Sejarah hendaknya bukan lagi semata-mata narasi mengenai kejadian-kejadian, tetapi analisis mengenai struktur.¹⁰ Sementara itu, pada akhir 1960-an di Amerika berkembang *social scientific history*.¹¹

9 John Higham, *History: Professional Scholarship in America* (New York: Harper Torchbooks, 1973), hlm. 92-116.

10 Peter Burke, *History & Social Theory* (Cambridge: Polity Press, 1992), hlm. 15-16.

11 The Behavioral and Social Science Survey, *History as Social Science* (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, Inc., 1971).



PENJELASAN SEJARAH

Setelah mengetahui jenis sejarah sebagai ilmu, di bawah ini akan diterangkan perihal *penjelasan sejarah*. Sehubungan dengan jenis ilmu, peganglah tiga hal berikut: (1) penjelasan sejarah adalah *hermeneutics* dan *verstehen*, menafsirkan dan mengerti; (2) penjelasan sejarah adalah penjelasan tentang waktu yang memanjang; dan (3) penjelasan sejarah adalah penjelasan tentang peristiwa tunggal.

Dalam banyak buku tentang penjelasan sejarah, tekanan utamanya ialah tentang penjelasan sebab-akibat. Misalnya, buku Alan J. Lichtman dan Valerie French, *Historians and the Living Past*; buku Patrick Gardiner, *The Nature of Historical Explanation*; buku C. Behan McCullagh, *Justifying Historical Description*; dan buku Chris Lorenz, *De Constructie van het Verleden*.¹² Tetapi, sebagaimana akan terlihat, penjelasan sejarah lebih daripada penjelasan sebab-akibat (penjelasan kausal). Menekankan sebab-akibat dan meninggalkan penjelasan yang lainnya berarti sebuah reduksi atas hakikat ilmu sejarah. Karenanya, akan kita tunjukkan arti aslinya kemudian kita memperluasnya sesuai dengan keperluan.

Kiranya tidak perlu lagi ditekankan bahwa semua penjelasan sejarah harus didukung oleh data yang otentik, terpercaya, dan tuntas. Selanjutnya, bila disederhanakan, kaidah-kaidah penjelasan sejarah ialah: (1) *regularity* (Gardiner);¹³ (2) generalisasi (McCullagh);¹⁴

12 Allan J. Lichtman dan Valerie French, *Historians and the Living Past* (Arlington Height, Illinois: Harlan Davidson, Inc., 1972), Patrick Gardiner, *The Nature of Historical Explanation* (London: Oxford University Press, 1961); G. Behan McCullagh, *Justifying Historical Description* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984); Chris Lorenz, *De Constructie van het Verleden: Een Inleiding in de Theorie van de Geschiedenis* (Amsterdam: Boom, 1987).

13 Gardiner, *The Historical Explanation*, Part I.

14 McCullagh, *Justifying Historical Description*, Chapter 6.



(3) memakai inferensi (kesimpulan) statistik dan metode statistik (McCullagh);¹⁵ (4) pembagian waktu dalam sejarah, yaitu *longue durée* (jangka panjang, waktu geografis), *conjonture*, (siklus jangka pendek, waktu sosial) dan *l'histoire événe mentielle* (peristiwa) seperti dikemukakan oleh Fernand Braudel;¹⁶ (5) penjelasan sejarah juga terdapat dalam sejarah naratif, sejarah deskriptif, atau sejarah yang bercerita (*verhalende verklaringsmodel*);¹⁷ dan (6) penjelasan bersifat *multi-interpretable*, tergantung pada perspektif sejarawan [*perspectivism*] (Lorenz).¹⁸ Keenam pokok tersebut akan diterangkan di bawah ini dengan kata-kata sendiri tetapi tetap mengacu pada maksud aslinya, dan disertai kemungkinan memakainya pada bab-bab di dalam buku ini.

Pertama: Regularity (keajekan, keteraturan, konsistensi). *Regularity* dimaksudkan sebagai cara menjelaskan hubungan kausal antar-peristiwa. “Kalau peristiwa C terjadi, maka peristiwa E yang berhubungan dengan peristiwa C itu akan terjadi”, kata Gardiner. Akan tetapi, kata Gardiner selanjutnya, dalam kausalitas sejarah ada *ceteris paribus* (dalam hal keadaan yang lain sama, akan sama pula kejadiannya; artinya, dalam hal keadaan yang lain berubah, akan berubah pula kejadiannya) dan keterbukaan.¹⁹ Kalau ada kekosongan otoritas, maka akan terjadi anarki. Itulah yang terjadi pada Mei 1998 di Indonesia: pembakaran, dan konon juga pemerkosaan; di Baghdad pada April 2003: penjarahan gedung-gedung pemerintah, toko-toko, bahkan rumah sakit.

15 McCullagh, *ibid.*, “Statistical Inferences”, Chapter 3; “Statistical Methods”, hlm. 141-154.

16 Fernand Braudel, *On History* (Chicago: University of Chicago Press, 1980), Part 1.

17 Lorenz, *De Constructie*, hlm. 96-107.

18 *Ibid.*, hlm. 56.

19 Gardiner, *The Nature*, hlm. 2 dan Part III.



Tetapi, mari kita ambil kebebasan untuk merentangkan arti *regularity*. Kalau *regularity* yang aslinya adalah penjelasan *antar-peristiwa* yang mengandung prediksi sejarah menjadi penjelasan *dalam-peristiwa* (*inner coherence*). Artinya, secara ajek gejala-gejala muncul di mana saja terjadi suatu peristiwa. Contoh Indonesia-nya: penjelasan sejarah tentang sebab-musabab Revolusi Indonesia. Sekali diterangkan bahwa revolusi itu adalah revolusi pemuda, maka di semua tempat peristiwa harus disebabkan oleh pemuda, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Di tingkat pusat ada gerakan pemuda Menteng (Peristiwa Rengas Dengklok), di daerah-daerah ada Pesindo, BPRI, Hizbullah, Angkatan Muda Kereta Api, dan sebagainya. Perkecualian, misalnya, adanya Sabilillah (gerakan kiai-kiai tua) di samping Hizbullah, tidak menggugurkan tesis bahwa revolusi Indonesia adalah revolusi pemuda. Contoh sejarah lain: Revolusi Perancis (1789) adalah revolusi borjuis, *Civil War* di Amerika (1861-1865) adalah perang budak antara industrialis di Utara dan tuan tanah di Selatan, Revolusi Rusia (1917) adalah revolusi proletar, dan revolusi Cina (1949) adalah revolusi petani. Demikianlah kita akan memakai *regularity* - versi kita - terutama ketika kita menerangkan penjelasan kausal (lihat Bab 3. "Kausalitas"), dan sebenarnya semua penjelasan sejarah memerlukan *regularity* di dalamnya.

Kedua: Generalisasi. Generalisasi adalah persamaan karakteristik tertentu. "Suatu bagian yang menjadi ciri sebuah kelompok, juga menjadi ciri dari kelompok lain pula", kata McCullagh.²⁰ Generalisasi akan muncul dalam beberapa penjelasan sejarah (lihat Bab 5. "Paralelisme"; Bab 6. "Generalisasi Sejarah", dan Bab 7. "*Rapprochement: Sejarah dan Teori Sosial*"). Dalam hal ini, yang dimaksud

20 McCullagh, *Justifying ...*, hlm. 130.



ialah generalisasi konseptual sebagaimana terdapat di dalam setiap *intellectual construct*, baik dalam ilmu sejarah maupun ilmu sosial lain. Konsep-konsep sejarah seperti “feodalisme”, “puritanisme”, dan “pergerakan nasional”, atau konsep-konsep ilmu sosial seperti “kelas”, “mobilitas sosial”, atau “masyarakat petani”, semuanya mengandung generalisasi konseptual semacam itu.

Ada yang disebut generalisasi kausal atau hukum sejarah - yang tidak dibicarakan di dalam buku ini. Hukum sejarah terdapat dalam buku-buku Arnold J. Toynbee. Toynbee secara “empiris” mempelajari 19 (atau 21) peradaban, dan mengaku telah menemukan “hukum” sejarah. “Hukum” sejarah itu ialah: “challenge-response” yang ada dalam karya monumentalnya, *A Study of History* (12 jilid ditulis pada 1933-1961 dengan ringkasan oleh D. C. Somervell dalam 2 jilid); dan “hukum” sejarah yang ada dalam buku kecil *The World and the West* (“Hukum Radiasi Peradaban”). Ada lagi generalisasi kausal atau hukum sejarah yang disebut “Covering Law Model” (hukum yang serba mencakup) sebagaimana dikehendaki oleh Carl G. Hempel. Hempel terlalu filosofis, abstrak, dan memakai ilmu-ilmu alam (deduktif-nomologis) sebagai model penjelasan, sehingga tidak sesuai dengan hakikat ilmu sejarah yang termasuk ilmu-ilmu kemanusiaan.²¹

Ketiga: Inferensi Statistik, Metode Statistik. Inferensi statistik dan metode statistik menjadi andalan dalam generalisasi. Keduanya akan muncul dalam penjelasan sejarah kuantitatif (lihat Bab 8. “Kuantifikasi”). Di bawah ini adalah contoh-contoh yang diberikan oleh McCullagh.

21 Mengenai Carl G. Hempel lihat kutipannya “Explanation in Science and in History” dalam Ronald H. Nash (ed.) *Ideas of History* (New York: E. R. Dutton & Co., Inc., 1969), hlm. 79-105.



G. Kitson Clark dalam buku *The Making of Victorian England* (1962) melakukan koreksi atas salah-pandang masyarakat Inggris. Orang Inggris selalu melihat bahwa pada Zaman Victoria, Inggris merupakan masyarakat religius. Namun, kesimpulan dan metode statistik ternyata berkata lain. Berdasarkan sensus pada Maret 1851, kurang dari separo penduduk Inggris yang mengunjungi gereja pada hari Minggu.

Contoh lain ialah buku Richard L. Merrit berjudul *Symbols of American Community, 1735-1775* (1966) yang meneliti koran-koran Amerika dengan metode *content analysis* tentang “the emergence of American Nationalism”, yaitu bagaimana koran-koran Amerika menyebut Amerika Utara. Oleh Merrit, ditemukan ungkapan-ungkapan seperti “British North America”, “His Majesty’s colonies”, “our colonies in America”, “the American colonies”, dan “America”. Dari ungkapan-ungkapan tersebut, penamaan kaum kolonis yang dihubungkan dengan British berlangsung sampai tahun 1755. Sesudah itu, kaum kolonis disebut sebagai “American” (muncul lebih dari 50 persen pada 1762), sedangkan penamaan “American” mulai terjadi pada 1770, dan sesudah itu nama “American”-lah yang selalu muncul.

Keempat: Pembagian Waktu Dalam Sejarah. Pembabakan waktu dalam sejarah akan muncul dalam penjelasan sejarah dengan periode-periode (lihat Bab 2. “Periodisasi”, Bab 4. “Analisis Struktur”).

Kita akan menerangkan soal pembagian waktu dalam sejarah dengan meringkas dengan kata-kata sendiri dari ringkasan yang ada



pada buku Fernand Braudel, *On History*.²² *Pertama*, ialah waktu sejarah yang hampir-hampir tak berubah, yaitu *waktu geografis* (sejarah jangka panjang, *longue durée*). Di situ manusia berhubungan dengan lingkungan alam, sejarah bergerak berulang-ulang, terus-menerus memperbarui diri tanpa henti. Sejarah menulis benda-benda mati, seperti laut, kekayaan alam, flora, dan fauna. Benda-benda mati membeku pada musim dingin, pada musim semi burung-burung bermigrasi, kapal-kapal berlayar menurut musimnya, produk-produk pertanian diperjual-belikan. *Kedua*, di atas permukaan sejarah yang hampir-hampir tak berubah itu, ada *waktu sosial* (siklus jangka pendek, *conjuncture*, *conjuncture*). Sejarah bergerak dalam ritme yang lembut, kelompok-kelompok muncul, dinasti-dinasti dibangun, kerajaan-kerajaan berkembang. *Ketiga*, sejarah bergerak cepat dan silih-berganti; ada perang dan damai, ada menang dan kalah. Itulah yang disebut sebagai sejarah peristiwa-peristiwa (*l'histoire événementielle*).

Kelima: Narrative History. W.H. Walsh mengatakan bahwa sejarah adalah sebuah *colligation* (mengikat bersama) dari sebuah urutan (*sequence*).²³ Kiranya pendapat ini sesuai dengan apa yang disebut Lorenz, dalam studinya *De Constructie van het Verleden*, sebagai *verhalende verklaringsmodel* (model penjelasan sejarah bercerita). Dalam model ini masalah kausalitas dan penjelasan sejarah dengan bantuan teori sosial dikesampingkan.

22 Fernand Braudel, *On History*, hlm. 3-4. Lihat juga, Fernand Braudel, "History and the Social Science: The Long Term" dalam Fritz Stern (ed.), *The Varieties of History: From Voltaire to the Present*, ([USA]: Meridian Book, 1972), hlm. 404-429.

23 W. H. Walsh, *An Introduction to Philosophy of History* (London: Hutchinson, 1967), hlm. 24-45.



Lorenz, J. G. Droysen - seorang filsuf ilmu sejarah Belanda - berpendapat bahwa menulis sejarah adalah persoalan kontinuitas, *doorlopend proces*. Pendapat Droysen itulah yang dipakai juga oleh Johan Huizinga, sejarawan kebudayaan Belanda yang mendunia. Bagi Huizinga, sejarah adalah *cerita* mengenai masa lalu. Tugas sejarawan ialah menyusun bersama secara teratur (*samenhangen*). Susunan yang teratur itu sendiri tidak terdapat dalam gejala sejarah, tetapi justru menjadi tugas sejarawanlah untuk membuatnya teratur. Cara sejarawan menyusun ialah dengan merekonstruksi kembali masa lalu, menghubungkan fakta yang satu dengan lainnya, sehingga terbentuklah sebuah cerita. Sejarawan adalah arsitek bangunan sejarah itu, dan menjadikan pembaca cerita sejarah “tergugah, merasa, dan mengalami”. Sejarawan itu mirip seorang sutradara drama, sebab sejarah mempunyai “elemen epis-dramatis”. Karenanya, sejarah deskriptif-naratif sebenarnya juga sebuah *explanation* (lihat Bab 9. “Sejarah Naratif”).

Keenam: Multi-Interpretable. Bahwa ilmu sejarah yang dipahami sebagai menafsirkan, memahami, dan mengerti, cukup menjelaskan adanya subjektivisme dan relativisme dalam penjelasan sejarah. Jadi, tidakkah ada objektivitas dalam sejarah? Masalah objektivitas dan subjektivitas dalam sejarah akan tetap jadi perdebatan para ahli filsafat ilmu.

Akan tetapi, sejarah adalah ilmu kemanusiaan dan bukan ilmu alam. Selalu ada unsur manusianya, karenanya tidak bisa objektif seperti ilmu alam. Permintaan Leopold von Ranke (1795-1886) supaya sejarawan menulis sejarah “sebagaimana telah terjadi sebenarnya” (“*wie es eigentlich gewesen*”, “*as it actually was*”) merupakan impian yang tak pernah menjadi kenyataan. Bahkan,



sejarawan dalam kerja sehari-hari tidak pernah berpikir apakah tulisannya objektif atau subjektif. Bagi sejarawan sendiri, tidak ada sejarawan yang objektif dan subjektif. Yang ada ialah sejarawan yang baik dan sejarawan yang jelek.

“Multi-interpretable” itu misalnya terlihat dalam mencari sebab-musabab *Civil War* di Amerika. Sampai tahun 1942, *Social Science Research Council* mencatat perbedaan-perbedaan tersebut, sebagai berikut. Sebelum Perang Dunia Pertama, setidaknya ada tiga pendapat, yaitu *conspiracy theory* dari adanya “devils in history”, hak-hak konstitusional, dan perbudakan. Sesudah itu, ada penjelasan politik, ekonomi, dan sosial.²⁴

Demikian juga dalam sejarah diplomasi, yakni mengenai asal-usul Perang Dingin (*Cold War*). Thomas G. Paterson mengumpulkan kontroversi itu dalam *The Origins of the Cold War*.²⁵ Selanjutnya, ada perbedaan yang sangat jelas antara konservatisme dan radikalisme dalam diplomasi. Kaum konservatif adalah para pengambil keputusan, dan para radikal adalah kaum intelektual. Bagi kaum konservatif, diplomasi esensinya adalah kekuasaan dan peran Amerika - dengan perubahan dalam strategi dan metode. Lain halnya dengan pandangan para radikal yang melihat diplomasi semacam itu sebagai tragedi dan menjatuhkan martabat Amerika. Diplomasi konservatif dapat dibaca dalam Frank J. Merli dan Theodore A. Wilson (Eds.), *Makers of American Diplomacy: From Theodore Roosevelt to Henry Kissinger*,²⁶ sedangkan pandangan radikal dapat

24 Lihat “What the Historians Have Said About the Causes of the Civil War” dalam *Theory and Practice in Historical Study: A Report of the Committee on Historiography* (New York: Social Science Research Council. [1942]), hln. 55-92.

25 Thomas G. Peterson, *The Origins of the Cold War* (Lexington, Massachusetts: D. C. Heath and Company, 1970).

26 Frank J. Merli dan Theodore A. Wilson (Eds.), *Makers of American Diplomacy: From Theodore Roosevelt to Henry Kissinger* (USA: Charles Scribner's Sons, 1974).



dibaca pada buku William Appleman William, *The Tragedy of American Diplomacy*,²⁷ dan buku Howard Zinn, *The Postwar America: 1945-1971*.²⁸

Sejarah adalah ilmu yang terbuka. Maka sejarawan harus jujur, tidak menyembunyikan data, dan bertanggung jawab terhadap keabsahan data-datanya. ***

27 William Appleman William, *The Tragedy of American Diplomacy* (New York: Dell Publishing Co., Inc.: 1971).

28 Howard Zinn, *The Postwar America: 1945-1971* (USA: The Bobbs-Merrill Company, Inc.: 1973).



PERIODISASI

SEPERTI angin yang mengalir tanpa henti di atas bukit, lembah, dan lautan, sejarah terus-menerus bergerak di dalam waktu. Kebudayaan-kebudayaan hidup dan mati, pemikiran-pemikiran muncul, kota-kota tumbuh, penduduk bertambah, kerajaan-kerajaan timbul dan tenggelam, perang-perang terjadi, perdagangan meluas, dan seterusnya. Dan sejarawan ingin membuat waktu yang terus-menerus bergerak tanpa henti itu menjadi dapat dipahami (*intelligible*) dengan membaginya dalam unit-unit waktu, dalam sekat-sekat, dalam babak-babak, dalam periode-periode. Dengan kata lain, sejarawan melakukan klasifikasi atas waktu, sejarawan membuat *periodisasi*.

Jelaslah sudah bahwa periodisasi adalah konsep sejarawan semata-mata, suatu produk mental yang hanya ada dalam pikiran



sejarawan, suatu *ideal type*. Realitas sejarah itu sendiri terus-menerus mengalir tanpa sekat-sekat, dan pembabakan waktu adalah hasil konseptualisasi sejarawan, suatu rasionalisasi. Rasionalisasi bukan generalisasi. Rasionalisasi lahir dari pemikiran teoretis, sedangkan generalisasi adalah hasil dari gejala empiris.

Periodisasi yang meskipun hanya sebagai produk pemikiran sejarawan, tidaklah diputuskan secara semena-mena. Periodisasi adalah hasil pemikiran komparatif antara satu periode dengan periode lainnya setelah sejarawan melihat ciri khas suatu kurun sejarah. Selebihnya, sejarawan juga menandai adanya perubahan penting yang terjadi dari periode sejarah yang satu ke periode sejarah berikutnya. Demikianlah, periodisasi umumnya akan membagi sejarah menjadi tiga periode, yaitu *Ancient*, *Middle*, dan *Modern*. Untuk sejarah Eropa, *Ancient* adalah Yunani-Romawi, *Middle* adalah feodalisme, dan *Modern* dimulai dengan Renaissance.²⁹

Perlu diingat bahwa ada perbedaan bagi setiap aspek sejarah dalam luasan wilayah, rentang waktu, dan variasi. Misalnya aspek agama. Katolisisme pada *Middle Age* yang sudah menjangkau seluruh wilayah Eropa masih harus melakukan inkuisisi karena ada wilayah-wilayah yang menganut agama sempalan, seperti Albigenianisme (Catharisme) di Perancis. Sistem feodalisme yang muncul pada *Middle Age* mempunyai rentang waktu yang lebih lama (sampai abad ke-18), jauh sesudah *Modern Age*. Katolisisme yang menjadi agama universal pada *Middle Age* mengalami schisme, timbul varian-variannya, Protestantisme Jerman (Lutheranisme), Perancis (Huguenots), dan Inggris (Anglicanisme).

²⁹ Kebanyakan diambil dari Gordon Leff, *History and Social Theory* (Garden City, New York: Anchor Books, 1971), hlm. 117-137, "Periodization".



Adanya perbedaan aspek-aspek sejarah dalam luasan wilayah, rentang waktu, dan variasi juga terdapat dalam periodisasi sejarah Indonesia. Seperti diketahui, sejarah Indonesia pun dapat pula dibagi ke dalam tiga bagian, tapi biasanya disebut dengan *Prasejarah*, *Hindu-Buddha*, dan *Modern*. Nekara dari Prasejarah penyebarannya hanya di wilayah tertentu, tidak merata. Kehidupan Prasejarah masih ada di suku-suku terasing ketika Indonesia sudah sampai periode Modern. Kepercayaan yang berasal dari periode Hindu-Buddha (*Kawula-Gusti*, *nyadran*, pemujaan arwah) masih terdapat sampai sekarang. Varian-varian agama juga banyak, misalnya dalam pemikiran keagamaan. Ortodoksi dalam Islam sejak awal periode Modern tersaingi dengan munculnya gerakan Pembaharuan pada awal abad ke-20. Sekarang muncul apa yang disebut neo-ortodoksi, Islam liberal, fundamentalisme, dan radikalisme. Jadi, periodisasi bukanlah “tutup layar” dan “buka layar”, tetapi ada perbedaan-perbedaan perkembangan aspek sejarah, dan ada *discontinuity* dan *continuity*.

Periodisasi dalam historiografi Indonesia semula bersifat konvensional - Prasejarah, Kuno [Indianisasi], Tengah [Islamisasi], Modern [Pembaratan] - baik seluruh atau hanya satu periode. Tradisi konvensional terdapat di antaranya dalam buku kolektif *Sejarah Nasional Indonesia (SNI)*³⁰ dan buku M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*.³¹ Sekalipun keduanya sama-sama menggunakan periodisasi konvensional, tetapi ada perbedaan pendekatan. *SNI* mencoba mensintesis sejarah dan ilmu sosial, sedangkan buku M.C. Ricklefs sangat diakronis, bahkan kronologis. Masalah periodi-

30 *Sejarah Nasional Indonesia* (Jakarta: Depdikbud, PN Balai Pustaka, 1974-1984), Jilid I sampai Jilid VI, dengan editor berbeda dan tim berbeda, dan editor umum Marwati Djoened Poespongoro dan Nugroho Notokusanto.

31 M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia* (London: The Macmillan Press, Ltd., 1982).



sasi panjang ini mendapat pemahaman baru pada Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia: Dari Emporium Sampai Imperium*³² dan buku Denys Lombard yang istimewa, *Nusa Jawa: Silang Budaya*.³³ Keduanya dengan jelas menghadirkan mazhab Annales dengan periodisasi Braudel (*structure, conjuncture, events*).

Periodisasi konvensional yang panjang seperti itu juga terdapat dalam buku-buku yang mengambil satu aspek sejarah, seperti dalam buku *Sejarah Umat Islam Indonesia*³⁴ dan buku Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*.³⁵ Selain itu, ada lagi periodisasi pendek yang hanya mengambil satu topik sejarah, seperti tulisan kecil Kuntowidjojo *Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia: Mitos, Ideologi, dan Ilmu*.³⁶

Dengan demikian, periodisasi panjang tidak harus mengenai satu unit sejarah seluruhnya secara komprehensif, tetapi bisa salah satu aspeknya. Periodisasi juga tidak harus panjang, bisa satu sub-aspek yang kecil dibuat periodisasinya. Ingat, periodisasi adalah penjelasan sejarah.

Sejarah Nasional Indonesia, Jilid I-IV. Buku yang dimaksudkan sebagai “babon” sejarah Indonesia ini diterbitkan sejak 1974 dan edisi ke-4 terbit tahun 1984 (Jilid I sampai Jilid VI). Buku itu dikenal masyarakat sebagai “buku standar”. Ditulis secara kolektif di bawah pimpinan Sartono Kartodirdjo dan dalam “Kata Pengantar

32 Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia: Dari Emporium Sampai Imperium* (Jakarta: PT Gramedia, 1987), Jilid I.

33 Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996). Tiga jilid besar.

34 *Sejarah Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1987).

35 Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia* (Jakarta: Kompas, 1995), Buku I.

36 Kuntowidjojo, *Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia: Mitos, Ideologi, dan Ilmu* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah, Universitas Gadjah Mada, 2001).



Editor Umum” (Edisi ke-4) dikatakan bahwa buku itu adalah *view from within* atau “Indonesia-centrisme”. Rencananya jika ada revisi lagi, buku ini akan menggunakan konsep Braudel tentang waktu.

Buku induk ini terdiri dari enam jilid, yaitu Jilid I (Jaman Pra-sejarah di Indonesia), Jilid II (Jaman Kuna, awal M - 1500 M), Jilid III (Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, (±1500-1800), Jilid IV (Abad Kesembilanbelas, ±1800-1900), Jilid V (Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia-Belanda, ±1900-1942), dan Jilid VI (Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia, ±1942-1984). Dalam konvensi akademis di Indonesia, Jaman Prasejarah dan Jaman Kuna dimasukkan dalam disiplin arkeologi dan bukan sejarah. Oleh karena itu di sini hanya akan kita bicarakan Jilid III-Jilid VI.

Kalau dalam periodisasi *SN* tunduk pada konvensi, namun tidak demikian dalam penjelasan (*explanation*) tiap periodenya. Seperti sudah disebut di atas, buku itu menunjukkan keinginan untuk memadukan sejarah dan ilmu sosial, aspek diakronis dan sinkronis. Penjelasan mengenai struktur yang lebih menonjol daripada proses, nampak dalam Jilid III dan Jilid IV. Kemudian, Jilid V mulai mendeskripsikan perubahan-perubahan struktural, dan selanjutnya dalam Jilid VI, proses lebih menonjol daripada struktur. Kolonialisme telah mentransformasikan struktur sosial tradisional. Setelah kolonialisme merambah masyarakat bawah, yaitu setelah tahun ±1800, perubahan-perubahan struktural terjadi, seperti mobilitas sosial dan status sosial. Singkatnya, *structure* (Jilid III dan Jilid IV), *structural change* (Jilid V), dan *events* (Jilid VI). Supaya lebih jelas, mari kita cermati bab per bab dari setiap jilid.



- Jilid III: Bab I: "Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam"; Bab II: "Reaksi Kerajaan-Kerajaan Islam terhadap Penetrasi Barat"; Bab III: "Pelayaran dan Perdagangan"; Bab IV: "Perkembangan Agama dan Budaya Islam"; Bab V: "Pertumbuhan dan Perkembangan Kota"; dan Bab VI: "Struktur Birokrasi Kerajaan-Kerajaan Islam".
- Jilid IV: Bab I: "Sistem Negara"; Bab II: "Perang Melawan Kolonialisme"; Bab III: "Gerakan Sosial"; dan Bab IV: "Perkembangan Ekonomi".
- Jilid V: Bab I: "Politik Kolonial Belanda dan Transformasi Politik"; Bab II: "Struktur Sosial"; Bab III: "Pergerakan Nasional"; dan Bab IV: "Komunikasi Sosial dan Edukasi".
- Jilid VI: Bab I: "Jaman Jepang"; Bab II: "Perang Kemerdekaan"; Bab III: "Demokrasi Liberal"; Bab IV: "Demokrasi Terpimpin", dan Bab V: "Orde Baru".

Melalui buku ini kita melihat perbedaan Sejarah Indonesia jika dibandingkan dengan sejarah-sejarah lainnya, seperti Sejarah Eropa, Sejarah Amerika, dan Sejarah Rusia. Kiranya "kekhasan" itu juga dimiliki oleh kebanyakan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Sejarah Indonesia itu *disrupted history*, sejarah yang terkoyak-koyak oleh kolonialisme, sejarah yang evolusinya sebagian besar disebabkan oleh kekuatan luar. Sementara itu Sejarah Eropa dan yang lain itu tetap utuh, sehingga evolusinya ditentukan oleh perkembangan internal. Sebagai misal, dalam hal mobilitas sosial. Di Indonesia munculnya kelas "bangsawan pikiran" disebabkan oleh pendidikan Belanda, sedangkan di Eropa munculnya kelas menengah dikarenakan perkembangan sejarah Eropa sendiri. *SNI* Jilid



V mendeskripsikan dengan jelas bagaimana kolonialisme telah mengubah tatanan sosial yang tradisional, bahkan sampai masyarakat paling bawah, masyarakat petani.

Dari buku *SNI* di atas, perlu dicatat tiga hal, yaitu periodisasi konvensional, *view from within*, serta jadi satunya penjelasan sejarah prosedural dan struktural.

M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*. Buku ini dimaksudkan sebagai buku-ajar tentang sejarah Indonesia dari tahun $\pm$ 1300 sampai masa kini. Sekalipun tidak ditegaskan, periodisasi buku ini membagi sejarah Indonesia dengan Pra-Modern dan Modern, atau Hindu-Buddha dan Islam-Kolonial. Indonesia belum merupakan satu unit historis pada masa Pra-Modern, sedangkan pada masa Modern sejarah Indonesia sudah menjadi satu unit historis.

Oleh karenanya, dalam periodisasinya karya Ricklefs tersebut menggunakan ukuran *historical unity* yang berupa *coherency* (keterpaduan) dari unit sejarah. Sejak kedatangan Islam, Indonesia menjadi satu unit historis. Menurut buku ini ada tiga elemen dasar yang menjadikan Indonesia sebagai satu unit historis. Ketiganya ialah adanya kesamaan proses kultural dan agama (Islamisasi), kesamaan tema sejarah (hubungan Indonesia dengan Barat), dan kesamaan historiografi (sejarah Indonesia mempunyai sumber yang sama, bahasa-bahasa Indonesia modern).

Dengan pertimbangan kesatuan unit historis itu, buku ini memakai periodisasi yang kronologis. Sejarah Indonesia Modern dibagi ke dalam enam bab, yaitu: I. "The Emergence of Modern Era"; II. "Struggle for Hegemony c. 163-1800"; III. "The Creation of a Colonial State c. 1800-1910"; IV. "The Emergence of the Idea of Indo-



nesia c. 1900-42”; V. “The Destruction of the Colonial State”, dan VI. “Independence Indonesia”.

Perbedaan pendekatan buku ini dengan pendekatan *SNI* terletak dalam prioritas mengenai konstruksi masa lampau. *SNI* mementingkan *explanation*, sedangkan buku ini mementingkan *description*. Keduanya sebenarnya bersifat komplementer. Kita ingin menganjurkan supaya *SNI* dan buku ini menjadi satu paket dalam mata ajaran pengantar. *SNI* dengan aspek sinkronis dan buku *A History of Modern Indonesia* dengan aspek diakronis. Dengan cara demikian, maka lengkaplah konstruksi masa lampau kolektif kita.

Berbeda dengan periodisasi yang dibicarakan di atas, dalam sejarah Indonesia ada inovasi mengenai periodisasi, yaitu penggunaan konsep Braudel tentang waktu. Seperti sudah dikemukakan, ada dua buku yang menggunakan konsep waktu dari Braudel, yaitu buku Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia: Dari Emporium Sampai Imperium*, Jilid I, dan tiga jilid buku Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Pembahasan kedua buku itu, selain soal periodisasi *an sich*, akan menyangkut pula masalah-masalah historiografi lainnya yang melekat pada periodisasi tersebut.

Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia: Dari Emporium Sampai Imperium. Jilid I*. Meskipun tidak diterapkan secara eksplisit, periodisasi dalam buku ini mengikuti konsep Braudel tentang waktu dalam sejarah. Selanjutnya, dalam “Kata Pengantar” disebutkan, *pertama*, buku ini adalah “sejarah total” (atau “sejarah global”) sebuah ideal dalam penulisan sejarah yang diformulasikan oleh Braudel. *Kedua*, buku ini bertema integrasi nasional. *Ketiga*, buku ini bermaksud menggabungkan sejarah struktural dengan sejarah



prosesual, aspek sinkronis dan aspek diakronis. Mari kita lihat apakah buku ini telah memenuhi harapan penulisnya.

Buku ini pertama sekali mengemukakan jaringan yang membentuk kerangka, tempat “darah dan daging” sejarah melekat. Kerangka itu ialah konsep geopolitik, “Pelayaran dan Perdagangan Sebelum 1500”, (Bab I). Oleh karena itu, secara implisit periodisasi yang digunakan ialah konsep Braudel tentang waktu geografis, *structure*, atau *longue durée*. Selanjutnya dalam buku ini *conjuncture* dan *events* disebut sebagai struktur (sistem) dan proses. Bahkan, struktur disebut sebagai sejarah jangka panjang, sedangkan proses sebagai sejarah jangka pendek. Sementara itu, untuk ketiga waktu sejarah Braudelian itu, “Kata Pengantar” buku ini menggunakan istilah makro, mezo, dan mikro.

Bagaimana dengan sejarah total atau sejarah global dalam buku ini? Braudel mengatakan bahwa sejarah global tidaklah berarti ingin menulis sejarah dunia, tetapi sebagai suatu keinginan menulis suatu masalah sejarah jauh di luar batas-batas permasalahannya.³⁷ Contoh sejarah total ialah monografi Emmanuel Le Roy Ladurie, *The Peasant of Languedoc* (1974).³⁸ Buku itu sebenarnya mengemukakan fase-fase pertumbuhan agraris 1500-1700, “the great agrarian cycles”. Tetapi, kemudian ia bergerak lebih jauh dari sekedar sejarah kuantitatif, sejarah ekonomi, dan sejarah sosial. Dalam *Montaillou* (1980) dan *Carnival in Romans* (1981) dikemukakannya juga masalah politik, agama, dan mentalitas penduduk. Perkembangan selanjutnya dari sejarah total juga menggunakan antropologi, politik, dan sejarah naratif.

37 Peter Burke, *The French Historical Revolution: The Annales School 1929-1989* (Cambridge: Polity Press, 1990), hlm. 113.

38 Emmanuel Le Roy Ladurie, *The Peasant of Languedoc* (Urbana: University of Illinois Press, 1976).



Dalam hal ini, kiranya tidak adil untuk mengatakan bahwa buku ini tidak memenuhi janji, sebab menurut rencana buku ini akan terdiri dari tiga jilid. Argumen yang sama juga mengenai tema integrasi nasional. Proses menuju ke integrasi baru dimulai pada awal abad ke-20 dan berlanjut sampai sekarang.

Sekarang kita tinggal mempertimbangkan apakah keinginan untuk memadukan aspek prosesusal (diakronis) dengan aspek struktural (sinkronis) itu tercapai. Kiranya, buku itu telah mencapai tujuannya, bahkan ketika jilidnya belum lengkap. Adanya dialektika antara proses dan struktur nampak dalam Bab II sampai Bab VII. Secara bergantian kita menyaksikan struktur (sistem) dengan proses. Dengan kata lain, meskipun buku ini belum selesai, kita sudah dapat gambaran yang jelas tentang dialektika antara struktur dan proses.

Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya. Jilid 1, 2, 3*. Pembicaraan ini dipermudah karena ada “Kata Pengantar” oleh Sartono Kartodirdjo dalam buku Jilid 1. Demikian juga tiga tulisan dari Taufik Abdullah, “Lombard, Mazhab *Annales*, dan Sejarah Mentalitas Nusa Jawa”, Azyumardi Azra, “Historiografi Kontemporer Indonesia”, dan Adrian B. Lopian, “Nusantara Silang Budaya” dalam buku *Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard*.³⁹

Para penulis di atas mencatat tiga hal, yaitu, *pertama*, periodisasi Braudelien dari mazhab *Annales*; *kedua*, keinginan untuk menulis sejarah global; dan *ketiga*, buku itu dimaksudkan sebagai sejarah mentalitas.

³⁹ Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambari (eds.), *Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard* (Ecole française d'Extrême-Orient, 1999), hlm. 51-92.



Buku ini dimulai dengan Bab “Pengantar: Pertimbangan Geo-Historis”, suatu konsep sejarah dari tradisi Perancis, atau dari mazhab *Annales* sebagaimana dirumuskan oleh Fernand Braudel, sejarawan materialis non-Marxis. Dikatakan bahwa Nusantara terletak di persilangan jalan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, tepatnya antara Teluk Benggala dan Laut Cina.

Mengenai Jawa dan Madura dideskripsikannya secara lengkap geologi, geografi, demografi, dan ekonomi dari Barat sampai ke ujung Timur. Ia bercerita tentang gunung, lembah, pantai, hutan lebat, binatang buas, wayang, dan mitos-mitos. Deskripsinya bergerak dari catatan-catatan perjalanan abad ke-17 sampai hasil sastra kontemporer. Ketika mendeskripsikan kemiskinan di Blora, misalnya, tidak lupa disinggung bahwa orang bisa membaca buku Pramoedya Ananta Toer, *Cerita dari Blora*. Biasanya pembaca buku sejarah akan disugahi fakta-fakta “kering”, tetapi membaca buku ini bahkan ketika mestinya fakta-fakta itu kering, pembacanya terasa segar, menyenangkan, dan memikat. Itulah *panggung* tempat sejarah bermain, setting materiil tempat siklus dan peristiwa berlangsung.

Ada pendekatan yang unik dalam periodisasi, yaitu pembalikan urutan. Periodisasi yang biasa akan berjalan berurutan (Kuna, Tengah, Modern; Hindu-Buddha, Islam, Barat), tetapi dalam buku itu dimulai dengan waktu yang paling dekat. Jadi Pembaratan (Jilid 1), Islamisasi (Jilid 2), dan Indianisasi (Jilid 3). Pembalikan semacam itu seperti teknik *flash back* dalam film, penonton disugahi cerita saat ini, kemudian diajak menoleh ke belakang. Dari luar - buku yang luar biasa itu terbit di Perancis dan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Barat dan Timur - teknik *flash back* itu pasti efektif. Sebab memang demikianlah orang-orang non-Indonesia



melihat Jawa: sekarang, lalu dilihat masa lalunya. Tetapi, pasti tidak demikian bagi orang Indonesia sendiri. Ketiga tradisi itu (Barat, Islam, Hindu-Buddha) adalah *living traditions*. Jadi dibolak-balik sama saja keadaannya, karena itu pertanyaannya: “kenapa harus dibalik?”.

Sebagai sejarah total dan sekaligus sejarah mentalitas, buku ini sangat komprehensif, sistematikanya mengejutkan, tidak terduga. Sejarah total Lombard tidak ideografis, tidak juga sinkronis, bahkan tidak memakai sistematika yang lazim. Sejarahnya hanya setia kepada fakta dan interpretasi. Tidak membicarakan kronologi, tidak mendeskripsikan peristiwa, tidak menjelaskan sistem (struktur).

Mari kita lihat bagaimana historiografi buku ini melalui *sampling*, yaitu Jilid 1. (Batas-Batas Pembaratan). Sejarah yang lebih faktual kita temukan dalam Bab I: “Tanah-Tanah Kolonisasi” dan Bab II: “Golongan-Golongan yang Terpengaruh Barat”. Kita mengharapkan isi Bab I begini: perang-perang yang dilakukan VOC, kerajaan-kerajaan lokal jatuh, kebijakan Hindia-Belanda terhadap tanah jajahan, dan jatuhnya kekuasaan Belanda. Tetapi tidak. Bab ini memang dimulai dari datangnya VOC, diteruskan pemerintah Hindia-Belanda, tetapi kemudian melesat ke Jaman Jepang, Kemerdekaan, pemberontakan daerah, sampai Orde Baru. Demikian juga Bab II membicarakan pengaruh Barat sampai Orde Baru. Pendek kata, cara penulisan sejarah itu (“jejak panjang dan komprehensif”) hanya mungkin dilakukan oleh orang dengan otoritas tinggi.

Sejarah yang lebih interpretif dalam Jilid 1 ditunjukkan dalam Bab III: “Kerumitan Warisan Konseptual”; Bab IV: “Kebimbangan dalam Estetika”; dan Bab V: “Peralihan Budaya atau Penolakan?”. Mengenai pembaratan, penutup jilid ini di antaranya mengatakan bahwa politik “berdikari” yang berhasil mencegah pembaratan telah



jatuh dan para pengikut Lekra yang ingin kembali ke “sumber-sumber Timur” diburu dan ditahan. Rupanya, sejarah mentalitas Lombard lebih mengedepankan interpretasi daripada fakta. Misalnya, benarkah mentalitas Soekarno pada anti-Barat? Apakah Demokrasi Terpimpin itu khas “Timur”? Benarkah Lekra ingin kembali ke sumber Timur? Apakah realisme-sosialis itu “Timur”?

Dalam “Kata Pengantar” Sartono Kartodirdjo menyebut buku ini *social scientific*. Pada hemat kami, buku ini justru mengagumkan bila disebut *novelistic*, karena subjektivitas yang menonjol, menabrak konvensi akademis, dan imajinasi historis yang luar biasa pekatnya.

Selanjutnya ada periodisasi panjang dengan tema khusus, yang tidak bermaksud komprehensif. Periodisasi panjang diperlukan untuk menjelaskan tema dalam buku. Buku-buku itu adalah buku Majelis Umat Islam, *Sejarah Umat Islam* dan buku Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia. Buku I*. Kedua buku mempunyai tema yang hampir sama dan saling mendukung. Dalam “Kata Pengantar Buku”, MUI mengatakan bahwa buku *Sejarah Umat Islam* bertema integrasi umat ke dalam bangsa, sedangkan buku Parakitri T. Simbolon bertema integrasi bangsa. Dalam “Sekapur Sirih”, Jakob Oetama mengatakan bahwa buku ini dimaksudkan sebagai usaha ke arah *nation-building*. Sementara itu, “Pengantar” yang ditulis P. Swantoro mengatakan bahwa integrasi bangsa bukanlah ideologi, tapi proses sosial.

Kedua buku itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Keduanya adalah - memakai istilah Michel Foucault - sejarah tentang “*positive unconscious*”, struktur pikiran dalam yang muncul di permukaan. Perbedaannya, bagi umat struktur itu berdasar nilai, sedangkan bagi bangsa struktur itu berdasar sejarah.



MUI, *Sejarah Umat Islam*. Tidak ada yang istimewa dalam historiografi, semua deskripsi dan penjelasan berdasar *accepted history*, sehingga substansinya sudah diketahui umum. Berturut-turut adalah perdagangan dan pelayaran, penyebaran Islam, kerajaan-kerajaan Islam, agama dan budaya Islam, dan penetrasi kolonial. Kemudian kebijakan kolonial, kebangkitan nasional, Zaman Jepang, perang kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru. Keistimewaan buku itu terletak dalam “ideologi” buku yang dapat menjadi dokumen sejarah yang sangat berharga. Seperti diketahui, buku itu ditulis pada masa Orde Baru. Karena setiap generasi dapat menulis kembali sejarahnya sendiri, buku itu adalah pemahaman sejarah generasi itu.

Oleh karenanya, hal yang menarik ialah periode sejarah yang panjang itu mengantar pada filsafat sejarah yang ada di “Pengantar Buku”, “ketetapan baru” mengenai integrasi umat ke dalam bangsa pada Bab XI, dan “kebijakan-kebijakan strategis” yang ada di penutup, Bab XII.

Sejarah digambarkan oleh “Pengantar Buku” sebagai sunatullah, “berlakunya kehendak dan kekuasaan” Tuhan. Dan historiografi adalah catatan tentang sunatullah itu. Kemudian dapat dibaca dari bab XI bahwa sunatullah menetapkan bahwa umat Islam Indonesia harus berintegrasi ke dalam bangsa Indonesia, meskipun akan selalu terdapat ketegangan antara unsur historis dan non-historis, nilai dan kenyataan. Adapun “kebijakan-kebijakan strategis” terkandung pada Bab XII yang berisi *Amanat Sejarah Umat Islam*, yaitu penerimaan Pancasila oleh umat Islam (1945). Rupanya, dengan periode-periode sejarah yang panjang itu, buku ini hanya ingin mengatakan bahwa Pancasila adalah keharusan sejarah, sunatullah bagi umat Islam Indonesia.



Parakltri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia. Buku I.* Buku ini direncanakan terdiri dari tiga jilid, masing-masing: *akar-akar kebangsaan Indonesia* (Buku I), [“melacak peristiwa-peristiwa bersejarah” pada Buku II?], dan *mewujudnya negara Indonesia* (Buku III) sejak 1945 sampai sekarang.

Buku (meskipun belum lengkap) dengan periode panjang ini membuktikan bahwa ilmu sejarah itu terbuka, tidak perlu ditulis oleh sejarawan “berijazah”. Sejarah dapat ditulis oleh siapa saja, lebih-lebih oleh jurnalis dengan perhatian besar kepada sejarah. Sebagai “bukan sejarawan”, penulisnya mengikuti saja periodisasi dan substansi dari *accepted history*. Sejarah yang ditulis juga adalah sejarah diakronis yang menekankan proses.

Tema politik yang jelas itu, “integrasi bangsa”, di permukaan nampak memudahkan menyusun buku tebal ini. Namun, di bawah permukaan, penulisnya sangat serius dengan pekerjaannya. Penulisnya menunjukkan penguasaan proses sejarah yang luar biasa. Maka, bagi mereka yang ingin memperdalam salah satu topik, dapat melihat catatan yang lebih terinci - dan lebih panjang daripada teks substansi karena huruf cetakannya kecil.

Kita sudah membicarakan periodisasi sejarah yang panjang, baik dari buku-ajar, dari sejarah model *Annales*, maupun dari satu aspek sejarah. Bolehkah dibuat periodisasi bila waktunya pendek dan hanya tentang sejarah sub-aspek tertentu, seperti sejarah sastra, sejarah seni rupa, sejarah buruh, sejarah notariat, sejarah parpol, sejarah ormas, dan sebagainya?

Kuntowidjojo, *Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia: Mitos, Ideologi, dan Ilmu.* Dalam periodisasi pendek mengenai sub-aspek sejarah itu penulis ingin mengemukakan evolusi ke-



sadaran - sebut juga *positive unconscious* - ke dalam tiga periode berturut-turut, yaitu kesadaran mitis, kesadaran ideologis, dan kesadaran ilmiah. Periodisasi dimulai pada abad ke-19 sampai ± tahun 2000. Periode mitos terjadi ketika umat berpikir bahwa seorang pemimpin (Imam Mahdi, Ratu Adil) akan membebaskan mereka dari ketidakadilan. Periode ideologi terjadi ketika umat menganggap bahwa ideologi politik akan membawa mereka kepada kemenangan. Periode ilmu dicapai ketika umat percaya bahwa jalan ilmu (rasionalitas, objektivitas, inklusivitas) akan mengangkat mereka dari keterpurukan dan menjadikan Islam sebagai rahmat untuk seluruh manusia.

Jadi, kita dapat membuat periodisasi dengan waktu pendek. Misalnya mengenai korupsi dari satu rezim politik ke rezim yang lain sejak 1945 sampai 2003, “Korupsi di Indonesia: Orde Lama, Orde Baru, dan ‘Orde Reformasi’”. Oleh karena itu, jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan di atas ialah positif, artinya periodisasi pendek itu selalu bisa dibuat. Ingat, periodisasi ialah satu bentuk penjelasan sejarah.***



KAUSALITAS

LEOPOLD VON RANKE mengeluarkan diktum bahwa hendaklah sejarawan menulis *wie es eigentlich gewesen* (sebagaimana sebenarnya terjadi). Artinya, sejarawan harus tunduk kepada fakta, sejarawan harus punya integritas, dan sejarawan harus objektif (*impartial*, tak boleh memihak). Dia mengeluarkan diktum itu pada abad ke-19, tatkala pengaruh filsafat Positivisme sangat dominan. Maksudnya supaya sejarah sama objektifnya dengan ilmu-ilmu alam.

Akan tetapi, masalah imparsialitas itu menimbulkan persoalan bagi sejarawan. Menurut Marc Bloch dalam *The Historian's Craft* ada dua masalah, yaitu soal imparsialitas itu sendiri, dan sejarah sebagai reproduksi sejarah yang tak lepas dari analisis.⁴⁰ Bagi seja-

40 Marc Bloch, *The Historian's Craft* (New York: Vintage Books, 1953), hlm. 38 ff.



rawan, imparsialitas terbatas pada observasi dan penjelasan, dan selesailah tugasnya. Pertama, imparsialitas bagi sejarawan tidaklah sama seperti para hakim yang setelah melakukan observasi atas saksi-saksi dan analisis, masih tersedia lagi alat untuk menjadi imparsial, yaitu dia dapat melihat pada kitab undang-undang hukum untuk memutuskan. Kalau putusannya sesuai dengan kitab maka dia telah berlaku imparsial. Kedua, sementara bagi sejarawan tidak ada “kitab” yang membuatnya imparsial, dia berkewajiban membuat reproduksi (rekonstruksi) sejarah berdasar pemahamannya sendiri. Maka sejarawan memahami, sedangkan hakim mengadili. Jangan dianggap sebagai kekurangan kalau analisis (penjelasan) sejarah itu tidak sama satu dengan lainnya. Demikianlah, analisis kausalitas sejarah itu *multi-interpretable*. (Untuk kausalitas akan kita pergunakan kata “analisis”.)

Kita sedang membicarakan tentang kausalitas. Tetapi, apa sebenarnya perbedaan antara deskripsi melulu dan deskripsi + kausalitas? Kita akan memakai analogi dengan novel. E.M. Forster dalam *Aspect of the Novel* untuk membedakan antara *time-sequence* dan plot.⁴¹ Begini. Kalau sebuah novel menceritakan bahwa ratu meninggal kemudian raja meninggal, itulah yang disebut *time-sequence*. Tetapi, kalau novel itu menceritakan bahwa ratu meninggal kemudian raja meninggal karena duka, maka hal itu namanya plot dalam novel. *Time-sequence* adalah deskripsi dalam sejarah, sedangkan plot adalah deskripsi+kausalitas. Deskripsi + kausalitas sejarah itu terdiri dari *condition*, *sequence*, dan *consequence*.

Dalam kausalitas, sejarawan harus menganalisis dua hal, yaitu *kasus* (peristiwa) dan *perubahan*. Keduanya berbeda dalam akibat

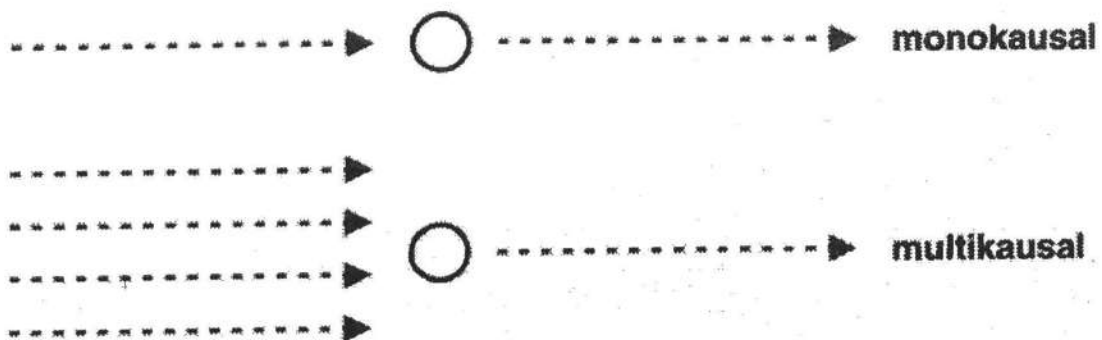
41 Lee Benson, “Causation and the American Civil War: Two Appraisals” dalam A. S. Eisenstadt, *The Craft of American History* (New York: Harper Torchbooks, 1966), hlm. 34-62.



(*consequence*) yang ditimbulkan: kasus bersifat prosedural tanpa perubahan, sedangkan dalam perubahan terjadi perubahan kualitas, yaitu perubahan struktural (*structural change*) dan perubahan sistem (*systemic change*).

STUDI KASUS

Dalam studi kasus kita menemukan adanya kasus tunggal yang sederhana dan ada kasus tunggal yang kompleks. Kasus tunggal disebut sederhana bila sejarawan menemukan bahwa penyebabnya hanya satu (*monokausal*), sedangkan kasus tunggal disebut kompleks kalau penyebabnya banyak (*multikausal*). Jika digambarkan, akan nampak seperti gambar di bawah ini.



ANALISIS MONOKAUSAL. Kita sudah belajar prinsip dari kausalitas, yaitu adanya *regularity* (keajekan). Detail prinsip itu di antaranya berbunyi demikian: “kekosongan otoritas mengakibatkan anarki”; “rezim politik yang menghadapi kesulitan selalu mencari kambing-hitam”; “untuk menggalang solidaritas, pemerintah



menunjuk musuh-musuh maya atau nyata”; “ketakadilan menimbulkan perlawanan”; dan “krisis politik mengundang militerisme”. Kausalitas adalah tema, jadi tidak perlu eksplisit.

Regularitas dengan tema “ketakadilan menimbulkan perlawanan” nampak dalam buku John Ingleson, *Road to Exile: the Indonesian Nationalist Movement 1927-1934*;⁴² tema “ketakadilan menimbulkan perlawanan” dan selanjutnya “kekosongan otoritas menimbulkan anarki” ditunjukkan dalam buku Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi*;⁴³ dan tema “krisis politik mengundang militerisme” ditunjukkan oleh buku ilmu politik dengan pendekatan sejarah dari Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*.⁴⁴

John Ingleson, *Road To Exile: The Indonesian Nationalist Movement 1927-1934*. Tema kausalitas buku ini ialah “ketakadilan menimbulkan perlawanan”. Kalau saja tidak didahului dengan “Student and Nationalism” (Chapter 1), kausalitas buku ini tidak akan eksplisit, dan kita akan mengira bahwa buku ini memilih jalur *narrative history*, sebab buku ini berhasil melacak tema hampir dari hari ke hari. Buku ini melacak gerakan nasionalisme di Indonesia sejak 1927 sampai pengasingan tokoh-tokoh nasionalis pada 1934. Di dalamnya kita temukan isu-isu yang hanya temporer, seperti masalah ko dan non-ko, moderat dan radikal, dan kemajuan sosial-ekonomi dan Indonesia merdeka. Isu yang paling ber-

42 John Ingleson, *Road to Exile: the Indonesian Nationalist Movement 1927-1934* (Singapore: Heineman Educational Books (Asia), Ltd., 1980).

43 Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1989).

44 Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982).



kelanjutan ialah perpecahan antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Kaum nasionalis Islam dan nasionalis sekuler pecah di antaranya karena kaum nasionalis Islam marah kepada Sutomo yang menyatakan bahwa dibuang ke Digul lebih utama daripada naik haji ke Mekah. Namun, perbedaan-perbedaan itu tidak menghalangi terbentuknya PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) pada 1927. Di dalamnya ada banyak perserikatan lokal dan fungsional.

Perbedaan selanjutnya ialah perbedaan di dalam gerakan nasionalis sekuler non-ko, yaitu antara lulusan sekolah di Hindia-Belanda (partai 'Indonesia') dan di Belanda (partai 'Eropa'). Mereka yang lulus dari sekolah di Hindia-Belanda bergabung dalam Partindo (Partai Indonesia) yang berdiri pada 1930, dan mereka yang dari Belanda bergabung dalam PNI-Baru (Partai Nasional Indonesia) yang berdiri pada 1932. Dasar perjuangan mereka juga berbeda, Partindo dengan kebangsaan (nasionalisme) dan PNI-Baru dengan kerakyatan (demokrasi). Namun, perbedaan itu sebenarnya hanya disebabkan oleh latar belakang pendidikan tokoh-tokohnya. Soekarno yang berpendidikan Indonesia bergabung ke Partindo, sedangkan Hatta dan Sjahrir yang berpendidikan Belanda bergabung ke PNI-Baru. Perbedaan antara Partindo dan PNI-Baru menjadi lebih sempurna ketika Hatta mengumumkan ideologinya pada 1932-33, yaitu "Marhaenisme, socio-nasionalisme, socio-demokrasi", seolah-olah khusus ditujukan langsung untuk melawan tesis Soekarno "Nasionalisme, Islam, Marxisme".

Ketika para tokoh diasingkan, usaha ke arah fusi antara Partindo dan PNI-Baru belum terjadi. Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan para tokoh lain diasingkan pada 1934. Soekarno ke Flores, sedangkan Hatta, Sjahrir, dan lain-lain ke Boven Digul. Partindo dan PNI-



Baru mati, meskipun tidak secara formal. Pada 1935 dibentuk Parindra (Partai Indonesia Raya) oleh PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) dan Boedi Oetomo, dan pada 1937 para pemimpin Partindo membidani terbentuknya Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia).

Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi Dalam Revolusi*. Buku yang kebanyakan menggunakan metode “sejarah lisan” dengan banyak sekali wawancara ini mendeskripsikan dan menjelaskan kausalitas terjadinya Peristiwa Tiga Daerah di Karesidenan Pekalongan, yaitu di Kabupaten Tegal, Brebes, dan Pemalang. Di ketiga tempat itu terdapat Revolusi Sosial pada masa transisi (Oktober-November 1945), yaitu setelah Pemerintahan Jepang berakhir, pada awal Revolusi, dan sebelum Pemerintahan Baru terbentuk.

Prakondisi (*necessary condition*) Revolusi Sosial itu ialah ketidakadilan, sedangkan penyebab langsung meletusnya (*causa belli*), dan kondisi yang mencukupi (*sufficient condition*) bagi Revolusi Sosial ialah secara praktis adanya kekosongan otoritas. Ketakadilan sebelum perang ialah beratnya beban pajak bagi rakyat, rendahnya upah buruh industri gula serta penanaman tebu yang mendesak tanaman pangan, dan dominasi ekonomi orang Cina dan Arab di kota-kota kabupaten. Pada masa pendudukan Jepang ada ketidakadilan yang berupa kewajiban setor beras, penjatahan beras, penjatahan bahan sandang, dan kerja paksa (*romusha*).

Revolusi Sosial dipimpin para *lenggaong* (bandit terhormat), priyayi desa, elit keagamaan, dan tokoh pergerakan. Rakyat (termasuk santri) bergerak. Korbannya ialah elit birokrasi segala tingkat: residen, bupati, wedana, camat, dan lurah. Dengan mengenakan ikat kepala dari *janur kuning*, rakyat *mendombreng* (arak-arakan dengan macam-macam tabuhan) ke rumah-rumah pangreh



praja, menyeret mereka keluar, mengarah mereka ke suatu tempat (misalnya dipaksa mandi di sungai) dan dicopot jabatannya untuk digantikan oleh rakyat. Keras atau tidaknya revolusi itu sangat tergantung dari pemimpinnya. Oleh karena itu, ada pembunuhan-pembunuhan terhadap pangreh-praja, atau sekedar mempermalukan mereka.

Revolusi Sosial itu baru berhenti ketika TKR datang, menegakkan otoritas, dan menangkap para pimpinan Revolusi. Pimpinannya dipenjarakan. Tetapi Revolusi Sosial itu masih mengundang pertanyaan: apakah bagian dari Revolusi Nasional itu menunjukkan kelangsungan tradisi protes petani, ataukah sekedar anarki? Kausalitas dalam sejarah itu *multiinterpretable*.

Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Buku yang berasal dari skripsi S-1 Ilmu Politik ini mengandung tema “krisis politik mengundang militerisme” hanya dalam Bab 5, “Krisis Nasional 1965-1966, dan Benih Dominasi Politik oleh Militer”. Deskripsi peristiwanya sudah banyak diketahui dan untuk sebagian orang masih segar dalam ingatan, sehingga tidak perlu dideskripsikan lagi. Ada kudeta berdarah G-30S, beberapa jenderal dibunuh, Soekarno menolak untuk menyalahkan dan membubarkan PKI, demonstrasi-demonstrasi mahasiswa menuntut Soekarno dan “antek-anteknya” mundur dari jabatannya. Krisis politik. “Surat Perintah Sebelas Maret” 1966 dari Presiden kepada Soeharto. Soeharto menjadi penyelamat RI, dan kemudian presiden. Ternyata Soeharto menjadikan militer mendominasi politik dan non-politik. “Krisis politik mengundang militerisme”.

Tetapi, karena sejarah itu mengandung banyak interpretasi, penjelasan ke arah krisis itu sendiri masih terbuka. Ada banyak per-



soalan. Misalnya, masalah intern Angkatan Darat, perubahan strategi politik PKI dari “aksi massa” ke “kudeta” padahal “ibu sedang hamil tua”, PKI memanfaatkan konfrontasi RI-Malaysia, konflik antara Komunisme dan Islam yang semakin menajam, dan mengapa buruh-tani tidak bergerak. Oleh karenanya banyak sejarawan yang mengangkat krisis 1965-1966 dengan analisis multikausal, di antaranya ialah buku Leslie Palmier, *Communists in Indonesia: Power Pursued in Vain*.⁴⁵ Buku Yahya A. Muhaimin ini telah menunjukkan bahwa regularitas “krisis politik mengundang militerisme” itu tidak terbantahkan.

ANALISIS MULTIKAUSAL. Sama dengan studi kasus tunggal sederhana, di sini juga hanya terdapat perkembangan prosesual. Perbedaannya terletak dalam analisis kausalitas. Dalam analisis multikausal, sejarawan melihat kasus itu dari beberapa segi, prosesual dan struktural, kausalitas yang kompleks.

Ada dua sejarah Indonesia yang bisa disebut: Sartono Kartodirdjo, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888. Its Condition, Course, and Sequences. A Case Study of Social Movements in Indonesia*⁴⁶ dan A. P. E. Korver, *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?*⁴⁷

Sartono Kartodirdjo, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888. Its Condition, Course, and Sequence. A Case Study of Social Movements in Indonesia*. Buku pertama di Indonesia dengan pendekatan multi-dimen-

45 Leslie Palmier, *Communists in Indonesia: Power Pursued in Vain* (Garden City, New York: Anchor Books, 1973).

46 Sartono Kartodirdjo, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888. Its Condition, Course, and Sequences. A Case Study of Social Movements in Indonesia* (s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966).

47 A.P.E. Korver, *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?* (Jakarta: PT Grafitipers, 1985).



sional ini menggunakan lebih dari separo buku untuk analisis kausal pemberontakan petani ketimbang pemberontakan petani itu sendiri. Permasalahan yang dikemukakan ialah pemberontakan petani pada 1888 di distrik Cilegon, Anyer, Banten selama hanya empat hari pada bulan Juli. Meskipun pemberontakan itu sangat kecil dan pendek keberlangsungannya, tetapi ternyata dilatarbelakangi oleh masalah-masalah besar, kompleks, dan berlangsung lama dalam masyarakat. Buku ini bermaksud melakukan analisis kausalitas sejarah yang multikausal dalam banyak aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Pada tanggal 9 Juli malam, tahun 1888, Cilegon diduduki oleh pemberontak. Kekerasan, pembunuhan, penyiksaan, penjarahan terjadi. Penguasa Belanda dan pejabat-pejabat pribumi bentukan Belanda jadi sasaran kemarahan massa. Dengan cepat, pada tanggal 13 Juli 1888 pemberontakan itu berhasil dipadamkan. Serdadu Belanda ditempatkan di Cilegon, pemimpin-pemimpin pemberontak dikejar, ditahan, dan diadili.

Dari segi sosial-politik ialah, penyebab pemberontakan adalah makin renggangnya jarak sosial antara petani, elit pedesaan, dan elit agama, dan pejabat-pejabat baru bentukan Belanda. Seperti diketahui, sejak 1808 Banten secara langsung berada di bawah kekuasaan Belanda. Birokrasi legal-rasional menggantikan birokrasi tradisional. Aristokrasi tradisional yang diasingkan dari kekuasaan itu bergabung dengan petani, elit pedesaan dan elit agama. Mereka membuat keresahan sosial secara endemis sepanjang abad ke-19.

Keinginan untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan aristokrasi tradisional nampak di antaranya dalam Peristiwa Sabidin, beberapa tahun menjelang pemberontakan 1888. Oleh kaum aristokrat tradisional Banten, Sabidin dipandang sangat tinggi: putra



Sultan Banten yang diasingkan, orang suci, dan kemudian menikah dengan anak seorang aristokrat. Sebaliknya, otoritas Belanda menganggapnya sebagai pangeran-palsu yang berhasil dalam perannya. Ketika rakyat berbondong-bondong menghadiri masjidnya setiap Jum'at, otoritas Belanda, yang khawatir bahwa ia akan memimpin pemberontakan, menangkapnya.

Dari segi sosial-ekonomi ialah, masuknya ekonomi uang dan tenaga kerja upahan ke tengah-tengah masyarakat Banten yang agraris. Dihapuskannya tanah-tanah kerajaan dan pelayanan tenaga kerja untuk pejabat-pejabat kerajaan menimbulkan ketidakpuasan. Konflik atas hak-hak tanah terjadi. Negara menghapuskan banyak klaim atas tanah pusaka, penarikan pajak tanah, dan sementara itu kerja paksa yang berupa kerja-desa dan kerja-pemerintah berjalan terus. Beban petani semakin berat.

Dari segi sosio-kultural, ada perkembangan baru. Bangkitnya kembali agama yang oleh otoritas kolonial dianggap sebagai kekuatan politik. Pada akhir abad ke-19 muncul persaudaraan-persaudaraan sufi, pesantren, dan kegairahan naik haji. Pemerintah kolonial mencurigai adanya konspirasi antara elit agama dan petani. Pemerintah khawatir bahwa para haji membawa arus militan dari ortodoksi agama dan terkontaminasi oleh cita-cita politik Pan-Islam.

Demikian, maka lengkaplah kausalitas sosial-politik, kausalitas sosial-ekonomi, dan kausalitas sosio-kultural. Pemberontakan petani di Banten 1888 adalah multikausal.

A. P. E. Korver, *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?* Kemunculan Sarekat Islam (SI) pada 1911 juga mempunyai banyak segi, sehingga partai itu mempunyai multikausal. Menurut Korver, multikausal itu meliputi ekonomi, sosial, agama, mentalitas, dan ideologi.



Dari segi ekonomi, Korver justru membantah bahwa ada persaingan bisnis antara orang Cina dan pribumi. Dominasi bisnis batik orang Cina memang berhasil mendepak keluar para pengusaha kecil di Lasem, Kudus, dan Banyumas. Di Surakarta, jumlah pengusaha batik Cina melampaui jumlah pengusaha pribumi, dan pengusaha Cina juga menjadi dominan dalam perdagangan bahan baku. Tetapi, para pengusaha pribumi selalu dapat menghindari dari dominasi Cina dengan cara membeli langsung dari para importir di Surabaya dan Semarang. Jadi, menurut Korver, yang terpenting bukan ekonomi, tetapi masalah sosial-politik. Masalah sosial-politik itu adalah benturan antara dua ras yang masing-masing sedang mengalami emansipasi. (Korver tidak menjelaskan lebih jauh tentang emansipasi sosial-politik di pihak orang Cina di Hindia-Belanda).

Dari segi emansipasi sosial, semangat yang melahirkan SI dapat dirunut jauh ke belakang, yaitu pada gerakan emansipasi 1905-1915. Pada dasarnya emansipasi sosial di kalangan SI ialah penolakan terhadap diskriminasi, penghargaan identitas sendiri, penentuan nasib sendiri, dan anti kapitalisme. Diskriminasi sosial oleh orang Belanda dapat dilihat dalam penghinaan-penghinaan, seperti pada serdadu Jawa di lingkungan, pergundikan terhadap wanita Jawa, perbedaan-bedaan gaji, dan hormat yang berlebihan kepada pejabat Belanda. Penolakan terhadap diskriminasi itu dapat dibaca di antaranya pada majalah *Doenia Bergerak* dan koran *Oetoesan Hindia*. Penolakan terhadap diskriminasi itulah yang menyebabkan emansipasi sosial.

Dari segi agama, Korver berbeda pendapat dengan Snouck Hurgronje yang menganggap bahwa SI bukanlah gerakan keagamaan. Agama di sana - menurut Snouck Hurgronje - hanyalah sebagai alat pengikat semata. Sebaliknya, Korver melihat bahwa SI adalah



gerakan reformis, karena menganggap Islam akan meninggikan derajat bangsa Indonesia. Tjokroaminoto, misalnya, menganggap bahwa Islam adalah dasar kemajuan. Korver tidak merinci lebih jauh SI sebagai gerakan reformis.

Korver melihat kemunculan SI didukung oleh harapan-harapan mileniaristis, datangnya Ratu Adil dan Imam Mahdi. Di Jawa ada anggapan bahwa seorang mesiah akan datang dari Keraton Surakarta. Harapan ini terutama ditujukan pada Pangeran Hangabehi yang menjadi pelindung SI. Tjokroaminoto juga dianggap sebagai Ratu Adil dan dielu-elukan orang di Jawa dan Madura. Sementara itu, tokoh SI yang lain, Goenawan dianggap sebagai “wakil Raja Turki” yang mengilhami pemberontakan di Sumatera Selatan.

STUDI PERUBAHAN

Dalam studi perubahan, sejarawan harus menentukan unit analisisnya: studi struktur (satu bagian) atau studi sistem (menyeluruh). Studi struktur itu ialah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam suatu masyarakat. Studi struktur ini tentu saja dapat diperkecil ke dalam studi unsur-unsur struktur, seperti kesehatan, perbankan, olahraga, pertokoan, periklanan, pertanian, dan pertekstilan. Studi struktur mirip dengan studi kasus, hanya saja *subject matter*-nya ialah perubahan struktural. Studi sistem membicarakan perubahan sistem secara menyeluruh (*systemic change, systemic evolution*). Studi sistem bisa saja mengenai unit sosial yang kecil, seperti suatu kota, suatu komunitas, atau suatu desa. Baik studi struktur mau-



pun studi sistem, keduanya tidak terbatas ruang lingkup dan rentang waktunya.

Dalam studi struktur maupun studi sistem, kausalitas (*agent of change*) dapat merupakan proses yang cepat atau proses yang lama dan berkelanjutan. Proses yang cepat terjadi misalnya pada revolusi-revolusi yang melahirkan negara-negara baru. Proses yang lama dan berkelanjutan, misalnya, terdapat dalam liberalisasi, demokratisasi, industrialisasi, dan diseminasi ide (misalnya, nasionalisme, sosialisme).

Sebelumnya mari kita bersepakat bahwa suatu sistem yang utuh terdiri dari struktur-struktur, dan suatu struktur terdiri atas unsur-unsur (institusi, lembaga). Istilah-istilah itu akan menjadi jelas dengan sendirinya sesuai konteksnya. Orang dapat berbicara kedua-duanya secara bergantian, misalnya, struktur politik atau sistem politik.

Diharapkan contoh-contoh studi perubahan di bawah ini dapat memperluas cakrawala sejarawan, memberikan pilihan-pilihan baru yang selama ini belum digarap, sekaligus memberikan pengesahan intelektual bahwa studi mengenai perubahan - apa pun unit sejarahnya - adalah milik sejarawan yang sah.

STRUKTUR. Kita akan mengambil contoh, satu buku studi mengenai Indonesia, dan dua buku studi non-Indonesia. Buku-buku itu ialah Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*,⁴⁸ Richard L. Bushman, *From Puritan to Yankee: Character and the Social Order in Connecticut, 1690-*

48 Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 1974).



1765,⁴⁹ dan buku Robert Stauffer, *The Development of an Interest Group: The Philippine Medical Association*.⁵⁰ Karena kedua buku terakhir tidak banyak dikenal akademisi Indonesia, nanti akan diberikan ringkasannya. Juga, akan dikemukakan sedikit refleksi tentang kegunaan kedua buku itu untuk penulisan sejarah Indonesia.

Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Buku ini ingin mencari sebab-musabab dari perubahan ekologis dan involusi agrikultural di Indonesia. Kausalitas keduanya ditemukan dalam dua macam kebijakan kolonial.

Menurut Geertz, pada mulanya ada dua tipe ekologi, yaitu ladang di luar-Jawa (disebutnya *Outer Indonesia*) dan sawah di Jawa (disebutnya *Inner Indonesia*). Ekologi itu berubah dengan datangnya Kolonialisme Belanda. VOC tidak mengubah ekologi, karena hanya berdagang. Tetapi, perubahan kebijakan terjadi ketika Belanda berhasil menguasai Indonesia secara teritorial. Sejak awal abad ke-19 Pemerintah Hindia-Belanda mengenalkan Sistem Tanam Paksa, dan sejak akhir abad ke-19 Sistem Tanam Paksa digantikan oleh Perusahaan Pertanian Swasta. Agen perubahan bagi perubahan ekologi dan involusi agrikultural ialah Sistem Tanam Paksa dan Perusahaan Pertanian Swasta. Kopi, gula, dan tembakau mulai ditanam.

Perubahan ekologi ditandai dengan berubahnya sistem pertanian pra-modern ke sistem pertanian modern dengan “investasi modal” berupa jaringan pengairan, benih, dan teknologi pertanian

49 Richard L. Bushman, *From Puritan to Yankee: Character and the Social Order in Connecticut, 1690-1765* (New York: W. W. Norton & Company, Inc., 1970).

50 Robert Stauffer, *The Development of an Interest Group: The Philippine Medical Association* (Quezon City: University of the Philippine Press, 1966).



lain. Pertanian pun bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja dalam setiap unitnya. Di daerah persawahan jumlah penduduk bertambah pesat tanpa penambahan areal tanah. Sawah lebih banyak terpengaruh oleh pertanian modern dibanding ladang. Di Jawa terjadi *agricultural involution*, di luar Jawa tidak. Akibatnya, distribusi penduduk tidak merata.

Richard L. Bushman, *From Puritan To Yankee: Character and Social Order in Connecticut, 1690-1765*. Buku yang terdiri dari lima bagian dan enam belas bab ini mencoba melacak perubahan struktural yang terjadi di koloni Connecticut. Kekuatan sejarah menyebabkan Connecticut berubah dari komunitas Puritan yang semula utuh pada abad ke-17 menjadi masyarakat Yankee secara radikal menjelang Revolusi. Masyarakat Puritan merujuk ke masyarakat yang homogen, jalinan yang terpadu, dan terkendali dengan ketat karena sanksi keagamaan, dan sekuler. Komunitas Yankee merujuk ke masyarakat yang kompleks, heterogen, plural, dan terbuka. Dengan menghilangkan detail yang sebenarnya penting diketahui, di bawah inilah ringkasannya.

Bagian Satu (*Society in 1680*) mengemukakan tentang masyarakat pada tahun 1690. Dalam bab itu dideskripsikan bahwa masyarakatnya sangat menghargai ketertiban di atas nilai-nilai yang lain. Sebagai orang Puritan mereka dianjurkan untuk bekerja keras dan menjadi makmur, tetapi dilarang mencintai kekayaan. Tanah masih berlimpah, sehingga orang dapat memuaskan ambisinya atas tanah dan kemakmuran.

Bagian Dua (*Land, 1680-1740*) mendeskripsikan kepemilikan tanah pada 1690-1740. Dikatakan bahwa tanah tidak lagi berlimpah, timbul perbedaan antara pemilik tanah luas dengan pemilik tanah



sempit. Jalan-jalan dan ladang penggembalaan bersama dapat diatur oleh petani-petani kaya. Sementara itu, kota-kota menjadi banyak dan penduduk bertambah. Masalah tanah menjadi permasalahan politik.

Bagian Tiga (*Money, 1710-1730*) menceritakan adanya para pedagang baru. Para pedagang ini berasal dari petani kecil yang mencoba memperbarui nasib dengan menjadi pedagang. Dan ternyata, berdagang lebih menguntungkan berkat dikenalkannya uang kertas. Mereka meminjam uang dari bank dan berdagang dengan banyak keuntungan. Uang yang mudah diperoleh mengundang orang menjadi pedagang.

Bagian Empat (*Churches, 1690-1765*) mendeskripsikan otoritas gereja, penyelewengan agama, dan kebangkitan mistisisme. Otoritas Gereja yang semula menjadi simbol keterpaduan masyarakat menurun, sementara otoritas Negara sekuler yang menjadi simbol baru keterpaduan masyarakat menjadi naik.

Bagian Lima (*Politics, 1740-1765*) berisi tentang munculnya *A New Social Order*. Diukur dengan masyarakat Puritan abad ke-17, otoritas gereja terus menyusut. Orang menuntut kebebasan, baik dari otoritas gereja maupun dari otoritas sipil. Pada tahun 1765, semangat Yankee menggantikan semangat Puritan. Kalau dalam semangat Puritan ketidakpatuhan bergerak ke dalam dan menjadi perasaan bersalah, maka semangat Yankee menjadikan ketidakpatuhan tetap terbuka dan menjadi konflik sosial. Yankee menginginkan kemerdekaan, individualitas, sedikitnya kekuasaan otoritas, dan peka dengan penindasan sekecil apa pun.

Apakah yang menjadi kausalitas perubahan itu? Kausalitasnya - demikian Oscar Hendlin dalam "Prakata" - ialah *the wish to be free*. Komunitas Puritan digantikan oleh komunitas Yankee. Manusia yang



lahir dalam tertib sosial yang tertutup telah melahirkan manusia yang menghargai personalitas individual.

Mitos rasional yang didukung oleh sejarah banyak terdapat dalam historiografi Amerika. Mitos-mitos (karakter nasional yang dimitoskan) itu di antaranya ialah kemerdekaan, *commonwealth*, etos kerja Puritan (kekayaan untuk memuliakan Tuhan), filantropisme, pluralisme, bangsa imigran, garis depan, dan religiusitas. Sejarahwan mempunyai fungsi sosial yang penting dalam melahirkan mitos kolektif, yang positif dan rasional.

Kiranya sejarahwan Indonesia juga mempunyai tugas untuk mencari mitos-mitos kolektif itu. Buku Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia*, yang bertema kesatuan Indonesia dan buku Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, adalah langkah pertama ke arah itu. Kegunaan buku-buku itu ialah untuk menepis separatisme. Ada mitos-mitos kolektif yang tidak rasional dan tidak ilmiah di masa lalu untuk mendorong nasionalisme, seperti mitos “6000 tahun Sang Merah Putih”, “Sumpah Palapa”, dan “Indonesia dijajah selama 350 tahun”, tetapi karena mitos-mitos itu hanya setengah rasional dan setengah ilmiah, sekarang mitos semacam itu menjadi tidak efektif.

Dengan menggali mitos-mitos kolektif yang rasional dan ilmiah, sejarahwan akan mempunyai fungsi sosial yang penting. Pembentukan *collective intelligence* dan *critical mass* akan merupakan sumbangan penting sejarahwan untuk bangsa ini. Jadi bangsa ini tidak akan sia-sia membuang dana dan tenaga untuk mendidik sejarahwan.

Robert Stauffer, *The Development of an Interest Group: The Philippine Medical Association*. PMA (*The Philippine Medical Association*) berasal dari suatu asosiasi profesi yang dirintis pada peralihan



abad ke-20 dan secara resmi berdiri pada tahun 1902. PMA yang semula hanya suatu asosiasi profesi semata dan non-politik, kemudian terjun ke politik dan menjadi suatu kelompok kepentingan. Kausalitas yang menyebabkan perubahan itu adalah modernisasi, *nation building*, sistem politik yang kompetitif, dan partisipasi massa dalam politik.

Melalui Departemen Kesehatan, PMA berpolitik. Kedudukan sebagai Menteri Kesehatan selalu dipegang oleh Presiden PMA. Akibatnya, posisi Presiden PMA adalah juga posisi politik. Bab-Bab II sampai IV dalam buku ini mendeskripsikan perkembangan ke dalam dari PMA sebagai organisasi profesi. Bab V (*PMA Politics*) menceritakan tentang politik internal dalam PMA sesudah Perang Dunia Kedua, bagaimana posisi Presiden PMA yang mempunyai kaitan dengan politik nasional itu diperebutkan. Sedangkan Bab-bab VI, VII dan VIII menceritakan politik eksternal dari PMA: hubungan PMA dengan para pejabat terpilih, dengan para administrator, dan dengan publik. Dengan kata lain, PMA menjadi kelompok kepentingan. Politik program-program PMA (Bab IX), seperti asuransi kesehatan, *The Mayuga Plan* (skema komprehensif untuk kesehatan), dan *The Duque Modification* (perbaikan atas *The Mayuga Plan*) menjadi ada karena dukungan politik.

Akan tetapi, sejak 1954 ada usaha untuk mengembalikan PMA sebagai asosiasi profesional dan melepaskan ambisi politiknya. Presiden Magsaysay mengatakan bahwa PMA harus meninggalkan *mercenary zeal* (semangat tentara bayaran) dan kembali ke *missionary zeal* (semangat pendakwah). Artinya, berhenti melihat ke atas dan kembali melihat ke bawah. Seruan itu tidak efektif, sebab PMA sudah terlalu mengakar, menjadi kelompok kepentingan.



Sejarah Indonesia dalam asosiasi profesi sangat berlainan dengan Philipina. Asosiasi profesi di Indonesia tidak pernah terkait dengan politik eksternal dan hampir-hampir tak ada perebutan politik internal. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) misalnya, tidak pernah keluar dari profesinya. IDI tidak memiliki rencana yang komprehensif tentang kesehatan. IDI tidak pernah menjadi suatu kelompok kepentingan dengan program-program yang komprehensif. IDI tetap non-politik, sebab Menteri Kesehatan selalu diambil dari jajaran struktural-birokrasi.

SISTEM. Di bawah ini akan dikemukakan tiga buku tentang perubahan sistem, masing-masing dengan pendekatan yang berbeda. Satu mengenai Indonesia, yaitu buku W. F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*.⁵¹ Dua buku lainnya ialah mengenai sejarah Amerika, Thomas C. Cochran, *Social Change in America: The Twentieth Century*,⁵² dan Sam Bass Warner, Jr., *The Private City: Philadelphia in Three Periods of Its Growth*.⁵³

W. F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. Dengan jelas dalam "Prakata Pengarang" dikatakan bahwa buku ini memakai pendekatan sosiologis. Katanya, "Sejarah kemanusiaan adalah interaksi yang terus-menerus antara pengulangan dan kebaruan. Pengulangan itu selalu memakai baju baru dan kebaruan selalu sesuai dengan skema pengulangan". Konsep

51 W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change* ('s-Gravenhage: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, 1959).

52 Thomas C. Cochran, *Social Change in America: The Twentieth Century* (New York: Harper & Row, Publishers, 1972).

53 Sam Bass Warner, Jr., *The Private City: Philadelphia in Three Periods of Its Growth* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1973).



sosiologinya secara persis tidak dijelaskan, tetapi dapat dilihat dari “Prakata Pengarang” bahwa Wertheim termasuk menganut Mazhab Modernisasi dalam menulis perubahan sosial di Indonesia yang menempatkan modernisasi sebagai kausalitas perubahan.

Karena kunci tipe-ideal Mazhab Modernisasi ialah “tradisi” dan “modernitas”,⁵⁴ maka buku yang terdiri dari dua belas bab ini dalam setiap babnya selalu dimulai dengan “tradisi” dan diakhiri dengan “modernitas”. Perubahan terdapat dalam bab-bab: I (petani tradisional ke masyarakat pedesaan secara umum); II (semangat gotong-royong ke timbulnya borjuasi dengan perilaku individual, perilaku individual ke perilaku kolektif [timbulnya asosiasi sukarela]); VI (“Politik Etis” digantikan oleh politik ekonomi liberal, masuknya ekonomi uang ke masyarakat); VII (kota tradisional mengalami pertumbuhan); VIII (konservatisme dan kaum Muslim yang progresif); IX (tenaga kerja paksaan ke tenaga kerja upahan); X (keragaman budaya menuju ke integrasi budaya); dan XI (munculnya nasionalisme). Bab-bab lain menceritakan proses sejarah. Sementara itu ada *appendiks* yang mencatat hasil pemilu yang demokratis pada 1955.

Thomas C. Cochran, *Social Change in America: The Twentieth Century*. Buku ini - meski tidak kronologis tetapi diatur secara sistematis (semua bab berbicara tentang abad ke-20) - dimulai dengan esai tentang pendekatan sistematis yang akan dipakai dalam studi mengenai perubahan sosial. Dikatakannya bahwa studi ini akan memakai *role theory* dari sosiologi. Jadi *agent of change*-nya ialah pribadi, karakter perorangan dan kognisinya terhadap

54 Christopher Lloyd, *Explanation in Social History* (New York: Basil Blackwell Ltd., 1986), hlm. 207.



lingkungan. Dalam sejarah Amerika respons pribadi itu ialah motivasi untuk sukses, optimisme, dan tekanan pada aktivisme. Fokusnya ialah perluasan basis material, misalnya, kesempatan ekonomi dengan orientasi tradisional yang berpusat pada nilai, seperti prestise sosial, tanggung jawab sebagai kepala keluarga (memberi pekerjaan kepada anggota keluarga), dan mengumpulkan kekayaan untuk membiayai gaya hidup yang diinginkan.

Cochran ingin mengatakan bahwa pada abad ke-20 Amerika sudah menjadi masyarakat industrial dan *human agent* adalah kausalitasnya. Untuk itu ia membagi bukunya menjadi sebelas bab. *Human agent* dalam Bab II (*The Inner Revolution*) melukiskan peran yang dimainkan pengembangan ilmu, intelektual, dan teknologi pada akhir abad ke-19 ketika universitas, lembaga pemerintah, dan lembaga swasta menghasilkan berbagai inovasi. Contoh yang penting ialah munculnya filsafat Pragmatisme yang sebenarnya sudah dianut oleh orang-orang yang aktif bergerak dalam masyarakat Amerika. Pragmatisme kemudian diterapkan juga dalam pendidikan. Orang Amerika kehilangan pembenaran moral gaya lama (agama) dan mencari pembenaran hidup melimpah dalam gagasan yang lebih rasional (filsafat dan ilmu). Demikianlah (Bab III, *The Search for Justification*) muncul aliran baru neo-Marxian ("liberation") dan neo-Freudian ("conscience") pada awal 1970-an untuk menggapai kembali cita-cita mengenai *role*. Bab-bab selanjutnya bercerita tentang demokrasi dan pendidikan (Bab IV), komünisasi (Bab V), dan adanya *Dual Revolution* (Bab VI) yang berupa perubahan ganda yang harus dipertemukan, di antaranya ialah: peran perorangan dan perubahan teknologi (peran inovator dalam dalam pabrik yang dibangunnya); perubahan fisik dan perubahan sosial (masalah pengaturan manajerial, misalnya, antara



jalan-jalan yang mulus dan disiplin penggunaanya); kemerdekaan psikologis perorangan dan kekuatan impersonal (timbul ketegangan syaraf); produksi massa dan konsumsi massa (supaya buruh sanggup membeli produk pabriknya); makin pentingnya kehidupan suburban dan merosotnya agrikulturalis; serta “budaya waktu luang” (pendidikan yang lebih baik, peningkatan rekreasi estetis) dan “represi waktu luang” oleh bisnis besar.

Selanjutnya, Bab VII (*Proprietary and Managerial Enterprise*) menceritakan tentang munculnya industri-industri besar dan posisi manajerial. Bab VIII (*Demographic Forces*) mengatakan bahwa penduduk meningkat tajam. Penambahan penduduk itu lebih banyak disebabkan oleh imigrasi ketimbang oleh kelahiran domestik. Urbanisasi terjadi berkat perluasan industri. Bab IX (*From Family to Institutional Security*) menceritakan munculnya macam-macam kebijakan negara yang berujung pada *social security*. Bab X (*Disruptive Change*) menceritakan bahwa Depresi Besar dan Perang Dunia Kedua mempunyai akibat ekonomis. Sesudah Depresi Besar muncul *The New Deal*, negara bertanggung jawab atas kelangsungan tenaga kerja. Dan sesudah Perang Dunia Kedua, muncul *welfare state*, negara bertanggung jawab sepenuhnya atas *full employment* penduduk. Dan terakhir, Bab XI (*Characteristics of Twentieth Century Change*) meringkas kembali perubahan-perubahan yang terjadi.

Sam Bass Warner, Jr., *The Private City: Philadelphia in Three Periods of Its Growth*. Berbeda dengan buku Cochran dengan pendekatan sosiologis dan deskripsi yang optimistis, maka buku ini memakai pendekatan historis dan deskripsi yang pesimistis. Pendekatan sosiologis Cochran bertumpu pada teori *role playing*, sedangkan



pendekatan sejarah Warner bersifat empiris. Berdasar tradisi Amerika, kata Warner, tujuan seorang warga negara ialah mencari kemakmuran secara pribadi (*the private search for wealth*), maka tujuan sebuah komunitas kota ialah menyediakan lahan untuk para pribadi pencari kemakmuran itu.

Kota-kota di Amerika mulai pada pertengahan abad ke-19 menjadi kota yang tergantung pada pasar yang tak terencana. Pasar memerlukan tenaga kerja, pembagian tanah untuk tempat tinggal, toko dan pabrik, serta macam-macam pelayanan publik. Kualitas kota-kota besar ditentukan oleh sukses dan gagalnya pasar.

Philadelphia didirikan oleh Wiliam Penn pada 1682 dengan maksud untuk menampung para pedagang dan tukang dari kongregasi Quaker. Kota itu adalah *private city* yang bertumpu pada pribadi dan pribadi yang mencari kemakmuran. Artinya, secara psikologis setiap pribadi mencari kebahagiaan dan kemakmuran; secara sosial kesetiaan pribadi ialah pada keluarganya dan komunitas kota harus merupakan kumpulan orang yang mencari uang; dan secara politis komunitas harus harmonis sehingga memberi kesempatan warganya untuk makmur.

Buku ini dibagi menjadi tiga bagian dengan sepuluh bab. Oleh Warner, dibagi menjadi tiga periode. Pertama, Philadelphia tahun 1770-1780 (Bagian Satu, *The Eighteenth Century Town*). Pada tahun 1720 penduduk Philadelphia adalah 10.000 orang. Ketika Revolusi meletus, Philadelphia sudah menjadi *private city* yang tenteram, dan Revolusi merubah suasana kota yang semula tenang itu menjadi tempat yang penuh ketegangan dan pergulatan. Kedua, Philadelphia tahun 1830-1860 (Bagian Dua, *The Big City*) tumbuh dari kota *provincial* menjadi kota besar, tradisi Amerika harus berkonfrontasi dengan kota yang sedang mengalami urba-



nisasi industrialisasi. Imigran dari Eropa datang, sehingga kota menjadi heterogen. Jumlah penduduk Philadelphia (dari seluruh *wards* dan distrik) adalah 565.529 orang. Timbul pembagian kerja yang lebih terinci dan kelas-kelas sosial: *haut bourgeois*, kelas menengah, dan buruh. Ketiga, Philadelphia tahun 1920-1930 (Bagian Tiga, *The Industrial Metropolis*) berhenti menjadi “kota Amerika”. Pada 1930 Philadelphia menjadi metropolis ketiga di Amerika dengan penduduk 2.847.000 jiwa. Pusat kota, kota pinggiran, bagian kota yang kumuh, segregasi penduduk, bangunan-bangunan, dan kegagalan politik dalam menata kota, semuanya menjadi warisan perkembangan kota. Pada 1930, Philadelphia, seperti kota-kota besar lain, hanyalah sebuah monumen dari tradisi *private city* di Amerika.

Kausalitas lenyapnya Philadelphia sebagai *private city* ialah perkembangan kota itu sendiri. ***



ANALISIS STRUKTURAL

KONSEP *structure* masuk dalam khasanah ilmu sejarah melalui tradisi pemikiran strukturalis (Marxisme dan Strukturalisme). Para pemikir strukturalis mempunyai tingkat kesamaan tertentu, yaitu bahwa struktur bersifat abstrak (hanya suatu konstruksi mental); ada hubungan antara struktur dan dunia nyata; dan orang harus menembus ke bawah untuk menemukan struktur.⁵⁵ Marxisme secara deterministik (determinisme ekonomi) berpendapat bahwa struktur mempunyai hubungan kausal dengan dunia nyata (materialisme historis). Struktur (basis, infrastruktur) menentukan superstruktur: kedudukan ekonomi menentukan cara berpikir, ideologi, mentalitas.

55 Bagi pencinta kebudayaan Jawa, kata “struktur” dapat disamakan dengan kata “sastra” sebagaimana dimaksud dalam buku *Serat Sastragending* (Yogyakarta: Perpustakaan Pakualaman, 1960). Dalam buku itu yang dimaksud dengan “serat” adalah “agama” dan “gending” adalah “kebudayaan”. Sastra hanya satu, sedangkan gendingnya bisa bermacam-macam. Ibarat yang lain ialah pertunjukan teater. Panggung adalah “struktur”, sedangkan pementasan di atasnya adalah “gejala sejarah”.



Kaum strukturalis non-Marxis menolak determinisme, tetapi menekankan independensi antara yang *conscious* (dunia nyata) dengan yang *unconscious* (struktur), dan hanya menandai adanya hubungan antara keduanya.

Struktur dipakai sejarawan dari Mazhab Annales di Perancis untuk menjelaskan perubahan sosial dan sejarah. Adapun Mazhab Annales dipengaruhi oleh konsep struktur dari Strukturalisme, tidak dari Marxisme. Dengan sengaja mereka membuat jarak dengan Marxisme.

Menurut Christopher Lloyd dalam *Explanation in Social History*, penjelasan sejarah dengan konsep struktur mempunyai tiga aliran.⁵⁶ Pertama, aliran budaya. Aliran ini melihat pada struktur budaya dengan meneliti produk-produk mental manusia dalam semua bentuknya. Penelitian-penelitian antropologi, sejarah pemikiran, sejarah mentalitas, psikologi, analisis sastra sering termasuk dalam aliran ini. Kedua, aliran geografi, ekonomi, dan sosial. Aliran ini melihat pada proses dan kontinuitas yang ada di bawah permukaan gejala-gejala sejarah. Ketiga, aliran yang memfokuskan diri pada epistemologi dan metodologi dalam hubungan antara strukturalisme dan cara penjelasan lainnya. Sebagai sejarawan, aliran pertama dan kedua yang menjadi perhatian kita.

Mengapa gagasan tentang struktur muncul? Menurut Lucien Febvre sejarawan tidak boleh memaksakan secara *a priori* teori ke dalam penelitian tentang masyarakat dan sejarah (hlm. 244), sementara sejarawan tidak boleh hanya berhenti pada fakta. Memang, sejarawan harus mencari dan menemukan fakta, tetapi tidak bersemboyan "fakta untuk fakta". Sejarawan harus memahami, me-

56 Christopher Lloyd, *Explanation in Social History* (New York: Basil Blackwell Inc., 1986), hlm. 240-241. Selanjutnya semua keterangan mengenai "struktur" diambil dari buku itu, kecuali ada penjelasan sumber lain. Nomor-nomor halaman dalam teks merujuk pada buku itu.



ngerti, dan menjelaskan fakta-fakta. Dan supaya sejarah tidak terjebak ke dalam teori di satu pihak dan narasi semata-mata di lain pihak, lahirlah konsep struktur. Struktur berguna untuk mengorganisasikan fakta-fakta. Kata Marc Bloch, “sejarah adalah salah satu cara mengorganisasikan masa lalu, supaya masa lalu tidak menjadi beban” (hlm. 245). Struktur membuat sejarah masa lalu secara analogis adalah juga sejarah masa kini.

Dalam tradisi strukturalis, struktur adalah model logico-matematis, abstrak, produk mental, dan berupa konstruksi sejarawan. Bahwa struktur itu konstruksi sejarawan dapat dicontohkan melalui “model” ekonomi begini: ekonomi informal nampak di permukaan sebagai produksi dengan skala kecil, ekonomi barter, dan tukar-menukar lokal; ekonomi pasar nampak di permukaan sebagai produksi dan perdagangan, toko kecil, bengkel, tukar-menukar inter-lokal, pasar, dan bank; ekonomi kapitalis nampak di permukaan sebagai perdagangan internasional, transaksi keuangan, dan monopoli besar (hlm. 248-249).

Bagi Mazhab Annales yang dipengaruhi Strukturalisme, struktur itu jangka-panjang, berkelanjutan, dan berskala luas. Struktur itu bersifat geografis, ekonomis, sosial, dan budaya yang terletak di bawah gejala permukaan - seperti institusi politik, perang, dan perilaku perorangan. Fernand Braudel dari Mazhab Annales adalah eksponen utama penganjur struktur setelah Febvre dan Bloch - para pendiri Mazhab Annales - surut. Menurut Braudel (lihat juga Bab I) waktu dalam sejarah dapat dibagi menjadi tiga tingkat kecepatan, yaitu *longue durée* (jangka panjang, struktur), konjunktur (*conjuncture*, *conjoncture* siklus), dan peristiwa (*l'histoire événementielle*). Dalam *Civilization and Capitalism*, Braudel menjelaskan perihal struktur:



Bagi sejarawan struktur bukan hanya sesuatu yang dibangun, tapi juga berarti permanensi, kadang-kadang berabad-abad.⁵⁷

Skema pemikiran Braudel sebagaimana dapat kita baca dalam buku F. R. Ankersmit, *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah* itu begini.⁵⁸

1. jangka panjang	1. geografi	1. struktur
2. jangka tengah	2. ekonomi	2. konjunktur
3. jangka pendek	3. politik	3. peristiwa

Di Perancis selain Fernand Braudel dengan struktur materiil dalam *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II*, ada Le Roy Ladurie dengan *The Peasants of Languedoc* (struktur sosial) dan *Montaillou* (struktur budaya), serta *Carnival in Romans* (struktur budaya).

Pada bagian di bawah ini akan disampaikan empat macam penjelasan struktur dalam historiografi Indonesia, masing-masing adalah struktur budaya, struktur sosial, struktur politik, dan struktur materiil. Struktur budaya kita ambil dari *symbolic realisme*,

57 Dikutip dari Lloyd, *Explanation ...*, hlm. 247.

58 F.R. Ankersmit, *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern tentang Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia, 1987), hlm. 282.



struktur-struktur sosial dan politik kita ambil dari *structurationism*, dan struktur materiil dari *ecological materialism*.⁵⁹

STRUKTUR BUDAYA. Konsep struktur budaya atau realisme simbolis ialah bahwa struktur simbolis, yaitu “sistem pemikiran, sikap sebagaimana nampak dalam kata-kata, benda-benda, dan perilaku konvensional”. Semua tindakan sosial harus dimengerti berdasar struktur simbolis itu.⁶⁰

Struktur budaya diwakili oleh buku-buku Clifford Geertz, *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*⁶¹ dan *Negara Teater: Kerajaan-kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas*,⁶² buku Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*,⁶³ buku Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*⁶⁴ dan buku Brian May, *The Indonesian Tragedy*.⁶⁵

Clifford Geertz, *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*. Dalam buku terjemahan Indonesia itu ada pengantar dari Amri Marzali yang memudahkan kita untuk memahami metodologi Geertz, terutama tentang struktur budaya (Geertz menyebutnya “Paradigma Budaya”). Kata Marzali, “Perhatian utamanya ialah pada kategori kultural. Ia ingin melihat bagaimana kriteria-kriteria kultural

59 Mengenai *symbolic realism* lihat buku Lloyd, *Explanation in Social History*, hlm. 263-278; *structurationism* hlm. 306-312; dan *ecological materialism* hlm. 285.

60 *Ibid.*, hlm. 275.

61 Clifford Geertz, *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa* (Jakarta: Grafitipers, 1986).

62 Clifford Geertz, *Negara Teater: Kerajaan-kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000).

63 Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987).

64 Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).

65 Brian May, *The Indonesian Tragedy* (Singapore: Graham Brash [PTE] Ltd., 1978).



(makna, simbol, nilai, pandangan dunia, etos, dan sebagainya) bekerja mengorganisasikan kehidupan umum di Mojokuto, sehingga terbentuk pengelompokan kultural yang disebutnya paradigma kultural.”

Buku yang terdiri enam bab ini dimulai dengan perubahan-perubahan sosial yang disebabkan oleh datangnya ekonomi modern (industri gula yang padat modal) yang dikuasai Belanda dengan ekonomi subsistensi orang Jawa (Bab I, “Masyarakat yang Terempas”). Sesudah Revolusi, timbul kekecewaan karena janji dan harapan kemerdekaan tidak terwujud. Timbul kelompok-kelompok budaya yang saling bertentangan: agama dan sekuler, modern dan terbelakang, pemimpin dan rakyat, kota dan desa, berbakti dan tak peduli, Islam dan Jawa.

Bab II (“Latar Belakang”) memberi uraian tentang lokasi, lingkungan sosial, dan ekologi pedesaan dan perkotaan Mojokuto. Pada Bab III (“Perkembangan Pedesaan”) ada uraian tentang pertemuan antara ekonomi komersial (tebu, kopi, sagu, singkong, teh) dengan ekonomi tradisional (tingginya pertumbuhan penduduk, tidak adanya “jiwa kapitalis”, intensifikasi pertanian). Dualisme itu menyebabkan perkembangan yang statis atau terhenti.

Bab IV (“Perkembangan Kota”) mengutarakan pembagian ekologis kota (bangunan, sawah basah, tanah kering, hutan). Sedangkan pada Bab V (“Sesudah Revolusi: Mojokuto 1953-1954”), yang paling menarik ialah uraian tentang kelompok-kelompok sosial-budaya: priyayi baru, intelektual Islam pembaharu, priyayi lama, intelektual Islam konservatif, abangan kampung, santri kampung, pimpinan desa abangan, pimpinan desa santri, orang desa abangan, dan orang desa santri. Kelompok-kelompok itu kemudian terbelah ke dalam: Jawa (priyayi, abangan) dan Islam (santri),



yang politis dan tidak politis, elit dan massa, orang kota dan orang desa, modern dan tradisional.

Bab VI (“Penutup: Membuktikan Paradigma”) membuktikan berlakunya “paradigma kultural” melalui pemilihan kepala desa di desa Summersari. Kategori-kategori sosial-budaya yang dibuat Geertz (Bab V) mengerucut dalam kategori budaya, yaitu “gagasan”, “usaha mencari makna”, dan “meluruskan segala sesuatu”. Dalam pandangan Geertz, kategori budaya atau paradigma budaya - yang dalam bab ini kita sebut “struktur budaya” - itulah yang menentukan tindakan sosial warga Summersari.

Clifford Geertz, *Negara Teater: Kerajaan-Kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas*. Buku yang terdiri dari empat bab ini mengumpamakan perpolitikan di Bali abad ke-19 sebagai panggung sandiwara. Ada teks (Bab I, “Definisi Politis: Sumber-Sumber Tatanan”), ada pemeran (Bab II, “Anatomi Politis: Organisasi Internal Kelas Berkuasa”; Bab III, “Anatomi Politis: Desa dan Negara”), dan ada *acting* (Bab IV, “Pernyataan Politis: Pertunjukan dan Upacara”). Pemahaman terhadap buku ini dipermudah karena ada pengantar dan simpulan, terutama tentang “interpretive anthropology”, metode historis yang dipakai, dan implikasi politis dari temuan-temuan.

Buku ini ingin mencari sistem yang selalu berulang di balik peristiwa sejarah dan perubahan, seperti organisasi negara, timbul-tenggelamnya dinasti, perang, pemberontakan, pertunjukan, dan upacara. Geertz tidak mendeskripsikan proses sejarah secara kronologis, tapi struktur intrinsik yang ada pada kerajaan-kerajaan di Bali.

Temuan Geertz ialah adanya “struktur budaya” yang tak berubah, yaitu “kultus raja-dewata”. Di sini raja menempati posisi



tertinggi. Fungsi pendeta ialah menggelarkan mantra-mantra, mengungkapkan misteri-misteri untuk kepentingan kultus raja-dewata.

Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Buku ini “istimewa” karena bukan berupa monografi tunggal tapi sebuah kumpulan karangan. Buku ini juga “istimewa” karena menuntut pengetahuan tentang proses sejarah dari pembacanya, supaya gaya penulisan yang meledak-ledak dan meloncat-loncat itu terasa wajar dan maksud penulis dapat dibaca dengan jelas.

Buku ini terdiri dari sembilan bab dengan topik yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri. Namun, buku yang sangat sulit dicerna itu disatukan dalam tema yang sama, yaitu keinginan melihat “(se)bagaimana Islam mewujudkan dirinya dalam konteks sosial” (“Pengantar”). Dari sembilan bab yang ada, Bab I (“Islam dan Negara dalam Lintasan Sejarah”) menjelaskan secara eksplisit maksud analisis Taufik, sedangkan bab-bab yang lain hanya merupakan ilustrasi detail dari Bab I dan gagasan lain yang tak relevan dengan pembicaraan kita tentang struktur.

Bagi Taufik, agama adalah “makna” sebagai “landasan dasar” melihat dan mengerti realitas. Demikianlah maka Bab I menceritakan lima episode gerakan Islam (*Islamicate*, kata Taufik mengutip Hodgson) dalam sejarah Indonesia, Islam sebagai ajaran dan Islam sebagai *polity*. Kelimanya ialah abad ke-19, awal abad ke-20, 1920an-1930an “dasawarsa ideologi”, masa Orde Lama, dan masa Orde Baru.

1. Abad ke-19, ada Perang Diponegoro, Perang Paderi, dan Perang Aceh. Ketiganya menunjukkan gejala yang berlainan. Perang Diponegoro adalah gejala sinkretis, Perang Paderi gejala reformis, dan Perang Aceh gejala tradisional. Bagi



Taufik, adanya “satu panji beragam arti” (sinkretis, reformis, tradisional) rupanya menjadi pola umum manifestasi Islam dalam sejarah politik Indonesia. Ketiga peristiwa sejarah memang berlainan, namun kata Taufik, semuanya adalah satu (kesadaran Islam) meskipun ada perbedaan “struktur intern”-nya. Ketiganya juga bersifat lokal dan etnis, dan “struktur intern” itu dapat berubah-ubah, sesuai tempat, waktu, dan sejarah. (Atribut “sinkretis”, “reformis”, dan “tradisional” [ditandai dengan tanda kurung] bagi “struktur intern” tersebut adalah interpretasi kita atas teks - menguntungkan atau merugikan - tidak dari Taufik sendiri).

2. Awal abad ke-20, “struktur intern” itu bertambah dengan sifat kota dan nasional. Pada awal-awal abad ke-20 timbul gerakan kota Boedi Oetomo (“sinkretis”) dan gerakan nasional SI (“tradisional”). Dalam masa inilah muncul “struktur intern” yang oleh Taufik disebut Islam politik dan Islam akidah, yang dalam pandangan nilai Islam keduanya adalah *amar ma'ruf, nahi munkar*.
3. “Dasawarsa Ideologi” (1920-an - 1930-an), muncul gerakan-gerakan politik-nasional, yaitu PNI (“sinkretis”), Permi (“reformis”), dan PSII (“tradisional”). Selain itu “struktur intern” juga terbagi dalam gerakan kultural (Muhammadiyah, NU, Persis) dan partai-partai politik yang menekankan dengan ideologi-ideologi (gerakan struktural).
4. Masa Orde Lama, ada gerakan nasional-ideologis PNI + PSI (“sinkretis”), Masjumi (“reformis”), NU (“tradisional + kultural”).
5. Masa Orde Baru, ada gerakan nasional-ideologis, yaitu Golkar (“sinkretis”) dan partai-partai Islam (“tradisional”).



Dengan bervariasi (lokal, etnis, kota, nasional, ideologis, kultural) “struktur intern” (sinkretis, reformis, tradisional) itu selalu mewujudkan diri dalam sejarah. Di bagian bawah terdapat landasan “struktur intern” yang oleh Taufik disebut dengan “Struktur Keniscayaan” (*plausible structure*). “Struktur Keniscayaan” ini dapat terjadi karena tiga alasan: teologis, historis, dan sosiologis. *Pertama*, nilai Islam tentang kesatuan negara dan masyarakat, semuanya diyakini sebagai wujud politik. *Kedua*, umat merupakan dasar integrasi nasional, dan *ketiga*, umat adalah mayoritas bangsa ini. “Struktur Keniscayaan” itulah yang kita sebut dengan *struktur budaya*. Dan azas tunggal Pancasila adalah usaha memperteguh “struktur keniscayaan” itu, karena semua “struktur intern” terwakili di dalamnya.

Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*. Ulasan kita mengenai buku yang penuh detil ini singkat saja. Alasan utama mengelompokkan Perang Aceh ke dalam struktur budaya ialah karena adanya ideologi keagamaan. Pasukan-pasukan Aceh selalu mengumandangkan kalimat *lā ilāha ilāllāh*; adanya literatur keagamaan *Hikayat Perang Sabil*; dan dibaginya wilayah menjadi dua, yaitu *darul Islam* (tempat tinggal orang Islam) dan *darul harb* (wilayah perang), sementara tujuan perang ialah mengusir orang *kaphe* (kafir). Perang ini adalah *jihad fi sabilillah*. Semuanya menunjukkan bahwa Perang Aceh termasuk dalam perang agama bagi orang Aceh.

Meskipun ada banyak periodisasi, sebenarnya Perang Aceh tidak dapat dibagi-bagi ke dalam periode-periode. Perang Aceh dapat dibagi ke dalam beberapa fase. Periode pertama (1873-1875) disebut “Masa Bertahan”. Periode kedua, “Perang Rakyat” (1876-1896)



dipimpin oleh para *uleebalang* dan ulama. Perang inilah yang paling panjang dan paling berdarah. Terjadilah benar-benar “Perang di Jalan Allah” dengan ideologi perang sabil. Perang pun menjadi sakral, dan tidak sekedar menyabung nyawa. “Rakjat ingin mati syahid melawan orang ‘kaphe’” - demikian menurut Taufik Abdullah yang memberi “Pengantar” buku ini. Periode ketiga (1896-1903) diakhiri dengan menyerahnya Tuanku Muhammad Daud Syah pada 1903. Kemudian periode keempat ialah perlawanan di Aceh Besar (1903-1912), di Pidie (1902-1913), di Aceh Tengah dan Tenggara (1903-1912), dan di Aceh Barat (1903-1912).

Dalam teori ilmu sosial, kesiapan orang Aceh dalam menghadapi Perang Aceh disebabkan oleh adanya *structural conductiveness* dan *structural strain*.⁶⁶ Orang-orang Aceh yang sangat taat beragama merasa terancam oleh kehadiran orang-orang *kaphe* di perairan Singapura. Ternyata kemudian pada 1873, Belanda memaklumkan perang.

Brian May, *The Indonesian Tragedy*. Buku karya seorang jurnalis ini unit sejarahnya meliputi seluruh Indonesia. Materinya terbagi ke dalam tiga bagian dan tiga belas bab. Bab I (“The End of the Old Order”) dan Bab II (“The New Order”) sebagian diambil dari *accepted history*, sebagian dari berita-berita surat kabar (peran USA), dan sebagian dari *rumours* (keris, *pelet*, pedukunan). Baru dalam Bagian Tiga (“The Shaky Bastion”) dapat kita baca dengan jelas penjelasan sejarah yang dimaksudkannya.

Dalam Bagian Tiga ada tiga bab (“The Cultural Barrier”, “The Spirit World”, dan “The Missing Entrepreneur” [Bab XI]; “The Deve-

⁶⁶ Lihat Niel J. Smelser, *Theory of Collective Behavior* (New York: the Free Press, 1962), Bab. III.



lopment Myth", "The Western Solution", "Static Expansion", "The Rice Débacle", dan "The Pre-Capitalist Mentality" [Bab XII]; dan Bab XIII, "The Price of Harmony") yang menjadikan buku ini memaknai penjelasan struktur budaya.

Dikatakannya tentang konflik antara abangan dan ortodoksi, dan adanya perdukunan dan kepercayaan irasional, dan juga tesis Boeke bahwa "budaya Timur" tidak mendukung kewirausahaan. Secara eksplisit dikatakannya bahwa tidak ada "semangat ekonomi" di Indonesia, sehingga pemecahan model Barat tidak cocok, dan usaha-usaha ekonomi jatuh pada *cukong*. Kalau tidak ada perubahan radikal pada "budaya Timur" ini, Indonesia masih akan tetap mengalami tragedi.

STRUKTUR SOSIAL. Di sini kita akan memaknai strukturasionisme. Strukturasionisme berpendapat bahwa struktur merujuk ke sejumlah aturan dalam sistem sosial yang dilembagakan. Struktur adalah sekaligus sarana dan hasil dari praktik-praktik terorganisasikan yang berulang secara terus-menerus (hlm. 309). Untuk strukturasionisme ini akan kita lengkapi dengan *ideal type* Weberian, patrimonialisme.

Struktur sosial terdapat dalam disertasi-disertasi dari Darsiti Soeratman, "Kehidupan Dunia Kraton Surakarta, 1830-1939",⁶⁷ Nina Hertina, "Kehidupan Kaum Menak Priangan, 1800-1942",⁶⁸ dan buku Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital*.⁶⁹

67 Darsiti Soeratman, "Kehidupan Dunia Kraton Surakarta, 1830-1939" (Disertasi UGM, 1989).

68 Nina Hertina, "Kehidupan Kaum Menak Priangan, 1800-1942" (Disertasi UGM, 1997).

69 Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital* (Canberra: ASAA, 1986).



Darsiti Soeratman, *"Kehidupan Dunia Kraton Surakarta, 1830-1939"*. Disertasi yang ditulis berdasarkan sejarah kebudayaan sebagaimana buku-buku Nobert Elias dan Johan Huizinga ini memakai struktur sosial sebagai penjelasan sejarah, yaitu otoritas tradisional yang secara spesifik disebut patrimonialisme. Patrimonialisme bertumpu pada kekuasaan personal, dengan perangkat militer dan penguasaan tanah sepenuhnya berada di tangan penguasa.⁷⁰ Demikianlah raja-raja Surakarta menggunakan patrimonialisme, meskipun kekuasaannya semakin menyusut karena perjanjian-perjanjian dan reformasi atas tanah yang dipaksakan oleh Belanda.

Stratifikasi, upacara, dan tatakrama, semuanya berpuncak pada raja sebagai penguasa. Bagi raja ada gelar-gelar yang meluhur dan memberi wewenang raja. Dalam stratifikasi dari raja, berturut-turut ada *sentana* (bangsawan) dan *abdi dalem* (priyayi). Bangsawan dan priyayi dibagi secara bertingkat-tingkat, termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya hak atas warna payung dan kewajiban *seba* (menghadap raja). Pada saat upacara misalnya, raja bertahta di atas *dampar* (singgasana), siapa duduk di atas kursi, di atas tikar tempat duduk, siapa duduk di lantai, dan urutan depan-belakang. Tatakrama mengatur masing-masing (raja, bangsawan, priyayi) banyaknya sembah (menyembah, disembah), bahasa *kedaton* (bahasa khusus di lingkungan keraton), dan aturan memakai pakaian (*kuluk* [topi], baju, kain). Selain itu ada larangan macam-macam bagi *kawula* (rakyat).

Nina Herlina, *"Kehidupan Kaum Menak Priangan, 1800-1942"*. Disertasi ini menyebut struktur politik Priangan - sesuai tipologi Max Weber

70 Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*. (New York: The Free Press, 1964), halm. 347, 349. Diedit dan diberi Pengantar oleh Talcott Parsons.



- "*mendekati birokrasi patrimonial*". Pemerintah Hindia-Belanda yang umumnya memakai otoritas legal-rasional di negeri jajahan, tetapi khusus di Priangan Belanda berkuasa dengan sistem *patrimonialism*. Dengan demikian, disebutkan dalam disertasi bahwa ada dualisme yang berkenaan dengan kedudukan *upati*. Seperti diketahui, dalam sistem legal-rasional, bupati adalah staf administratif (gaji, tunjangan, persenan kopi), sedangkan dalam sistem patrimonial bupati adalah *retainer* (kelas negara). Meskipun disertasi ini melihat bupati lebih sebagai staf administratif dalam birokrasi legal-rasional, tetapi jika kita menganggap kaum Menak Priangan adalah *retainer* dalam patrimonialisme, segala keistimewaan mereka di bawah ini akan lebih dapat dipahami.⁷¹

Keistimewaan itu ialah rekrutmen yang selalu dari elit tradisional (kaum Menak), pewarisan jabatan yang turun-temurun, dan sistem simbol yang dimiliki para menak. Sistem simbol itu berupa gaya hidup yang tersendiri, yaitu gelar dan nama, tempat tinggal, tatakrama, bahasa, pusaka, upacara-upacara, pendidikan, perkawinan (+konkubinasi), kesenian, rekreasi, makanan, dan keagamaan serta kepercayaan.

Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital*. Buku yang menganalisis perkembangan sosial, politik, dan ekonomi selama Orde Baru ini dimulai dengan pertimbangan bahwa bukannya komunisme yang merupakan kekuatan revolusioner di Dunia Ketiga, tetapi kapitalisme. Untuk Indonesia, kapitalisme sudah berjalan sejak masa kolonial bersamaan dengan transisi dari patrimonialisme ke pemerintahan legal-rasional. Pemerintahan pasca-kolonial gagal dalam

71 Weber, *ibid.*, hlm. 351-358.



menumbuhkan kapitalisme swasta domestik (1949-1957) dan menggantinya dengan usaha-usaha negara (1958-1965) (Bagian I, "The Historical Context and Capitalism to 1965").

Apa bentuk pemerintahan selanjutnya selama Orde Baru dari Indonesia untuk mendorong tumbuhnya kapitalisme domestik? Robison mencoba menganalisis struktur sosial Orde Baru yang menjadi landasan dari tumbuhnya kapitalisme, yaitu *bureaucratic polity* atau *technocratic state*, yang dengan menggunakan konsep Max Weber akan disebut *neo-patrimonialisme*.

Dalam Bagian II ("Capital and State Policy under the New Order") dikemukakan kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah pada 1965-1975 dan 1974/75-1981/82 yang berusaha mengaitkan kapitalisme domestik dengan kapitalisme internasional. Baru dalam Bagian IV ("The Nature of Domestic Capital") oleh Robinson diperlihatkan bentuk-bentuk usaha yang dimunculkan oleh kebijakan ekonomi Orde Baru, yaitu usaha-usaha negara (Bulog, Pertamina), bisnis-militer (Inkopad, Inkopal, Inkopau, Inkopak), dan bisnis orang Cina (angka berbeda-beda; 7,5%, 27%, atau 65,5% dari Penanaman Modal Dalam Negeri [PMDN]). Sejumlah usaha borjuasi nasional juga muncul, seperti grup-grup bisnis Soedarmo dan Hamengkubuwono, grup-grup bisnis politiko-birokrat (seperti grup Cendana), dan grup-grup bisnis para klien swasta (seperti Sukamdani).

STRUKTUR MATERIIL. Kita akan menggunakan materialisme ekologis. Materialisme ekologis (materialisme historis) "meletakkan basis kekuatan perkembangan sosial pada dataran materiil dari masyarakat" (hlm. 285). Ada ekologi konseptual (pedesaan, perkotaan, kota besar, metropolis), ada ekologi aktual (gunung, laut, tegal, sawah, ladang). Ekologi yang kita maksud di bawah adalah



aktual dan konkret, sama konkretnya seperti tulang bagi anjing (*dog's faith*: anjing tidak akan menggigit tulang “konseptual” yang abstrak, tapi tulang “aktual” yang konkret). Struktur materiil ini diwakili buku Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura, 1850-1940*.⁷²

Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris: Madura, 1850-1940*. Buku ini terdiri dari tujuh bab (termasuk pendahuluan dan simpulan). Dikatakannya dalam Bab I (“Pendahuluan”), buku ini mengikuti konsep Hobsbawn tentang *history of society* (sejarah masyarakat, bukan sekedar sejarah sosial) dan ilmu sosial harus mempunyai orientasi *structural-functionalist* dalam menangani permasalahannya. Dengan demikian buku ini dapat mengklaim - sesuai Lloyd - sebagai *scientific history* (hlm. 286). *Ecological materialism* nampak dalam semua bab (tujuh bab ditambah “Catatan Akhir”), tetapi terutama dalam Bab II (“Dasar-Dasar Ekologis”).

Ekologi *tegal* terdapat di Madura, *sawah* di Jawa, dan *ladang* di luar-Jawa. Dari segi geologis, tanah Madura terdiri dari sedimentasi kapur, lapisan napal, campuran aluvium sungai, dan campuran aluvium laut dan kolivium. Curah hujan rendah. Sungai kecil. Tanah terdiri dari ladang kering (*tegal*), sawah tadah hujan, dan sawah, dengan tegal sebagai ciri utama. Tanaman budi daya berturut-turut adalah jagung, singkong, dan padi yang ditanam di sekitar rumah masing-masing. Selain itu ada siwalan, tembakau serta tebu (oleh *pachter*), dan tanaman buah-buahan, seperti mangga. Pada awal abad ke-20 hutan-hutan habis ditebang.

72 Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura, 1850-1940* (Yogyakarta: MataBangsa, 2002).



Tegal mempengaruhi pembentukan desa (*scattered village*), masyarakat (tidak ada kerja kolektif untuk pengairan), kepemimpinan (pemimpin lokal, kiai, lebih berpengaruh ketimbang birokrasi), komunikasi (setiap rumah ada surau sehingga orang hanya ketemu seminggu sekali di masjid desa), psikologi sosial (tingginya solidaritas keluarga, rendahnya solidaritas sosial, psikologi individual (tingginya percaya diri). Pengaruh ekologi juga terasa dalam pertanian (*agricultural deficiency*), ekonomi (perdagangan impor), kependudukan (migrasi), dan etos sosial (*labor ethics*, bukan *land ethics*). Pengaruh ekologi dalam proses sejarah nampak dalam cepatnya pemiskinan kelas negara, tiadanya pemberontakan besar, tidak ada pemogokan, dan asosiasi sukarela berdasar agama (kiai, SI, NU) lebih populer ketimbang asosiasi “sekuler”.

Tesis buku ini adalah perubahan sosial hanya mungkin terjadi kalau ada perubahan ekologi. Usaha pengairan kecil-kecilan tidak mengubah ekologi. Untuk mengubah ekologi itu, sejak 1990-an telah direncanakan hubungan darat dengan Surabaya melalui sebuah jembatan (Jembatan Suramadu), tetapi belum berhasil.

KRITIK MICHEL FOUCAULT.⁷³ Michel Foucault mengatakan bahwa memang analisis struktural telah berhasil mengungkap sejarah jangka panjang, seolah-olah di bawah peristiwa dan perubahan ada sesuatu yang permanen dan merupakan kontinuitas. Analisis struktural itu dilengkapi dengan metode kuantitatif, dan dapat mengungkap pertumbuhan ekonomi, fluktuasi pasar, perkembangan demografi, studi mengenai iklim, studi tentang perkembangan teknologi dan penyebarannya.

73 Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge* (London: Routledge, 1972). Di antaranya dia telah menulis *The Birth of the Clinics* dan *Madness and Civilization*.



Akan tetapi, analisis struktural itu akan gagal mengungkap gejala-gejala yang ada di permukaan sejarah, yaitu sejarah pemikiran, sejarah pengetahuan, sejarah filsafat, dan sejarah sastra. Sejarah-sejarah jenis ini lebih menunjukkan adanya perubahan, perkembangan, dan diskontinuitas, sehingga tidak memerlukan analisis tentang kontinuitas. Akan tetapi justru transformasi dan timbulnya formasi baru.

Selain itu, dalam analisis struktural manusia kehilangan kemerdekaan (semuanya tergantung pada struktur, pada kontinuitas yang permanen, pada suatu sistem yang tertutup) Karenanya, kita memerlukan analisis sejarah yang mengembalikan manusia pada kemerdekaannya. Michel Foucault menyebutnya sejarah yang menganut humanisme, sedangkan analisis struktural adalah penganut antropologisme.

Menurut Michel Foucault secara teoretis ada *architectonic unities* (kesatuan arsitektural) yang disebutnya *unities of discourse* antar gejala sejarah - antar sistem simbol, antar kesadaran, antar peristiwa. Dalam periode yang sama, ada "spirit" yang sama, sehingga ada kesatuan penjelasan. Namun, sejarah yang dianjurkan bukanlah sejarah dengan "spirit of the age", "ideal type", "school", grup, dan totalitas lainnya, karena sejarawan akan memaksakan kategori-kategori umum itu pada sejarah, yang berarti menutup kemerdekaan manusia.

Sebaliknya, dengan mengingat prinsip *unities of discourse*, Foucault menganjurkan supaya sejarawan: (1) menulis sejarah *microscopic*, sejarah dengan topik spesifik, satu topik yang khusus, dan dinamika internalnya. Sejarah jenis ini akan berbeda dengan sejarah *macroscopic* seperti diusahakan dalam sejarah total dari analisis struktural, dan (2) metodenya ialah mencari *discursive*



discourse - tulisan yang membicarakan sejarah dari satu waktu ke waktu berikutnya, rentetan seri, pembicaraan sekitar transformasi, pembaharuan, terbentuknya cara berpikir baru, evolusi dan perkembangan, perubahan, dan pemekaran. Pendek kata, sejarah yang menunjukkan adanya diskontinuitas-diskontinuitas pemikiran, pembaharuan-pembaharuan.

Buku Michel Foucault *Discipline and Punishment: The Birth of the Prison* memaparkan hukuman yang semakin manusiawi pada abad ke-17 sampai awal abad ke-19.⁷⁴ Ia membicarakan hukuman mati yang sangat berdarah dengan menyakiti badan terhukum sebagai tontonan publik, hukuman mati di bawah guillotin yang kurang berdarah, dan terbentuknya penjara sebagai lembaga koreksi. ***

74 Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (New York: Penguin Books, 1982).



PARALELISME

DALAM *Webster's New World College Dictionary*, kata 'paralel' (*parallêlos* [Yunani], berdampingan satu dengan lainnya) di antaranya diartikan sebagai "bergerak dalam tujuan yang sama". Maka, paralelisme (kesejajaran) mempunyai dua pengertian: kemiripan dan keberlainan (*similarity, dissimilarity*) dan pengulangan (*repetition*). Kemiripan dan keberlainan didapatkan dengan membandingkan dua gejala sejarah dengan tema sama di tempat yang berlainan. Kemiripan dan keberlainan yang demikian dapat disebut juga sebagai paralelisme horisontal. Pengulangan didapatkan jika kemiripan diambil antara dua gejala sejarah dengan tema dan tempat sama tetapi waktu yang berlainan (masa lalu dan masa kini). Pengulangan adalah paralelisme vertikal. Paralelisme dekat



dengan sejarah perbandingan (*comparative history*), yang membandingkan peristiwa-peristiwa sejarah yang sama.

KEMIRIPAN

Kemiripan belum mendapat perhatian dari sejarawan Indonesia, kecuali beberapa orang. Padahal, kesempatan untuk itu berlimpah-ruah. Banyaknya unit sejarah Indonesia (wilayah, etnisitas, agama, kebudayaan) sangat menjanjikan dari sudut kemiripan (dan keberlainan) sejarahnya. Gejala sejarah seperti perdagangan, industrialisasi, urbanisasi, kriminalitas, nasionalisme, dan modernisasi, bisa dicari paralelisme sejarahnya. Dalam suasana multikulturisme, kiranya studi paralelisme mempunyai peran strategis. Di luar sejarah, paralelisme sudah biasa dikerjakan. Misalnya, Prajoedi Atmosoedirdjo menulis paralelisme hukum adat antara orang Using dan orang Madura di Jawa Timur (1952); dalam antropologi Eric R. Wolf menulis "Closed Corporate Peasant Communities in Mesoamerica and Central Jawa" (1967); dan dalam sosiologi ada buku Hans-Dieter Evers, *Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia* (1982).

Dalam paralelisme (kemiripan dan keberlainan) ini, kita akan membicarakan buku Clifford Geertz, *Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns*;⁷⁵ buku Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Moder-*

75 Clifford Geertz, *Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns* (Chicago: Chicago University Press, 1971).



nist Organization Under the Dutch Colonialism;⁷⁶ artikel Sartono Kartodirdjo, "Beberapa Perspektif dalam Studi Revolusi Perancis dan Revolusi Indonesia" dalam *Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard*;⁷⁷ buku Soegijanto Padmo, *The Cultivation of Vorstenlands Tobacco in Surakarta Residency and Besuki Tobacco in Besuki Residency and Its Impact on the Peasant Economy and Society: 1860-1960*;⁷⁸ dan buku Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*.⁷⁹

Clifford Geertz, *Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns*. Sekalipun buku ini sebenarnya buku antropologi, akan tetapi banyak mengandung peristiwa sejarah dan merupakan contoh yang baik untuk studi paralelisme. Buku ini memuat kesamaan (perkembangan sosial, perubahan ekonomi) dan perbedaan (peranan pedagang, peranan bangsawan) antara dua kota, Mojokuto dan Tabanan. Mengenai Mojokuto dikatakan bahwa paling tepat ialah melihat kota itu melalui pola organisasi pasarnya. Sementara itu, untuk Tabanan paling tepat ialah melihatnya melalui struktur politiknya. Mojokuto ada di tangan para pedagang dengan orientasi Islam, sedangkan Tabanan ada di tangan elit politik Hindu, pewaris tradisi kasta. Keduanya berhasil

76 Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under the Dutch Colonialism* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989).

77 Sartono Kartodirdjo, "Beberapa Perspektif dalam Studi Revolusi Perancis dan Revolusi Indonesia" dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (Eds.), *Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard* (Jakarta: EFEO, 1999), hlm. 105-116.

78 Soegijanto Padmo, *The Cultivation of Vorstenlands Tobacco in Surakarta Residency and Besuki Tobacco in Besuki Residency and Its Impact on Peasant Economy and Society: 1860-1960* (Yogyakarta: Aditya Media, 1994).

79 Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002).



mentransformasikan ekonomi dari tipe *bazaar* ke tipe firma (toko, perusahaan).

Melihat peran mereka dalam modernisasi ekonomi, pastilah mereka berbeda sama sekali dengan gambaran kolonial mengenai “orang desa yang sederhana”, yang sering dijadikan alasan bagi penjajahan. Juga - dalam kasus Tabanan - tidak sekedar seperti gambaran kolonial tentang “hubungan feodal” antara petani-aristokrasi, alasan yang sering dipakai penjajah untuk “membebaskan” mereka dari belenggu “feodalisme”.

Ada tiga perbedaan antara Mojokuto dan Tabanan, yaitu orientasi, *mode of religiosity*, dan tujuan kewirausahaan. *Pertama*, pedagang di Mojokuto *ego-oriented*, sedangkan pedagang di Tabanan *group-oriented*. Pedagang di Mojokuto menunjukkan “semangat kapitalis” seperti digambarkan oleh Max Weber bagi Protestanisme, karena mereka juga kaum modernis, Muhammadiyah. Di Tabanan, orientasi grup mereka lebih tepat digambarkan dengan konsep Redfield tentang “great tradition” dan “little tradition”. Para aristokrat mewakili “great tradition”, sedangkan petani di sekitarnya mewakili “little tradition”. Aristokrasi di Tabanan hanya mungkin mempertahankan dominasinya dalam masyarakat yang sedang berubah, dengan mengalami modernisasi. “Gambaran tentang perubahan” ini membuat mereka mengalihkan usahanya.

Kedua, dalam kehidupan agama para pedagang di Mojokuto menunjukkan perbedaan yang menyolok dengan mayoritas penduduk yang konservatif. Di Tabanan, sebaliknya, para pengusaha (aristokrat) sepenuhnya sama dengan mayoritas penduduk (konformis), sama-sama pemeluk Hindu tradisional. Aristokrasi mengambil tanggung jawab atas peristiwa keagamaan, sosial, dan budaya.



Ketiga, tujuan para pedagang di Mojokuto adalah murni ekonomi, sedangkan pengusaha di Tabanan adalah politik. Kalau para pedagang di Mojokuto ingin kaya, maka para pedagang di Tabanan ingin berkuasa. Para pengusaha (aristokrat) di Tabanan ini mengingatkan kita pada Restorasi Meiji, ketika aristokrat menjadi pengusaha.

Namun, menurut Geertz keduanya menghadapi kendala. Bagi pengusaha di Mojokuto, kendalanya ialah kesulitan untuk berkembang, sedangkan pengusaha di Tabanan sulit menuju rasionalisasi. Dengan kata lain, keduanya menghadapi kendala untuk menjadikan usaha mereka mempunyai manajemen yang profesional, bukan manajemen individual atau keluarga.

Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of A Muslim Modernist Organization Under The Dutch Colonialism*. Sekalipun buku ini juga memuat informasi mengenai gerakan Muhammadiyah di seluruh Indonesia, kita hanya akan mengambil paralelisme antara Muhammadiyah di Jawa dan Muhammadiyah di Sumatera Barat.

Di kedua tempat itu Muhammadiyah menunjukkan wajah yang berbeda karena tantangan yang dihadapi juga berbeda. Di Jawa, Muhammadiyah bersifat akomodasionis dan pragmatis, sedangkan di Sumatera Barat radikal dan idealis. Tantangan utama di Jawa adalah modernisasi (Pemerintah Kolonial) dan Kristenisasi (*zending*, *missi*). Tantangan utama di Sumatera Barat adalah Kaum Tua dan Kaum Adat. Karenanya, Muhammadiyah di Jawa hanya modernis saja, sedangkan di Sumatera Barat modernis dan revivalis. Sebab, di Sumatera Barat pertentangan dengan Kaum Tua dan Kaum Adat sudah mempunyai sejarah yang panjang dan berdarah. Di Jawa, Muhammadiyah berkembang di kota-kota, dan di Sumatera Barat berkembang jauh sampai ke desa-desa.



Dengan kata lain, Muhammadiyah di Jawa menekankan modernisme (mendamaikan agama dengan dunia modern), Muhammadiyah di Sumatera Barat menekankan puritanisme (membersihkan agama dari praktik yang sesat). Bahwa Muhammadiyah di Sumatera Barat menekankan puritanisme, nampak dalam penentangan yang keras pada *Goeroe Ordonnantie* 1925 yang memenangkan Kaum Tua dan Kaum Adat. Perbedaan Jawa dan Sumatera Barat itu juga sangat jelas ketika Kongres Muhammadiyah diselenggarakan di Bukittinggi tahun 1930. Muhammadiyah Jawa mengajukan perempuan sebagai penceramah, sedangkan Muhammadiyah Sumatera Barat menolak penceramah perempuan. Haji Rasul dari Sumatera Barat dengan kuat bertahan. Hampir-hampir dicapai kesepakatan (dengan membentangkan tabir yang menutupi penceramah dari pandangan kaum laki-laki), akan tetapi kesepakatan itu batal pada detik-detik terakhir.

Selain itu keduanya juga terlibat dalam politik (perjuangan nasional). Muhammadiyah di Jawa berhadapan dengan SI, sedangkan Muhammadiyah di Sumatera Barat berhadapan dengan PKI dan pemberontakannya pada 1927. Muhammadiyah di Jawa (*Hoofdbestuur*) masuk ke dalam PPPKI dan MIAI, dan Muhammadiyah di Sumatera Barat disibukkan dengan politik karena pada 1930 berdiri PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) yang lebih radikal daripada Muhammadiyah, sehingga banyak orang Muhammadiyah yang bergabung. Di kedua tempat itu Muhammadiyah menjadi tempat persembaian nasionalisme.

Sartono Kartodirdjo, “Beberapa Perspektif Dalam Studi Revolusi Perancis dan Revolusi Indonesia”. Sekalipun karangan ini hanya sebuah artikel, tapi sangat berguna untuk studi kemiripan. Sebab, dalam artikel ini dengan jelas ditunjukkan bagaimana tema yang sama



terdapat dalam dua revolusi yang secara geografis dan temporal berjauhan.

Tema itu adalah transformasi struktural. Pedesaan Perancis pra-revolusi dan Indonesia pra-revolusi menunjukkan kesamaan. Di daerah pedesaan Perancis ada tuan tanah (*seigneur*) dan ada petani-penggarap (*tenant*) dan petani bagi-hasil (*sharecropper*). Kedua macam petani itu mempunyai kewajiban-kewajiban, seperti pungutan-pungutan, wajib pelayanan, wajib kerja (*corvée*) yang merugikan. Para petani yang ingin terhindar dari kewajiban-kewajiban itu menjadi pengembara (*vagabond, vagrant*) atau melakukan perampasan (*brigand*). Di Indonesia dengan Undang-Undang Agraria 1870 Pemerintah Kolonial memberikan kebebasan “feodal” pada pekebun untuk melakukan eksploitasi yang merugikan petani. Petani yang ingin menghindari kewajiban-kewajiban, meninggalkan tanahnya dan berpindah tempat. Meskipun kekuasaan kolonial sudah berakhir pada 1945, tetapi ada revolusi sosial di beberapa daerah, seperti Sumatera Utara, Brebes-Tegal-Pekalongan (Tiga Daerah), Surakarta, dan Salatiga.

Peranan kelompok-kelompok sosial di kedua revolusi itu juga menunjukkan kemiripan. Mula-mula yang banyak berperan adalah kaum borjuis di Perancis atau kaum inteligensia di Indonesia, kemudian ada gerakan rakyat di Perancis atau laskar rakyat di Indonesia. Di kedua tempat itu juga kemudian berkembang mentalitas revolusi dengan kekerasan, kekejaman, dan konflik-konflik.

Revolusi di kedua tempat itu menunjukkan gejala yang sama dengan revolusi di tempat lain. Negara sedang mengalami krisis politik. Revolusi Perancis dan Revolusi Indonesia mencerminkan adanya transformasi, waktu struktur kekuasaan menghadapi kekuatan-kekuatan sosial-politik baru yang menuntut perubahan sistem.



Soegijanto Padmo, *The Cultivation of Vorstenlands Tobacco in Surakarta Residency and Besuki Tobacco in Besuki Residency and Its Impact on The Peasant Economy and Society: 1860-1960*. Dengan mengesampingkan detilnya, buku yang membandingkan industri tembakau di Surakarta dan di Besuki ini tidak memberikan simpulan final tentang sebab-akibat tunggal dari ekonomi-perkebunan terhadap ekonomi dan masyarakat petani, sebab banyak faktor yang terlibat di dalamnya.

Meskipun demikian, diakuinya ada perbedaan pada dua daerah itu. Ekonomi-perkebunan tidak berhasil mendorong perkembangan ekonomi dan kehidupan petani di Surakarta, khususnya Kabupaten Klaten, petani dan daerah itu tetap saja miskin dan stagnan seperti semula. Sebaliknya, ekonomi-perkebunan telah berhasil memperbaiki ekonomi dan kehidupan petani dan mengembangkan Residensi Besuki, khususnya Kabupaten Jember. Perbedaan itu terletak dalam kondisi demografis yang berbeda, tidak karena sebab-akibat tunggal, ekonomi-perkebunan. Ketika ekonomi-perkebunan memasuki Surakarta, daerah telah padat penduduk, sedangkan Besuki masih jarang penduduknya, sehingga ekonomi-perkebunan memberi pekerjaan penduduk dan pendatang (Jawa, Madura).

Buku ini mencoba melukiskan aspek organisasi dari ekonomi-perkebunan tembakau di kedua daerah itu. Tahun 1860-1880 penanaman tembakau kecil-kecilan dilakukan secara sukarela oleh rakyat; tahun 1880-1955 penanaman tembakau besar-besaran dilakukan oleh perkebunan atas dasar kontrak dengan petani; dan tahun 1955-1980-an perkebunan tembakau dilakukan oleh perusahaan negara (akibat nasionalisasi). Pada waktu tembakau ditanam secara kecil-kecilan, tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan di Besuki. Baru ketika ada ekonomi-perkebunan kedua daerah itu terbukti menguntungkan bagi perkebunan, berkat ongkos produksi yang rendah.



Kekuasaan telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam kontrak penyewaan, hubungan dengan petani, ongkos tenaga kerja yang murah. Hal-hal itu memberi keuntungan besar bagi ekspor tembakau karena tembakau menjadi sangat kompetitif di pasaran internasional. Keadaan itu berlangsung sampai 1930 waktu terjadi depresi. Dari 1930-1955 ekspor tembakau menjadi limbung, sementara pesaing-pesaing baru bermunculan, terutama dari Amerika Latin.

Keadaan yang tidak menguntungkan itu terus berlangsung bahkan ketika perkebunan dinasionalisir pada 1955. Nasionalisasi perkebunan dan timbulnya pasaran dalam negeri tidak banyak menolong. Apalagi setelah muncul hasil ekspor yang lain, seperti minyak kelapa sawit, tembakau menjadi kehilangan arti.

Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Buku ini menceritakan bagaimana Hukum Perkawinan tradisional diperbaharui menjadi Hukum Perkawinan kontemporer. Sebenarnya buku ini mencakup daerah-daerah lain di Asia Tenggara yang fikih tradisionalnya menganut madzhab Syafi'i (termasuk Brunei, Singapura, Thailand, dan Philipina dan negara-negara Islam lain), tetapi kita akan mengambil paralelisme antara Indonesia dan Malaysia. Juga buku ini memberi uraian mengenai perkawinan dalam fikih tradisional dan pendapat para intelektual Islam modern. Karya ini tidak dimaksudkan sebagai karya sejarah, tetapi *Islamic Studies* yang meneliti mengenai teks. Jadi, buku ini adalah sejarah konstitusi. Pembicaraan di dalamnya menyangkut evolusi sejarah perundang-undangan sejak zaman kerajaan tradisional, zaman penjajahan, dan sebelum pembaharuan.



Pokok-pokok ajaran madzhab Syafi'i yang dipakai di Indonesia dan Malaysia dahulu menempatkan laki-laki di atas wanita. Superioritas laki-laki sangat nampak dalam hukum perkawinan dan perceraian. Dalam praktik di kedua negara itu - yang menggabungkan Islam dan Hukum Adat - terdapat kesewenang-wenangan pihak suami terhadap isteri: (1) poligami yang tidak bertanggung jawab, (2) adanya kawin paksa, wali memaksa wanita untuk kawin (3) nikah siri, tidak tercatat, dan (4) talak sepihak oleh suami.

Pembaruan perkawinan di kedua negara itu mengusahakan kesetaraan suami-isteri. Buku ini hanya membahas empat hal, yaitu perundangan mengenai (1) poligami, (2) peran wali, (3) pencatatan perkawinan, dan (4) perceraian.

INDONESIA. *Pertama*, mengenai poligami. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan (1) prinsip perkawinan adalah monogami, tetapi poligami diperbolehkan dengan maksimum empat isteri. Syarat berpoligami adalah izin dari Pengadilan. Bagi PNS masih ditambah dengan harus ada izin dari atasan, serta wanita PNS tidak diizinkan menjadi isteri kedua. *Kedua*, tentang pencatatan perkawinan. UU No. 1/1974 menyatakan bahwa perkawinan itu sah secara hukum apabila tercatat dalam Pencatatan Perkawinan sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975. *Ketiga*, tentang peran wali dan kedudukan wanita. Tanpa wali, perkawinan tidak sah. Pada umumnya wali adalah wali nasab, tetapi dalam beberapa hal dibolehkan adanya wali hakim. Tanpa persetujuan kedua calon, perkawinan tidak bisa berlangsung. Artinya, wanita bebas memilih calon suaminya. *Keempat*, ada delapan alasan sehingga perceraian dapat dilakukan, yaitu (i) zina/pemabuk/penjudi dan lainnya yang tak tersembuhkan; (ii) meninggalkan



pasangan tanpa izin lebih dari dua tahun; (iii) mendapat hukuman penjara lebih dari lima tahun; (iv) mengalami cacat badan, sehingga tak dapat melakukan hubungan suami-isteri; (v) kekejaman rumah tangga; (vi) terus-menerus bertengkar; (vii) suami melanggar taklik-talak; dan (viii) murtad.

MALAYSIA. *Pertama*, tentang poligami, Undang-undang Perkawinan Malaysia mensyaratkan kebolehan poligami dengan (i) izin dari pengadilan, (ii) poligami tanpa izin Pengadilan harus membayar denda untuk dapat disahkan. Poligami diperbolehkan dalam kasus (a) pihak isteri mandul, (b) keuzuran jasmani, (c) tidak layak bersetubuh, (d) menolak persetubuhan, dan (e) isteri gila. *Kedua*, Hukum Perkawinan Malaysia mengharuskan pencatatan perkawinan. Pencatatan dilakukan setelah akad nikah. *Ketiga*, tanpa wali, perkawinan tidak sah. Calon mempelai harus setuju dengan perkawinan. Akan tetapi, ada negara bagian yang masih mengakui hak wali untuk mencari jodoh. *Keempat*, ada perbedaan antara negara-bagian yang satu dengan lainnya perihal perceraian. Hal-hal detail dibicarakan di dalam buku ini, tetapi tidak kita bicarakan di sini.

Dengan kata lain, di Indonesia dan Malaysia, tujuan perundang-undangan Muslim kontemporer secara umum sama, yaitu usaha ke arah kesetaraan laki-laki dan wanita. Adapun perbedaannya sangat kecil. Misalnya dalam soal poligami, Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa azas perkawinan adalah monogami, dan poligami hanya sebagai “jalan keluar”, sedangkan perundangan Malaysia tidak secara tegas menyatakan monogami sebagai azas.



PENGULANGAN

Studi ini jarang ditemukan. Karenanya, kita hanya menemukan dua studi, satu bersifat teoretis, sedangkan lainnya studi empiris. Jenis pertama ialah karya Clifford Geertz, "Politics Past, Politics Present: Some Notes on the Uses of Anthropology in Understanding the New States" dalam *The Interpretation of Cultures*.⁸⁰ Jenis kedua kita temukan dalam dua artikel Benedict R. O'G. Anderson, "Gagasan tentang Kuasa dalam Budaya Jawa" dan "Negara Lama, Masyarakat Baru: Orde Baru Indonesia dalam Perbandingan Perspektif Kesenjarian" dalam bukunya *Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*.⁸¹

Clifford Geertz, "Politics Past, Politics Present: Some Notes on The Uses of Anthropology in Understanding The New States" dalam *The Interpretation of Cultures*. Artikel ini menunjukkan bahwa studi tentang politik tradisional mempunyai kegunaan untuk mempelajari politik masa kini. Buktinya, di masa kini ada empat macam konsep dari studi antropologi yang dianggap relevan untuk mempelajari negara-negara masa kini. Keempatnya ialah (1) konsep tentang *hydraulic state* (negara despotik) - pembaharuan Wittfogel atas konsep Marx *Asian mode of production*, (2) *segmentary state*, di mana loyalitas terletak pada kelompok - tidak pada negara sentral seperti konsep *hydraulic state*, (3) konsep tentang feodalisme, sebuah kategori sejarah yang sangat bervariasi, dan (4) konsep

80 Clifford Geertz, "Politics Past, Politics Present: Notes on the Uses of Anthropology in Understanding the New States" dalam *Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, Inc., Publishers, 1973), hlm. 327-346.

81 Benedict R. O'G. Anderson, "Gagasan tentang Kuasa dalam Masyarakat Jawa" dan "Negara Lama, Masyarakat Baru: Orde Baru Indonesia dalam Perbandingan Persepektif Kesenjarian" dalam *Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia* (Yogyakarta: MataBangsa, 2000), hlm. 35-169 dan hlm. 203-260.



para ahli prasejarah - arkeologis, orientalis, antropologis - tentang *negara kuno* dan tahapan perkembangannya, misalnya konsep tentang *Urban Revolution* dari Gordon Childe atau konsep tentang perkembangan siklus yang gradual.

Geertz sendiri kemudian memberi contoh tentang penelitian antropologis di Bali abad ke-19 yang dapat berguna dalam penelitian-penelitian tentang Dunia Ketiga. Bali pada waktu itu menunjukkan bahwa negara didasarkan pada budaya. Negara-negara di Bali mempunyai tiga konsep kekuasaan, yaitu doktrin tentang *exemplary center* (pusat yang berwibawa), konsep tentang *sinking status* (status yang semakin menyusut), dan konsep tentang *expressive politics* (politik yang ekspresif) - penguasaan tidak terletak dalam teknik (ketrampilan) administratif tetapi dalam seni teater.

Pertama, doktrin *exemplary center*. Doktrin ini didukung oleh adanya imaji tentang tatanan supranatural. Penaklukan Majapahit atas Pulau Bali pada 1343 menyebabkan Gelgel menjadi pusat kerajaan. Mitos "Penaklukan Majapahit" setara dengan mitos "Founding Fathers" bagi Amerika. *Kedua*, konsep *sinking status*. Sesudah tahun 1700 Bali tidak lagi diperintah oleh satu pusat, pemberontakan-pemberontakan menjadikannya terpecah jadi banyak kerajaan. Gelgel - atau pewarisnya Klungkung - meredup wibawanya. *Ketiga*, konsep *expressive politics* menjadikan Bali sebagai sebuah negara-teater melalui banyak upacara. Upacara-upacara mempunyai peranan sentral, negara hanyalah penyelenggara bagi ritual-ritual.

Dalam studi negara-negara Dunia Ketiga masa kini, studi mengenai Bali tradisional abad ke-19 ternyata ada relevansinya. Kita melihat gejala "Bali" di Ghana, Indonesia (Soekarno, Soeharto), dan Maroko. Perlu dicatat bahwa pengalaman sejarah juga menempati kedudukan penting dalam usaha membangun negara di



Dunia Ketiga. Soekarno misalnya, pasti belajar dari pengalaman sejarah sewaktu penjajahan Jepang. Meskipun demikian, studi politik masa lalu tetap dapat menyumbang kerangka kerja bagi penelitian politik masa kini.

Benedict R. O'G. Anderson, "Gagasan Tentang Kuasa Dalam Budaya Jawa" dalam *Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Artikel panjang yang ditulis pada 1972 ini mencoba membandingkan antara konsep kuasa dalam budaya Jawa tradisional yang "irasional" di masa lalu dan kesinambungannya dalam konsep kuasa di Indonesia pada Soekarno yang "nasionalis anti-Barat" serta pada Soeharto yang "pragmatis pro-Barat".

Konsep kuasa Jawa tradisional ternyata berbeda sama sekali dengan konsep kuasa Eropa modern. Di Eropa modern, kekuasaan dipahami sebagai berikut: (1) kekuasaan bersifat abstrak, artinya kuasa hanya dapat dimengerti lewat hubungan sebab-akibat, apakah perintah pemegang kuasa dipatuhi atau tidak; (2) sumber kuasa bersifat heterogen, artinya kuasa bersumber pada macam-macam hal (kekayaan, status sosial, jabatan formal, organisasi, persenjataan, dukungan penduduk, dan sebagainya); (3) kekuasaan bersifat tidak terbatas, dapat berkurang atau bertambah tergantung hubungannya dengan sumber. Misalnya, kuasa akan berkurang bersama berkurangnya pendukung; sebaliknya, kuasa bertambah jika persenjataan yang dimiliki bertambah kuat; dan (4) kuasa tidak perlu berhubungan dengan moral.

Konsep kuasa Jawa tradisional berbeda sama sekali dengan konsep kuasa Eropa modern tersebut. Dalam kebudayaan Jawa tradisional, kuasa itu bersifat: (1) konkret, artinya sungguh-sungguh nyata ada pada pemiliknya, tidak tergantung kepada cara kuasa itu



digunakan; (2) homogen, artinya berasal dari sumber yang sama, yaitu sumber Illahiah; (3) konstan, artinya tidak bertambah atau berkurang; dan (4) absah, artinya orang tidak perlu mempertanyakan keabsahannya dan baik-buruknya kekuasaan.

Cara mendapatkan kekuasaan ialah dengan *laku tapa* (secara pribadi) untuk mendapat *wahyu ilahiah*, dan dengan menciptakan simbol-simbol (verbal, non-verbal). Soekarno, misalnya, mempunyai retorika yang luar biasa dan membangun tugu (lambang phallus, lambang kejantanan) serta pertunjukan-pertunjukan wayang di istana. (Desas-desus mengatakan bahwa Soeharto sering bertapa di tengah pertemuan [*tempuran*] dua sungai, dan kenyataannya dia sangat senang dengan wayang lakon Wahyu Makutoromo serta simbol-simbol verbal budaya Jawa - *tambahan dari penulis*).

Selanjutnya artikel itu membahas paralelisme konsep Jawa tradisional dengan Indonesia modern dalam kuasa dan sejarah (konsep mesianisme), kesatuan pusat dan daerah (konsep kemandirian), pergiliran kekuasaan (kekuasaan orang kebanyakan [Ken Arok, Senopati, Soekarno, Soeharto]), kuasa dan imperium (nama kerajaan adalah nama ibukotanya, konsep mandala), penguasa dan kelas yang berkuasa (patrimonialisme), kuasa dan etika (satria dan raksasa [halus dan kasar], konsep *darma* dan *pamrih*), kuasa dan pengetahuan (Dewa Ruci, Kalimasada [monopoli pengetahuan]), dan penguasa dan rakyat (priyayi dan wong cilik).

Benedict R. O'G. Anderson, "Negara Lama, Masyarakat Baru: Orde Baru Indonesia Dalam Perbandingan Perspektif Kesejarahan" dalam *Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Artikel ini dimulai dengan perbedaan antara konsep negara dan konsep bangsa dengan cara melihat *kepentingan* masing-masing. Semasa dinasti,



definisi negara dan bangsa bersifat rancu (misalnya negara feodal Manchu menguasai bangsa Ch'ing), satu dinasti bisa menguasai ("berkepentingan") atas banyak bangsa. Dengan adanya negara-bangsa sejak abad ke-19 (*nation-state*), kerancuan malah bertambah dahsyat. Negara adalah wilayah, struktur organisasi, pembagian fungsi, personalia, dan sebagainya, sedangkan bangsa adalah "komunitas yang dibayangkan" (*imagined community*) yang legiti-masi dan hak-haknya sudah menjadi "norma" dalam kehidupan modern. Artikel itu dilanjutkan dengan analisa bahwa kebijakan-kebijakan Orde Baru tidak lain hanya mewakili kepentingan negara, dan tidak mewakili bangsa.

Perspektif sejarahnya begini. VOC yang dimaksudkan hanya sebagai perusahaan perdagangan telah bertindak sebagai negara. VOC mengadakan perjanjian, monopoli dagang, mempunyai tentara, mempengaruhi pengangkatan pejabat kerajaan, dan akhirnya menguasai wilayah. Ketika VOC bubar dan digantikan Negara Kolonial, peralihan dari *negara* Kumpeni ke *negara* Hindia-Belanda mengubah administrasi. VOC hanya menempatkan serdadunya di benteng, sedangkan Hindia-Belanda adalah negara birokrasi. Di bawah Hindia-Belanda, birokrasi semakin terpusat sementara wilayah semakin meluas.

Pada artikel ini yang terpenting ialah pembicaraan sekitar Orde Baru di bawah Soeharto. Soeharto (21 tahun) adalah serdadu KNIL dengan pangkat Sersan pada 1942; di masa penjajahan Jepang, ia menjadi tentara PETA dengan pangkat Komandan Kompi, dan dengan cepat melambung sesudah Revolusi menjadi Letnan Kolonel. Pada waktu Soekarno berkuasa, Soeharto diangkat jadi Komandan KOSTRAD. Dan pada 1966, Soeharto menjadi pengganti Soekarno, dan pada 1968 menjadi presiden.



Orde Baru bertindak sebagai negara dalam semua kebijakannya. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Soeharto menjalankan politik “etis” dengan cara mengendalikan harga, mengembalikan usaha-usaha asing yang dinasionalisir, menarik penanam modal asing, dan mencari pinjaman dari Barat. Investasi asing, baik mono maupun multinasional menguntungkan negara - komisi dan pajak - tetapi merugikan bangsa karena adanya dominasi ekonomi asing. Terlebih, Orde Baru melakukan monopoli negara (yang mengingatkan Tanam Paksa) dan mendorong tumbuhnya kaum konglomerat. Dalam bidang politik, Orde Baru memerintah dengan dukungan militer, partai politik negara (Golkar), dan dominasi pengusaha Cina. Dalam hal keamanan, ABRI dapat disejajarkan dengan KNIL. ABRI mempunyai jumlah yang kecil tetapi mendapat perlindungan dari kekuatan asing, Amerika Serikat, sama dengan KNIL yang mendapat perlindungan dari Britania Raya. Maka, Orde Baru lebih mewakili kepentingan negara ketimbang kepentingan bangsa. ***



GENERALISASI SEJARAH

BERBEDA dengan paralelisme yang dengan membandingkan dua unit sejarah saja tugasnya sudah selesai, generalisasi harus membandingkan banyak unit sejarah. *Generalisasi sejarah* ialah membandingkan unit-unit sejarah. Letak penjelasan sejarahnya ialah pada generalisasi itu, tidak pada deskripsi atas masing-masing unit sejarah.

Kata 'generalisasi' sebenarnya memerlukan penjelasan panjang, menyangkut filsafat maupun praktik penulisan sejarah. Di sini kita menjelaskan kata generalisasi dari segi praktik penulisan sejarah. Dalam praktik, penulisan generalisasi sejarah mempunyai setidaknya empat makna. Dua di antaranya yang disebut dalam buku Allan J. Lichtman dan Valerie French, *Historians and the Living Past: The Theory and Practice of Historical Study*, yaitu (1) silogisme



dan (2) "covering laws".⁸² Silogisme ialah generalisasi empiris. Sebagai contoh: Pierre adalah petani Zaman Pertengahan; semua petani Zaman Pertengahan buta huruf; jadi Pierre buta huruf. Adapun "covering laws" (hukum umum yang serba mencakup) berasal dari hukum ilmu alam. Sejarawan itu tak berbeda dengan ahli ilmu alam, ia harus menganggap bahwa kausalitas sejarah itu sama saja dengan kausalitas ilmu alam, tunduk kepada hukum-hukum yang umum (*general laws*).

Dua makna yang lainnya adalah (3) inferensi statistik dan (4) generalisasi sejarah (*historical generalization*). Inferensi statistik ialah generalisasi yang diambil dengan metode statistik, yaitu distribusi, korelasi, regresi, *content analysis*, dan *time series*. Adapun generalisasi sejarah ialah generalisasi yang dibuat dengan membandingkan unit-unit sejarah. Dalam bab ini akan dibicarakan perbandingan sejarah dan generalisasinya. Buku pegangan mengenai metode sejarah seperti Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method* sudah menganjurkan sejarawan untuk mengadakan generalisasi sejarah (*historical generalization*).⁸³

Generalisasi sejarah kita temukan di antaranya dalam buku Roland Mousnier, *Peasant Uprisings in the Seventeenth-Century France, Russia, and China*;⁸⁴ Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*;⁸⁵ Michael Adas, *Ratu Adil: Tokoh*

82 Allan J. Lichtman dan Valerie French, *Historians and the Living Past: The Theory and Practice of Historical Study* (Arlington, Illinois: Harlan Davidson Inc., 1976), hlm. 24-25.

83 Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method* (New York: Alfred A Knopf Publisher, 1967), 258-260, 263-264.

84 Roland Mousnier, *Peasant Uprisings in the Seventeenth-Century France, Russia, and China* (New York: Harper & Row Publishers, 1970).

85 Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries* (Kuala Lumpur: Oxford University, 1972).



dan Gerakan Milenarian Menentang Kolonialisme Eropa;⁸⁶ Barrington Moore, Jr., *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*;⁸⁷ dan Eric R. Wolf, *Peasant Wars of the Twentieth Century*.⁸⁸

Dalam kepustakaan akan kita temukan model generalisasi lainnya, seperti buku James C. Scott, *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*;⁸⁹ buku Rupert Emerson, *From Empire to Nation: The Rise to Self-Assertion of the Asian and African Peoples*;⁹⁰ buku Sidney Hook, *The Hero in History: A Study in Limitation and Possibility*,⁹¹ dan buku Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*.⁹² Keempatnya memang menggunakan peristiwa sejarah sebagai rujukan, tetapi itu tidak dimaksudkan sebagai generalisasi sejarah. Buku semacam tidak bertujuan mengungkap peristiwa-peristiwa sejarah tapi teori, sehingga lebih tepat disebut sebagai refleksi sejarah. Buku Scott adalah teori sosiologi, ekonomi, atau antropologi tentang etika subsistensi "safety first", buku Emerson adalah ilmu politik tentang nasionalisme dan demokrasi, buku Hook adalah teori tentang hero - "the event making man" dan "the eventful man", dan buku Gurr adalah teori politik tentang *relative deprivation*.

86 Michael Adas, *Ratu Adil: Tokoh dan Gerakan Milenarian Menentang Kolonialisme Eropa* (Jakarta: Rajawali, 1988).

87 Barrington Moore, Jr., *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World* (Boston: Beacon Press, 1967).

88 Eric R. Wolf, *Peasants Wars of the Twentieth Century* (New York: Harper Torchbooks, 1973).

89 James C. Scott, *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia* (New Haven: Yale University, 1976).

90 Rupert Emerson, *From Empire to Nation: The Rise to Self-Assertion of the Asian and African Peoples* (Boston: Beacon Press, 1970).

91 Sidney Hook, *The Hero in History: A Study in Limitation and Possibility* (Boston: Beacon Press, 1969).

92 Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1971).



Roland Mousnier, *Peasant Uprisings in Seventeenth Century France, Russia, and China*. Buku ini menunjukkan pengetahuan yang luas mengenai petani Perancis - sebagai hasil studi selama empat puluh tahun. Tetapi, mengenai Rusia, Mousnier hanya tergantung dari bahan-bahan sekunder dan dokumen-dokumen yang diterbitkan. Mengenai China, pengetahuan penulis nampaknya terbatas pada bahan-bahan sekunder. Meskipun demikian, generalisasi sejarah yang disuguhkan sanggup memberi gambaran tentang pemberontakan petani pada abad ke-17.

Untuk setiap negara dimulai dengan pembicaraan mengenai struktur sosialnya. Mengenai Perancis kemudian dibicarakan pemberontakan *Croquant* 1636 dan 1637, *Nu Pied* 1639, dan *Torrébens* 1675. Dari Rusia dibicarakan pemberontakan-pemberontakan dalam "Time of Trouble" 1604-1605, 1607-1608, 1610, dan Stenka Razin 1670-1671. Di China pemberontakan petani (1630-an sampai 1640-an) terjadi pada waktu Dinasti Ming terakhir.

Pemberontakan pada abad ke-17, semuanya adalah reaksi terhadap negara. Sebab terbesar pemberontakan di Perancis dan Rusia adalah sentralisasi dan penyeragaman negara di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit; menurunnya kebiasaan lokal dalam hak-hak istimewa dan kemerdekaan, lebih daripada beban pajak dan pelayanan pada negara. Di China, pemberontakan disebabkan oleh krisis sebagai akibat dari menurunnya kewibawaan dinasti. Kepercayaan kepada tata supernatural, kepatuhan pada kebiasaan dan adat istiadat, mobilitas sosial yang riil, kemerdekaan perorangan dan hak atas kekayaan pribadi, hierarki dengan tingkatan-tingkatannya, semuanya mencegah pemberontakan kepada tatanan sosial. Dengan alasan yang sama, di China maupun di Perancis, pemberontakan petani tidak menjadi sebuah revolusi. Di Rusia,



sebaliknya, negara berangsur-angsur mengubah petani menjadi *serf* yang tidak berhak atas kekayaan dan kemerdekaan pribadi, menutup semua jalan untuk mobilitas ke atas. Semua itu memancing pemberontakan petani ke arah sebuah revolusi.

Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in The Nineteenth and Twentieth Centuries*. Dalam buku yang sangat mendetil ini dibicarakan tipologi gerakan-gerakan protes para petani. Tipe-tipe itu ialah anti-penghisapan (*anti-extortion*), gerakan mesianistik, gerakan revivalisme dan sektarian, dan gerakan lokal Sarekat Islam. Kita akan membicarakan setiap gerakan, tetapi dengan meninggalkan peristiwa dan angka tahun, nama pimpinan gerakan, dan lokasi gerakan, dan reaksi dari Belanda.

ANTI-EXTORTION (ANTI-PENGHISAPAN). Gerakan ini terjadi di tanah *particuliere landrijen*, yaitu wilayah yang dibeli oleh swasta dari Belanda. Tanah-tanah partikelir itu terjadi sebagai hasil penjualan oleh Belanda, sejak zaman VOC sampai perempat pertama abad ke-19. Di tanah-tanah yang dimiliki swasta itu, pemilik memperoleh hak untuk: (1) menarik pajak (*tjuke*) dan layanan (tenaga kerja) pada para petani di atasnya, sehingga kalau pajak dan layanan itu berlebihan dan memberatkan menimbulkan gejolak; (2) bentuk dari gejolak itu ialah mileniarisme atau mesianisme, jauh dari kepentingan-kepentingan sesaatnya; (3) gejolak itu ialah di sana-sini ada kerusuhan, atau kadang berbentuk pemberontakan yang terorganisasikan.

Contoh gerakan anti-penghisapan dari abad ke-19 ialah gejolak di Tjiomas. Gerakan ini terjadi pada 1886 ketika di Jawa Barat



(dekat Sukabumi) kepemimpinan gejolak Tjiomas direkrut dari petani sendiri. Salah satu pemimpinnya ialah Apan. Apan berperan sebagai Imam Mahdi dan menyerukan perang suci. Pimpinan yang lain, Mohamad Idris, memakai gelar Panembahan yang merupakan gelar tipikal gerakan mesianisme. Orang-orang yang berkumpul di rumahnya melakukan *sembah* layaknya seorang raja.

Contoh dari abad ke-20 ialah peristiwa di Pamanukan dan Tjiasem di Purwakarta. Peristiwa ini salah satunya dipimpin oleh Bapa Eming. Mereka mendatangi rumah Bupati Purwakarta dan Kontrolir untuk menyampaikan keluhan. Tetapi, keesokan harinya polisi menangkapnya, dan di rumahnya dikatakan ditemukan senjata dan *jimat*.

GERAKAN MESIANISME. Gerakan mesianisme ialah gerakan yang dipimpin seorang tokoh keagamaan yang bertindak sebagai seorang *messiah* serta diyakini oleh para pengikutnya sebagai demikian. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur biasanya pemimpin menyebut diri sebagai Ratu Adil, sedangkan di Jawa Barat sebagai Ratu Sunda.

Pada tahun 1904 ada peristiwa Gedangan, dan tahun 1907 ada peristiwa Dermadjaja. Pada waktu itu gerakan mesianis dekat dengan gerakan nativistik, gerakan anti-asing. Pada tahun 1910-an gerakan mesianis bercampur dengan gerakan nasionalisme modern. Tahun-tahun ini menunjukkan percampuran antara tradisi pedesaan dengan magi dan pemujaan nenek-moyang dan orang-orang keramat, sedangkan segmennya adalah penduduk kota yang mengalami modernisasi.

Basis institusional gerakan mesianisme hanya ada di lingkaran keluarga. Karenanya, begitu sebuah keluarga punah berhentilah



gerakan ini. Ini berbeda dengan gerakan keagamaan atau gerakan modern, lantaran selalu tersedia kepemimpinan yang baru.

REVIVALISME DAN GERAKAN SEKTARIAN. Gerakan keagamaan revivalisme dan sektarian serta gerakan-gerakan protes yang lain merupakan suatu perlawanan kepada kekuatan yang mapan dan menindas. Meski demikian, keduanya memiliki perbedaan. Persamaannya ialah, baik gerakan keagamaan maupun gerakan protes yang lain, rekrutmen pemimpin kedua gerakan tersebut berasal dari kalangan bawah dan ideologi gerakan milenarian mereka lebih ditujukan untuk hal-hal keduniaan daripada keselamatan jiwa di hari kemudian. Perbedaan keduanya terletak pada kepemimpinan. Tidak ada pemimpin yang menjadi mesiah dalam gerakan keagamaan, sedangkan adanya seorang mesiah itu penting bagi gerakan milenarian. Oleh karena itu, tidak seperti gerakan milenarian, gerakan keagamaan tidak pernah memuncak menjadi pemberontakan.

Ada dua tipe gerakan keagamaan dalam sejarah Jawa. Pertama, gerakan sinkretis, gerakan abangan anti-ortodoksi. Gerakan ini misalnya terdapat dalam gerakan Agama Jawa. Kedua, gerakan ortodoksi, biasanya berupa gerakan puritan dalam arti disiplin beragama yang sangat keras. Gerakan revivalisme misalnya terdapat dalam gerakan tarekat yang dipimpin oleh tokoh kharismatik, kyai atau haji. Sementara itu, gerakan Rifa'iyah yang didirikan oleh Haji Rifa'i yang dibuang Belanda ke Ambon pada 1859 termasuk gerakan sektarian ini. Rifa'iyah menentang Belanda, dan menganggapnya kafir. Gerakan Rifa'iyah juga menentang Jawaisme: melarang wayang, gamelan, dan adat.



GERAKAN SAREKAT ISLAM LOKAL. Pada awal abad ke-20, Jawa sedang mengalami perubahan: perluasan perkebunan, urbanisasi, pertumbuhan birokrasi kolonial, perkembangan sistem komunikasi. Ini mengakibatkan lunturnya nilai-nilai tradisional. Pada situasi semacam itu wajarlah kalau muncul gerakan revivalisme. Gerakan-gerakan semacam itu disebut gerakan Sarekat Islam Lokal.

Gejolak sosial yang terjadi pada 1912-1914 disebabkan oleh adanya gerakan proto-nasionalis itu. Sarekat Islam sebenarnya adalah gerakan modern yang dipimpin oleh elit kota, tetapi ia sering terjatuh menjadi gerakan lokal non-elit.

Contoh dari gerakan Sarekat Islam lokal ialah huru-hara yang terjadi di tanah partikelir Tjakung, Bekasi pada tahun 1913. Tanah sawah itu dimiliki oleh seorang Cina. Para buruh menolak untuk bekerja di tanah itu dengan upah 11 sen dalam setengah hari dan minta kenaikan upah menjadi 25 sen dengan alasan bahwa harga beras naik. Meskipun demikian, para buruh anggota Sarekat Islam itu tetap bekerja dengan upah lama untuk sawah pribumi. Pemilik tanah kemudian mendatangkan polisi untuk mencegah huru-hara.

Sebagai kesimpulan, buku itu menyatakan bahwa pada masa transisi awal abad ke-20 ketika Jawa sedang berubah dari tradisionalisme ke modernisme, ada perubahan-perubahan ideologis. Tetapi, ada elemen-elemen tradisional yang masih lestari.

Michael Adas, *Ratu Adil: Tokoh dan Gerakan Milenarian Menentang Kolonialisme Eropa*. Buku ini membicarakan tokoh-tokoh gerakan Ratu Adil - yang disebutnya nabi. Kelimanya - secara kronologis - adalah Pangeran Diponegoro di Hindia-Belanda (1825-1830), gerakan Pai Maire atau Hau Hau oleh orang Maori di Selandia Baru (1864-1867), Kerusuhan-kerusuhan Birsa di Chota Nagpur, India



Tengah-Timur (1895-1900), pemberontakan-pemberontakan Maji-Maji di Afrika Timur-Jerman, dan kebangkitan Sya San di Birma (1930-1932).

Dari kelima kasus itu, hanya kasus Sya San di Birma yang dipelajarinya secara luas sampai sumber-sumber primer seperti arsip-arsip, sedangkan kasus-kasus lain hanya melalui sumber-sumber sekunder, laporan-laporan pemerintah, dan sumber-sumber yang sudah diterbitkan. Dalam proses pembacaan itu ia harus hati-hati, sebab sumber-sumber resmi pemerintah (Inggris, Belanda, Jerman) sering menyebut setiap pemberontak dengan “bandit” atau “reaksi apologetik”.

Dipilihnya kasus-kasus Asia Tenggara, India, Afrika, dan Selandia Baru terutama karena masyarakat mereka adalah petani sebelum datangnya bangsa Eropa. Lingkungan sosio-budaya kasus-kasus yang dipelajari meliputi wakil-wakil dari “Tradisi Besar” (Islam, Buddha) yang telah mengembangkan sistem politik yang terkonsentrasi, sedangkan masyarakat lainnya terisolir dengan ciri desentralisasi dan *acephalus* dengan campuran hubungan kekeluargaan dan tradisi lokal.

Latar belakang kelima kasus itu pun berbeda. Pangeran Diponegoro (Perang Jawa, 1825-1830) mempunyai latar belakang masuknya kolonialisme Belanda yang mendesak kepentingannya atas Kerajaan Mataram (Yogyakarta), yaitu perubahan dalam pemerintahan dan gaya hidup. Orang-orang Belanda merusak sistem sosio-budaya orang Jawa yang sudah mapan. Terjadilah kerusakan Mataram secara perlahan.

Gerakan Pai Maire dan berakhirnya isolasi Maori di Selandia Baru (1864-1867) berlatar belakang masuknya orang-orang Eropa ke Selandia Baru. Orang Eropa membawa teknologi, tumbuh-



tumbuhan, hewan, dan penyakit. Arus baru itu membawa banyak kerusakan dan perubahan. Orang Maori -berasal dari Polinesia yang datang pada abad ke-10 sampai abad ke-14- hidup dalam suku-suku dengan *hapu* yang menjadi bagian dari suku dan terdiri dari satu kerabat yang hidup dalam desa yang sama. Kontak pertama orang Maori-Eropa terjadi dalam tahun 1790-an. Waktu itu orang Maori bergembira dengan kedatangan orang Eropa yang tinggal di luar tanah adat mereka, Mereka pun segera terlibat dalam perdagangan dan menerima dengan baik para misionaris Kristen. Akan tetapi, orang Maori berubah sikap ketika orang Eropa mulai mendaku tanah tradisional mereka. Kekecewaan itu melahirkan gerakan Pai Maire pada pertengahan 1860. Gerakan itu dipimpin oleh nabi - Ratu Adil - Te Ua Hau. Pada 1866 Te Ua ditangkap. Gerakan itu kemudian dipimpin oleh nabi baru hingga tahun 1870-an ketika gerakan itu tidak lagi efektif.

Kebangkitan Munda dan Birsa di Chota Nagpur (India Tengah-Timur) terjadi pada 1890-1900. Masyarakat Munda di dataran tinggi yang bertani terdesak oleh migrasi orang Hindu dari dataran rendah. Raja dan orang-orang istana Hindu menjadikan orang-orang Munda sebagai pelayan-pelayan yang menopang hidup mereka. Di samping itu, orang-orang Hindu yang diberi hak atas tanah justru memeras masyarakat Munda dengan cara menarik pajak yang tinggi. Orang-orang Munda, dengan teknologi dan organisasi yang tidak memadai, melakukan protes sosial. Inggris yang mengklaim atas Chota Nagpur pada 1795 hanya menjadi faktor kerasnya perlawanan itu, sebab penguasa Inggris dengan *Pax Britannica* yang berbasis di dataran rendah sering mengirim pasukan untuk memadamkan kerusuhan-kerusuhan. Pada 1890-an pemberontakan



besar di bawah Birsa Munda - seorang nabi - menyerang pos misionaris di Chota Nagpur.

Orang Afrika Timur-Jerman pada abad ke-19 mengalami banyak perubahan. Orang Eropa yang semula hanya berdagang di Zanzibar dan kota-kota pelabuhan ingin membentuk koloni Afrika yang menentang dari Zambesi sampai Sungai Nil. Pada awal 1885 timbul kerusuhan Maji-Maji dan pada 1891 Jerman menerapkan kontrol langsung. Pemberontakan Maji-Maji berlangsung sampai 1907 ketika Jerman berhasil menangkap dan membunuh para pemimpin Maji-Maji.

Terakhir dibicarakan ialah pemberontakan di Birma-Inggris di bawah Sya San pada 1930-1932. Kontrol Inggris atas Birma terjadi setelah Inggris mengalahkan Raja Birma di tahun 1886. Inggris menerapkan ekonomi pasar yang berbasis para petani kecil. Maka, para pedagang dan administrator Inggris, orang India serta rentenir dan buruh Cina, dan calo beras Birma bergabung dan menjadikan Birma yang semula subsisten menjadi terlibat dalam ekonomi dunia. Transformasi ini menyebabkan para petani Birma memproduksi surplus yang meningkatkan pendapatan dan standar hidup yang lebih tinggi. Timbul juga lapisan elit berpendidikan yang mengobarkan nasionalisme Birma. Di bawah Sya San, yang lebih sebagai seorang nasionalis ketimbang seorang nabi, menyerukan perlawanan. Mereka menuntut kembalinya firma yang gemilang di masa lalu.

Tanpa melihat uraiannya yang sangat rinci, Adas menyimpulkan bahwa penyebab timbulnya para nabi ialah: (1) transformasi kolonial dan deprivasi relatif, dan (2) tiadanya alternatif. Kesimpulan umum buku ini lebih luas daripada sekedar soal kausalitas, tetapi meliputi visi milenarian masing-masing tokoh, jalannya pemberon-



takan, mobilisasi massa, dan dampak dari pemberontakan-pemberontakan terhadap penduduk dan penyelesaiannya.

Barrington Moore, Jr., *Social Origin of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in The Making of The Modern World*. Buku ini membuat generalisasi hubungan antara pemilik tanah dan petani dalam menuju dunia modern. Dia membuat perbandingan Inggris, Perancis, Amerika, Jepang, China, dan India. Dari perbandingan itu disebutkannya bahwa ada tiga jalan menuju dunia modern, yaitu demokrasi (Inggris, Perancis, Amerika), Fasisme (Jepang), Komunisme (China). Adapun India menempuh jalan bukan demokrasi, fasisme, atau komunisme. Moore mengusulkan *compulsory democracy* mendekati komunisme.

DEMOKRASI: REVOLUSI BORJUIS. Demokrasi bertujuan (1) mengecek penguasa, (2) menggantikan penguasa yang sewenang-wenang dengan penguasa yang adil dan rasional, dan (3) berusaha memperoleh bagian bagi penduduk untuk ikut dalam pemerintahan.

INGGRIS. Demokrasi diuntungkan pertumbuhannya karena di Inggris absolutisme monarki mengalami kegagalan. Aristokrasi yang cenderung mengarah pada usaha komersial berhasil menghentikan absolutisme melalui *The Glorious Revolution* (1688), pemerintahan Parlemen kemudian dikukuhkan. Raja hanya menjadi simbol belaka dan tidak dapat melindungi petani terhadap aristokrasi. Sejak saat itu sampai akhir perang-perang Napoleon pada awal abad ke-19 menjadi abad-abad kejayaan kaum aristokrat. Dengan meneruskan kebijakan *enclosure* (pemagaran) yang dilakukan sejak abad ke-16 aristokrasi merugikan petani lantaran petani harus kehilangan hak atas tanah umum milik desa. Para petani diberi kebebasan memilih:



pergi ke kota dan bergabung dengan borjuasi, atau tetap di desa menjadi petani dengan mengakui hak-hak bangsawan. Pada abad ke-18 Parlemen yang terdiri atas bangsawan dan borjuasi dari *the rotten borough* (kota kumuh) mengekang pertumbuhan *enclosure* dari para bangsawan. Akibatnya, secara gradual tumbuhlah demokrasi.

PERANCIS. Di Perancis para elit pemilik tanah praktis memberi petani secara *de facto* menjadi pemilik tanah. Akan tetapi kaum bangsawan menarik pajak lebih banyak. Akibatnya sebagian besar petani menjadi revolusioner. Dorongan untuk menjadi komersial bagi aristokrasi juga lemah, sehingga Revolusi (1789) dengan mudah melumpuhkan para aristokrat, dan jalan demokrasi parlementer terbuka. Revolusi Perancis telah menghapus hak-hak istimewa aristokrasi, yaitu monarki, aristokrasi bertanah, dan hak-hak istimewa elit bertanah lainnya. Dengan kata lain, seluruh komponen *ancien régime* jatuh, digantikan oleh hak milik pribadi dan kesamaan di depan hukum. Dorongan utamanya datang dari kaum borjuis dan kapitalis - terutama borjuasi Paris atau *san culottes* yang radikal di bawah kepemimpinan Robespierre. Akan tetapi, kemudian petani menghentikan pasokan makan dan dukungan. Dengan demikian petani berhasil mengendalikan arah Revolusi.

AMERIKA. Pertanian besar (perkebunan kapas yang diekspor ke Inggris) dengan perbudakan menjadi faktor penting bagi tumbuhnya kapitalisme, namun institusi perbudakan itu menghambat tumbuhnya demokrasi. Perang Saudara (*Civil War*) 1861-1865 menghilangkan sebagian besar hambatan itu. Kemenangan Republikan Radikal yang anti-perbudakan - abolosionis - dari Utara yang industrial, kapitalis, dan demokratis berhasil mengakhiri perbudakan. Kemenangan Utara adalah kemenangan kapitalisme industrial melawan elit pertanian komersial yang reaksioner. Dari kemenangan



itu demokrasi tumbuh, sekalipun tidak sekaligus berarti perbaikan nasib dari lapisan terbawah masyarakat (eks-budak).

FASISME: REVOLUSI DARI ATAS. Feodalisme ada di Jepang - sama seperti di Barat - tetapi feodalisme itu disertai dengan loyalitas pada atasan dan penguasa adikodrati. Di sini aristokrasi berhasil mengekang tenaga kerja pertanian dengan memberi kesempatan petani untuk tumbuh menjadi kelas komersial. Maka, aristokrasi Jepang yang konservatif dan mempunyai tradisi militer yang agresif mendapat dukungan petani sebagai basis massanya. Pada tahun 1600 seorang aristokrat, Tokugawa Ieyasu, berhasil memenangkan perang antar-bangsawan. Semasa *shogun* Tokugawa, Jepang mengalami kedamaian. Di bawah pemerintahan Tokugawa, perdagangan berkembang. Akan tetapi bagi para prajurit (*samurai*) secara resmi dikenakan larangan untuk terlibat dalam kegiatan komersial, dengan alasan para *samurai* hidup dari pajak petani. Namun, larangan itu tak pernah diindahkan. Larangan itulah yang membuat para *samurai* membenci otoritas Tokugawa. Pemerintahan Tokugawa berlangsung sampai Restorasi Kekaisaran (1868). Kelas feudal dengan dukungan para *samurai* menyingkirkan Tokugawa dan mendudukkan kembali Kaisar. Selama berkuasa, Kaisar Meiji (1868-1912) menghadapi dua persoalan, yaitu sentralisasi negara dan memajukan industri. Hasilnya ialah Fasisme, revolusi dari atas.

KOMUNISME: REVOLUSI PETANI. China mempunyai pemerintahan birokratis dengan 'Mandat dari Langit'. Pemberontakan kepada penguasa dibenarkan, tetapi tidak ada lembaga yang mempunyai hak istimewa. Di sini kaum aristokrat tidak mempunyai dorongan untuk



menjadi kelas komersial, karena mereka lebih suka menjadi pejabat kerajaan melalui sistem ujian. Kaum aristokrat bertanah menyerap sebanyak mungkin surplus ekonomi pedesaan dan petani tumbuh menjadi barisan revolusioner. Ketika terjadi pemberontakan Republik (1911) dan kemenangan formal di bawah kaum nasionalis Kuo Min Tang (1927), maka monarki pun mengalami kejatuhannya. China menganut kekayaan pribadi, termasuk petaninya. Ini berarti kapitalisme yang demokratis. Akan tetapi, elit agraria masih berada di atas. Lantaran tak dapat melakukan tindakan yang agresif akibat lemahnya posisi para pemilik tanah, elit agraria pun merasa perlu menggandeng tangan birokrasi Imperial untuk menguasai petani. Maka terbukalah kesempatan bagi petani untuk mendorong negeri itu ke jalan komunis, menuju dunia modern melalui pemberontakan dan revolusi petani.

INDIA. Sejak adanya *Pax Britannica* (1857-1947), Inggris mematikan industri tekstil asli - sektor komersial - di India. Pemerintah Inggris juga berhasil mencegah aliansi antara sektor komersial kota dengan elit bertanah desa yang diuntungkan oleh kehadiran Inggris. Karenanya, pertanian mandek tidak mengalami stimulasi untuk memaksimalkan produksi dan mengubah pedesaan. Pemilik tanah dan pelepas uang menyedot sebanyak-banyaknya surplus pedesaan untuk kepentingan yang tidak produktif. Maka, yang paling dirugikan ialah petani.

Setelah Kemerdekaan (1947) pola di atas terus berlangsung. Di bawah pengaruh Gandhi yang mengidealisir masyarakat desa, ada retorika tentang "pola masyarakat sosialis" dengan pembangunan masyarakat berencana dan pedesaan pun mulai mengalami perubahan tapi tidak radikal. India memang memerlukan kebijakan yang kuat menuju perubahan. Akan tetapi, sebagai akibat dari per-



ubahan yang damai, tidak ada revolusi borjuis, tidak ada revolusi dari atas, tidak ada revolusi komunis, dan tidak ada perubahan. Moore mengusulkan perubahan itu ialah "*compulsory democracy*" seperti dalam komunisme.

Eric R. Wolf, *Peasant Wars of The Twentieth Century*. Buku ini dimaksudkan sebagai penelitian antropologi, namun bahan kajiannya ialah sejarah. Akan tetapi, bukan hanya karena bahan kajiannya sejarah buku itu kita masukkan di sini, tetapi terutama karena pada tiap kasus diceritakan latar belakang sejarah dan proses pemberontakan dan revolusi masing-masing, kemudian baru pada kesimpulan ditarik generalisasinya.

Harapan penulisnya ialah untuk (1) menunjukkan keterlibatan petani dalam pemberontakan dan revolusi; dan (2) buku ini bermaksud menunjukkan *pengulangan* gejala beserta perbedaan masing-masing kasus. Ada enam kasus yang dibicarakan, yaitu revolusi Mexico, revolusi Rusia, revolusi Cina, Viet Nam, Aljazair, dan Cuba. (Buku yang terbit 1969 ini tidak sempat menceritakan peristiwa-peristiwa sesudahnya, terutama keterlibatan Amerika di Viet Nam dan pertentangan antara kelompok militan Islam - disebutnya "Jacobin Islam" - pada pemerintah di Aljazair).

Buku ini menyebut "peasant wars" karena kebanyakan pengikut pemberontakan ialah petani, sekalipun di bawah panji-panji nasionalisme atau komunisme dan inisiatif dipegang borjuasi. Definisi petani yang dipakai ialah "population that are existentially involved in cultivation and make autonomous decisions regarding the process of cultivation".

Gambaran sangat singkat dan tidak memadai di bawah ini akan mengungkap mengapa revolusi bisa terjadi. Tidak akan diungkap-



kan latar belakang sejarah yang panjang, melainkan hanya peristiwa-peristiwa penting yang dekat dengan pemberontakan.

MEXICO. Mexico merdeka dari Spanyol pada 1821. Pada permulaan abad ke-20 selain adanya *hacienda* (perkebunan besar) juga berkembang industri (pertambangan). Penduduknya terdiri dari orang Spanyol, Indian, dan Negro. Banyak pemberontakan telah terjadi. Adapun pemberontakan pada awal abad ke-20 bermula dari pemilik tanah yang liberal, Francisco Madero (1919) yang menentang diktatorisme. Banyak pemberontakan lainnya, di antaranya yang dipimpin oleh Emilio Zapata. Di tempat-tempat yang sudah dibebaskan, kelompok Zapata membagikan kembali tanah *hacienda* kepada petani Indian. Namun, ia dikalahkan oleh kaum Konstitusionalis pada 1915. Sejak itu pemerintah mengadakan pembaharuan agraria dan tenaga kerja.

RUSIA. Sejak Revolusi 1905 terdapat banyak sekali pemogokan dan kerusuhan petani. Keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia Pertama membuktikan lemahnya militer di bawah Tsar. Setelah Tsar dimakzulkan pada 14 Maret 1917, ada dua pihak yang bersaing memperebutkan massa, yaitu Pemerintahan Sementara yang menguasai tentara dan *Soviet* Petrograd yang menguasai jalanan.

Sejak itu kerusuhan terjadi di daerah pedesaan: pertanian besar dikuasai komune petani. Kaum Bolshevik memegang kepemimpinan revolusi. Bolshevik memimpin buruh yang mogok dan tentara yang memberontak. Sementara itu, terbentuk koalisi antara petani, buruh, dan tentara. Revolusi menang, Tentara Merah dibentuk pada 1918. Namun, meskipun kaum Komunis telah berkuasa sampai 1929 pedesaan Rusia yang lama masih ada.



CHINA. Ada tiga golongan besar dalam masyarakat, yaitu birokrat, pemilik tanah, dan petani. Petani Cina mempunyai keunikan tersendiri, berbeda dengan petani lainnya di dunia. Keunikan itu ialah (1) akses kepada tanah berbentuk kepemilikan pribadi yang diperhitungkan dengan uang, (2) mempunyai potensi ke arah mobilitas sosial; ia sendiri atau anak-anaknya dapat memperoleh latihan untuk menjadi birokrat-terpelajar melalui sistem ujian, dan (3) birokrat dan petani sering ada hubungan keluarga lewat suku atau *tsu*. Revolusi Republik (1911) hampir tidak mengubah struktur pedesaan. Kesukuan masih kuat, kadang-kadang seluruh desa terkait satu suku.

Kuo Min Tang (KMT) meneruskan cita-cita republik dengan mendirikan organisasi untuk meningkatkan gerakan reformasi ke arah negara demokratis melalui revolusi melawan kekuasaan para *warlord*. Selain KMT, ada Kung Ch'an Tang atau Partai Komunis Cina (PKC) yang berdiri pada 1921. Kedua partai itu berseteru setelah keduanya bekerjasama, dan pada 1927 KMT mengalahkan PKC. Tetapi keduanya terus berperang.

Belajar dari kekalahan 1927, PKC di bawah Mao Tse-tung beralih strategi, yaitu memobilisasi petani. PKC merealisasikan cita-citanya. Di wilayah yang sudah dibebaskan, PKC mendistribusikan tanah milik tuan tanah kepada petani yang benar-benar menggarap tanah. Strategi itu membawa hasil. Ketika pada 1949 PKC menguasai seluruh negeri, 80 anggota adalah petani.

VIET NAM. Perancis mulai menyerbu Viet Nam pada 1850, tetapi baru pada 1867 Perancis dapat menguasai negara itu. Perancis berusaha meningkatkan ekspor beras dengan memberikan pemilik tanah besar baru dengan jalan mengatur kembali kepemilikan tanah



atau mencari tanah-tanah baru. Selain beras, karet juga menjadi bahan ekspor. Adapun tenaga kerja pertanian direkrut dengan cara paksa. Paling parah ialah di perkebunan karet. Para tuan tanah baru itu tidak hanya terlibat dalam pertanian, tetapi juga dalam manufaktur, perdagangan, dan perbankan. Komersialisasi ini berakibat masuknya Viet Nam dalam pasaran dunia. Maka, runtuhlah kehidupan desa yang bersifat komunal. Ada pemilik tanah besar, tapi tak ada kelas menengah komersial. Industri-industri (tekstil, kereta api, dan lain-lain) berada di tangan orang Perancis, sedangkan perdagangan beras dan kredit berada di tangan orang-orang Cina. Buruh industri memulai pemberontakan, didukung oleh petani.

Revolusi Viet Nam yang pecah pada 1940, dapat dibagi ke dalam tiga fase: Inkubasi (1940-1945), Campur Tangan Perancis (1945-1964), Keterlibatan Amerika (1960-).

ALJAZAIR. Perancis yang berkuasa penuh atas Aljazair pada 1840 memperkenalkan hak milik pribadi, menghapus kepemilikan komunal atas tanah. Perancis menguasai tanah-tanah milik lembaga-lembaga keagamaan. Orang-orang Perancis mendapat bagian dari tanah terbesar yang disita negara, sehingga mereka jadi penguasa atas tanah yang subur. Petani asli Aljazair terusir ke tanah-tanah baru yang belum dibuka. Tanah dikuasai Perancis, di Distrik Oran, misalnya, orang Perancis menguasai 65% tanah (untuk perkebunan anggur), menyisakan 35% untuk orang Aljazair. Inilah faktor utama pemberontakan petani di Aljazair.

CUBA. Revolusi Cuba dimulai pada 1959. Tanah yang kecil dan menghasilkan gula itu semula adalah koloni Spanyol dengan penduduk campuran: Spanyol, Indian, dan Negro. Percampuran ras yang terjadi menghasilkan identitas baru: bangsa Creole. Cuba merdeka



dari Spanyol pada 1898. Kemudian pabrik-pabrik gula dimiliki oleh orang Amerika, dan orang Cuba menjadi buruh tani, menjadi proletariat desa. Ini membuat revolusi “petani” Cuba mempunyai ciri khas.

GENERALISASI. Pengalaman petani menurut Wolf ternyata tidak dapat digeneralisasikan begitu saja, tanpa melihat kondisi spesifik tiap negeri. Namun, dalam kesimpulannya Wolf mencatat, ada hal-hal umum yang patut dikemukakan. Di bawah ini akan dikemukakan dua hal saja dari generalisasi yang ditemukan Wolf. *Pertama*, komersialisasi (kapitalisme, masyarakat pasar, monetisasi) di semua negeri - dengan berbagai variasi - mentransformasikan stigma ekonomi dan masyarakat. Di mana-mana permainan komoditas menimbulkan krisis. Kepala suku, bangsawan bertanah, petinggi digantikan oleh pengusaha, pedagang, politisi, kaum intelektual, dan profesional. Secara ekonomis mula-mula komersialisasi mengancam kepemilikan tanah komunal: penggembalaan, hutan, dan tanah garapan. *Kedua*, kelas menengah revolusionerlah yang menjadi pemicu pemberontakan petani. Sementara petani semula yang sama sekali lumpuh dan hanya bisa jadi korban merespons gerakan revolusioner itu. Petani ternyata memerlukan kekuatan luar untuk bisa bergerak. ***



RAPPROCHEMENT: SEJARAH DAN TEORI SOSIAL

KOOPERASI antara ilmu sejarah dan ilmu sosial akan nampak sebagai kontradiksi. Sejarah berhubungan dengan gejala yang unik, sekali terjadi, dan terikat dengan konteks waktu dan tempat (*ideographic*). Sementara itu, ilmu sosial berusaha mencari hukum umum (*general laws*), terjadi berulang, dan lepas dari konteks waktu dan tempat (*nomothetic*). Sejarawan membicarakan “Revolusi Indonesia”, ilmuwan sosial membicarakan “revolusi”.⁹³

Selain itu, kontradiksi-semu juga terjadi karena sejarah itu *diachronic* sedangkan ilmu sosial *synchronic*. Oleh karena itu sejar-

⁹³ Bagi mereka yang ingin memperdalam masalah ini, baca buku Christopher Lloyd, *Explanation in Social History* (Oxford: Basil Blackwell, 1988), atau secara lebih sederhana buku Peter Burke, *History & Social Theory* (Cambridge: Polity Press, 1992), Bab 1, dan buku Gordon Leff, *History and Social Theory* (Alabama: Achor Book, 1971), Bab-bab 1 dan 2.



wan yang menggunakan ilmu sosial harus punya logika ilmu sosial, artinya ia harus berpikir ganda: sekaligus diakronis dan sinkronis.

Dalam sejarah historiografi di Amerika, ada *The New History* (1912) yang menganjurkan kooperasi antara ilmu sejarah dan ilmu sosial. Demikian pula aliran *Annales* (1929) di Perancis berbuat yang sama. Sejak saat itu *scientific history* (tradisi positivisme Leopold von Ranke) ditinggalkan. Seperti diketahui *scientific history* memilih sastra dan filsafat untuk beraliansi. Sejarah harus *rigorous*, faktual, akurat, *wie es eigentlich gewesen* (apa yang sebenarnya telah terjadi), dan dituturkan dengan baik. Sebaliknya, *The New History* dan *Annales* memilih ilmu sosial. Lucien Levebvre menunjukkan pentingnya psikologi untuk sejarah,⁹⁴ Fernand Braudel menunjuk ilmu-ilmu kemanusiaan, sosiologi, ekonomi, geografi, dan demografi,⁹⁵ dan E. Le Roy Ladurie pada demografi dan geografi.⁹⁶

Subject matter sejarah pun berubah. Sejarah sosial menggantikan sejarah politik. Politik tidak lagi menjadi tulang punggung studi sejarah, sejarah menjadi ilmu yang multidisipliner. (Adapun sejarah politik yang membicarakan raja-raja, perang, dan pemerintahan, kemudian berubah menjadi studi tentang kekuasaan [power]).⁹⁷

Di Indonesia penganjur pertama kooperasi antara ilmu sejarah dan ilmu sosial ialah Sartono Kartodirdjo. Kuliah-kuliahnya di UGM sejak 1967, buku yang ditulis di bawah pimpinannya, *Sejarah Nasio-*

94 Lucien Febvre, *A New Kind of History* (New York: Harper TorchBooks, 1971), Chapter 1.

95 Fernand Braudel, *On History* (Chicago: The University of Chicago Press, 1980), hlm. 55-63, 64-82, 83-90, 105-119, 120-131, 132-164.

96 Emmanuel Le Roy Ladurie, *The Territory of the Historian* (Chicago: The University of Chicago Press, 1979).

97 Jaques Le Goff, "Is Politics Still the Backbone of History?" dalam Felix Gilbert dan Stephen Graubard (eds.), *Historical Studies Today* (W. W. Norton & Company Inc., 1972), hlm. 337-355.



nal Indonesia (6 jilid pada 1970-an), dan buku-bukunya sendiri *Peasant's Revolt of Banten in 1888* (1966) dan *Protest Movements in Rural Java* (1973) menunjukkan kedekatan sejarah dan ilmu sosial. Konsep-konsep ilmu sosial, seperti struktur, fungsi, elit, birokrasi, mobilitas sosial, patron-klien, kelas, dan perubahan sosial, serta *ideal type* Max Weber, seperti patrimonialisme dan birokrasi rasional, memenuhi buku-buku itu. Demikian juga disertasi dan buku-buku yang ditulis murid-muridnya. Pemikiran tentang pendekatan ilmu sosial dalam studi sejarah itu kemudian dibukukan menjadi *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*.⁹⁸ Meskipun demikian, di Indonesia sejarah tetap menjadi bagian dari humaniora, ilmu budaya.

Kooperasi kedua ilmu itu merupakan jembatan ke arah perkembangan selanjutnya (dalam historiografi Amerika dan Perancis), yaitu *social scientific history* (nama lainnya adalah *interdisciplinary history*) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan cara ini sejarah sudah benar-benar menjadi bagian dari ilmu sosial, sejarah adalah ilmu sosial.⁹⁹

Di bawah ini adalah contoh penggunaan sejarah dalam studi ilmu sosial, atau sebaliknya, penggunaan ilmu sosial dalam sejarah, dua mengenai *subject matter* non-Indonesia dan lima mengenai Indonesia - satu di antaranya oleh Indonesianis Belanda. Buku-buku itu ialah M. N. Srinivas, *Social Change in Modern India*,¹⁰⁰ John Demos, *A Little Commonwealth: Family Life in the Plymouth*

98 Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).

99 The Behavioral and Social Sciences Survey, *History As Social Science* (Englewood Cliff, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1971).

100 M. N. Srinivas, *Social Change in Modern India* (Berkeley: University of California Press, [1972] 1984).



Colony,¹⁰¹ Elly Touden-Bouwsma, *Staat, Islam, en lokale leiders in West Madura, Indonesia: Een historisch-antropologische studie*,¹⁰² Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh, 1873-1912*,¹⁰³ Djoko Suryo, *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900*,¹⁰⁴ Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920)*,¹⁰⁵ dan Kuntowijoyo, *Raja, Priyayi, dan Kawula: Surakarta, 1900-1915*.¹⁰⁶

M. N. Srinivas, *Social Change in Modern India*. Meskipun buku ini sebenarnya adalah buku antropologi, tetapi topiknya ialah sejarah mentalitas, yaitu Sanskritisasi dan Westernisasi. Selain itu ada dua hal yang menyebabkan buku itu kita masukkan di sini: (1) topik *social change* adalah juga topik sejarah, dan (2) banyak menggunakan data-data sejarah berupa sensus-sensus.

SANSKRITISASI. Gejala yang menyeluruh di India ialah pembagian masyarakat berdasar model *varna* atau kasta yang berjumlah empat atau lima. Kasta itu adalah Brahmin, Kshatriya, Vaishya, dan Shudra. Kalau Harijan atau *the Untouchable* (Yang Tak Boleh Disentuh) maka jumlah kasta menjadi lima. Model itu tetap, sekalipun kedudukan tiap kasta dapat berubah. Untuk kasta dalam model

101 John Demos, *A Little Commonwealth: Family Life in Plymouth Colony* (New York: Oxford University Press, 1971 [1974]).

102 Elly Touden-Bouwsma, *Staat, Islam, en lokale leiders in West Madura, Indonesia* (Kampen: Uitgeverij Mondiss, 1988).

103 Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh, 1874-1912* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).

104 Djoko Suryo, *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900* (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial UGM, 1989).

105 Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920)* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991).

106 Kuntowijoyo, *Raja, Priyayi, dan Kawula: Surakarta, 1900-1915* (Yogyakarta: Ombak, 2004).



itu masing-masing punya aturan tingkah-laku atau *varna dharma* yang harus dipatuhi dan sudah dibakukan pada $\pm$ 600 BC-300 AD.

Proses Sanskritisasi yaitu ketika kasta Hindu yang “rendah” atau kelompok suku-suku yang “rendah” mengubah adat, ritual, dan ideologi, menuju kasta yang “tinggi”, dan menjadi kasta baru karena mengalami “kelahiran-kedua”. Demikianlah, misalnya, kasta Harijan di Mysore mengklaim diri sebagai Vishmakarman Brahmin dan menolak makanan dari kasta (yang semula) lebih tinggi. Masih dari Mysore, para petani (Okkaligas) dan penggembala (Kurubas) menolak makanan dari Marka Brahmin. “Orang hutan” (penebang) dari suku Coorg mengklaim sebagai Kshatriya dan bahkan bangsa “Arya”. Di tempat lain para tukang (besi, emas, cukur, kayu, air, keranjang, cuci, panen, gembala, peternak babi) juga mengalami Sanskritisasi. (Selanjutnya buku ini penuh dengan contoh yang sangat rinci, tetapi yang tidak disebut di sini). Sanskritisasi itu menjadi sebab dan akibat mobilitas sosial. Meskipun demikian, mobilitas sosial juga sering tidak disertai Sanskritisasi. (Dalam buku itu ada tabel-tabel sensus (1911, 1921, 1931) yang menunjukkan Sanskritisasi).

Adapun Sanskritisasi dapat berbentuk dua model (Brahmin atau Kshatriya) atau empat model (Brahmin, Kshatriya, Vaisya, Shudara) tergantung klaimnya. Model ini diperkaya dengan persaingan antara kasta Kshatriya dan Brahmin yang mengakibatkan naiknya Kshatriya dan turunnya Brahmin. Brahmin hanya menjadi pengikut raja. Jainisme dan Buddhisme disebut-sebut sebagai akibat dari persaingan semacam itu.

Selanjutnya buku itu menulis tentang adanya gerakan yang berusaha menghapus sistem kasta, suatu gerakan puritanisme yang meletakkan kecintaan pada Tuhan sebagai ukuran kemuliaan, bukan



kedudukan ritual seseorang dalam kasta. India jaman pertengahan ada gerakan Bhakti, dan gerakan semacam itu lebih banyak lagi dengan datangnya pemerintahan Inggris di India.

WESTERNISASI. Inggris memperkenalkan teknologi baru, lembaga-lembaga, pengetahuan, kepercayaan, dan nilai yang dibawa dari Barat. Itulah yang menyebabkan terjadinya Westernisasi. Westernisasi ialah perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan kebudayaan India sebagai akibat dari penguasaan Inggris. Jadi ada tiga proses yang bersamaan, yaitu Westernisasi, industrialisasi, dan urbanisasi.

Istilah Westernisasi dipakai, karena konsep itu (bagi India) lebih netral secara etis daripada istilah modernisasi. Istilah itu bersifat inklusif, kompleks, dan mengenai semua lapisan masyarakat. Akibat dari Westernisasi ialah timbulnya Elit Baru, yaitu golongan kecil masyarakat yang mempunyai hubungan dekat dengan penguasa Inggris. Westernisasi yang terjadi dengan adanya *Pax Britannica* dan semakin menjadi setelah 1947.

Implikasi dari Westernisasi ialah gerakan revolusi (nasionalisme mulai pada 1930-an), sekularisasi, dan mobilitas kasta. Sementara Sanskritasi tidak mengakibatkan perubahan struktural tapi hanya pindah posisi, Westernisasi mengakibatkan perubahan struktural, karena Westernisasi memerlukan uang, waktu, usaha, dan kontak dengan orang-orang berpengaruh.

Adanya Gerakan Kelas Terbelakang (*the Backward Classes Movement*) juga dicatat dalam buku itu, di antaranya gerakan Arya Samaj. Gerakan-gerakan itu didukung dengan sejumlah perundangan dari Pemerintah Inggris di India.



John Demos, *A Little Commonwealth: Family Life in Plymouth Colony*. Dalam studi kasus ini terdapat “Foreword” dari pengarangnya yang mengutarakan mengapa ia menulis tentang keluarga, penggunaan ilmu-ilmu sosial, dan metode kuantitatif. Sejarawan biasanya hanya tertarik untuk menulis unit-unit besar, seperti wilayah, partai politik, dan kelas sosial. Ia menulis “lembaga primer” ini karena melimpahnya sumber, berupa artifak fisik, surat wasiat, dan catatan-catatan resmi. Ia menggunakan deskripsi dengan lukisan impresionistik dan “best possible guess”. Juga konsep-konsep interdisipliner (sosiologi, antropologi, demografi, dan psikologi), seperti keluarga, struktur, *extended family*, *nuclear family*, penjenjangan umur, dan diferensiasi sosial. Dalam analisis ia menggunakan inferensi statistik (Ada tabel data-data demografis di bagian apendiks).

Kemudian buku ini menceritakan secara singkat sejarah koloni Plymouth di Amerika. Dengan menumpang kapal Mayflower pada 1620 sebanyak 102 orang tiba di tempat baru, Plymouth. Mereka adalah anggota jamaah gereja Puritanisme (Anglicanisme), tapi dengan kepercayaan khusus. Komunitas itu terbentuk pada periode awal abad ke-17, 150 mil di utara kota London. Karena tekanan-tekanan yang semakin kuat, mereka menyingkir ke Holland pada 1607, mula-mula ke Amsterdam kemudian pindah ke Leiden.

Mereka menandatangani perjanjian untuk membentuk sebuah “Civil Body Politic” di New World, lengkap dengan pemerintahan (kepalanya disebut Gubernur) dan pengadilan. Secara formal negara dan gereja terpisah, namun dalam praktik keduanya jadi satu, karena kehadiran di gereja (anggota dan bukan-anggota) diwajibkan oleh undang-undang.

Semula hubungan para pendatang dengan Indian, suku Wampanong, sangat baik. Masalah-masalah perbatasan dan ternak yang



melampaui wilayah selalu dapat diselesaikan. Tidak ada masalah dengan perluasan wilayah. Tetapi, hubungan itu semakin memburuk ketika ada keperluan terus-menerus untuk ekspansi, sebab para pendatang terus bertambah. Konflik dengan Indian tak terelakkan. Indian menyerang kota Seanssea pada 1675. Peperangan pun terjadi dan menyeret suku-suku Indian yang lain serta koloni yang lain di seluruh New England. Pada 1691 Tahta Inggris memutuskan untuk menganeksasi Plymouth (dan seluruh Massachusetts Bay). Selesailah sebuah mitos bagi bangsa Amerika.

Buku itu sendiri berisi tiga bagian, yaitu setting fisik (perumahan, perabot rumah tangga, pakaian), struktur rumah tangga (keanggotaan, suami dan isteri, tuan dan pembantu, hubungan kekerabatan), dan tema-tema perkembangan pribadi (masa bayi dan anak-anak, masa dewasa, masa tua). Kali ini kita tidak membicarakan secara detil isi buku itu - menarik tapi kurang relevan. Cukuplah temuan-temuan di bawah ini.

Simpulan buku itu mengatakan bahwa keluarga di Plymouth Colony mempunyai kemiripan dengan Amerika masa kini, yaitu keluarga pada dasarnya adalah *nuclear family*. Selanjutnya dikatakan bahwa keluarga adalah (1) "bisnis", dalam arti agen ekonomi, produksi, dan penukaran yang memberikan kebutuhan-kebutuhan materiil, (2) "sekolah", sebab ayah dan kepala rumah tangga bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya, setidaknya sampai dapat membaca Kitab Suci, (3) "lembaga pendidikan" yang menyiapkan anak-anak untuk masuk ke sistem ekonomi, (4) "gereja", sebab setiap keluarga bertanggung jawab atas agama anak-anak, (5) "lembaga pemasyarakatan" karena keluarga orang-orang kaya dapat ditunjuk oleh Pengadilan untuk menjadikan para pelanggar hukum sebagai "pembantu" di rumahnya, dan (6) "lembaga kemak-



muran” yang memberikan bermacam-macam pelayanan kepada anggota keluarga.

Elly Touwen-Bouwsma, *Staat, Islam en Lokale Leiders in West Madura, Indonesia: Een Historisch-Antropologische Studie*. Bagian 1 buku ini berisi penelitian lapangan antropologi di desa Beru, Sampang, Madura Barat. Setelah mendeskripsikan mengenai desa Beru (letak dan setting alam, keadaan tanah, data kependudukan, mata pencaharian, pemerintahan, stratifikasi sosial) dan kelompok-kelompok sosial (kekeluargaan dan keagamaan, orang-orang tua, kyai desa, aparat desa) sampailah buku ini pada penelitian sejarah-antropologi.

Sebagai layaknya penelitian lapangan antropologi, di bagian akhir buku ini ada peta-peta, ada diagram kekeluargaan petani, aparat desa, dan kyai, serta ada tabel-tabel (demografi, pemilikan tanah, pemilikan ternak, dan pembagian satus sosial-ekonomi penduduk).

Sebagai penelitian sejarah dengan perspektif antropologi (penelitian arsip dan lapangan) buku ini membicarakan tentang sejarah politik sampai di tingkat desa, raja di ibu kota Bangkalan dan desa Beru di Sampang (Bagian 2). Ada pembicaraan sekitar kekuasaan raja-raja, perubahan-perubahan oleh kekuasaan kolonial, dan akhirnya kejadian-kejadian sesudah kemerdekaan (sampai 1980), terutama dengan peran NU di pedesaan Madura.

Dimulai dengan menggambarkan kekuasaan raja-raja Bangkalan (1750-1885) dan hubungannya dengan Islam. VOC membangun benteng dekat keraton. Belanda berusaha mempengaruhi para bangsawan yang akan menjadi raja. Pada 1831 terbentuklah tentara Barisan oleh Pemerintah Kolonial dengan merekrut para saudara dan keluarga raja.



Sistem yang dipakai untuk membiayai adiministrasi kerajaan - sama dengan di Jawa - ialah apanage. Keborosan raja-raja, keluarga raja, dan seluruh administrasi kenegaraan menyebabkan kebanyakan tanah tergadai pada orang-orang kaya, Cina dan pribumi. Mereka berhutang pada orang-orang kaya dan jatuh miskin. Maka, pada 1885 Pemerintah Kolonial secara definitif melikuidasi kerajaan Madura, dan meletakkan di bawah kekuasaan kolonial.

Hubungan dengan Islam terjadi karena pada masa pemerintahan raja Sultan Cakraningrat VIII (1815-1847) agama Islam berkembang. Ia merayakan hari-hari besar Islam, demikian juga ritual-ritual Islam yang lain selalu diselenggarakan. Sementara itu pada abad ke-19 jumlah orang Arab juga bertambah di Madura Barat (lebih-lebih di Sumenep). Di seluruh Madura Barat (Bangkalan dan Sampang) pada abad ke-18 dan ke-19 ada sebanyak 16 desa *perdikan* - pada umumnya ialah pesantren, di mana perdikan pesantren Batu Ampar dan Prajan menjadi pusat agama Islam. Sementara itu pada akhir abad ke-19 tarekat (Qadiriyyah dan Naqshabandiyah) juga berkembang dan banyak bangsawan yang tergabung. Di antaranya karena khawatir bahwa akan ada persatuan antara elit birokrasi pribumi dengan elit agama di pedesaan, maka Pemerintah Kolonial menghapuskan pemerintahan pribumi pada 1885.

Pada 1895 terjadi pemberontakan di pesantren Prajan. Dan sejak itulah sejarah Madura (termasuk sesudah 1945) adalah sejarah integrasi dan konfrontasi antara birokrasi dan Islam, elit birokrasi dan elit agama. Itu terjadi bahkan sesudah kehadiran Nahdlatul Ulama (NU) di Madura Barat.

Djoko Suryo, *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900*. Buku yang terdiri dari delapan bab (termasuk "Pendahuluan"



dan “Kesimpulan”) ini berusaha mendeskripsikan dan menganalisis perubahan sosial yang terjadi di pedesaan Semarang. Di setiap bab terdapat tabel-tabel data statistik, demikian pula di bagian akhir buku ini masih ada banyak sekali apendiks berisi tabel-tabel yang rinci per kabupaten, bahkan per distrik.

Buku ini dimulai dengan meninjau apakah tesis antropologis Clifford Geertz tentang adanya “involusi pertanian” di daerah perkebunan tebu di Jawa berlaku juga di Semarang tempat adanya terutama perkebunan kopi dan sedikit tebu. Asumsi Geertz ialah ada simbiose yang saling menguntungkan antara tanaman tebu dan padi, sehingga lahan yang semakin sempit itu pun dapat menampung penduduk yang semakin bertambah. Akibatnya ialah adanya *shared poverty* di daerah penanam tebu yang digalakkan oleh Pemerintah Kolonial dengan Tanam Paksa. Kesimpulan Geertz itu sudah dibantah dengan penelitian-penelitian di daerah penanaman tebu yang lain. Tetapi, apakah kopi atau tebu mengakibatkan perubahan demografis di Semarang? Di tingkat distrik ternyata tidak ada hubungan antara penanaman kopi atau tebu dan perubahan demografis pada masa Sistem Tanam Paksa. Kalau tidak ada pasti ada sebab-sebab lain yang mengakibatkan perubahan.

Perubahan itu harus dicari sampai tingkat desa. Bab III buku ini menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan administratif di tingkat desa menyebabkan beban berat penduduk karena sewa tanah dan *heerendiensten* telah mengakibatkan perpindahan penduduk. Bab IV mendeskripsikan pertumbuhan jaringan transportasi berupa pembukaan jalan-jalan baru dan rel kereta api. Secara positif, akibat dari tersedianya jaringan transportasi baru ialah tumbuhnya desa-desa baru dan petani dirangsang memproduksi untuk memenuhi ke-



butuhan pasar. Namun, akibat negatifnya ialah membanjirnya barang-barang impor dari luar.

Rupanya, bagi pedesaan di Semarang, akibat negatiflah yang terjadi. Bab V menceritakan nasib pedesaan Semarang ketika sudah menjadi bagian dari ekonomi dunia. Ketika ekonomi dunia mengalami krisis, maka pedesaan Semarang pun mengalami kemerosotan ekonomi. Meskipun pemerintah membuka banyak pekerjaan umum yang mendatangkan pendapatan bagi penduduk desa, tetapi masih ada kerja wajib yang sangat membebani penduduk desa. Lagi pula ada kebijakan baru yang merugikan: penanaman candu, perjudian, dan rumah gadai.

Bab VI bercerita tentang banyaknya penyakit yang melanda pedesaan Semarang. Penyebabnya ialah sanitasi yang buruk di pedesaan, mudahnya penyakit menular lewat jaringan transportasi, dan konsentrasi pengelolaan kesehatan di kota-kota (terutama tempat tinggal orang Belanda). Akibatnya, emigrasi dari desa-desa di Semarang tidak terelakkan. Bab VII menceritakan saluran-saluran keluar berupa kriminalitas (kecu, maling, pembajak (*begal*), judi, candu). Juga tentang terbukanya katup rasa aman sosial berupa perkembangan gerakan-gerakan nasional antikolonial serta gerakan tarekat (Naqshabandiyah).

Kesimpulan umum buku ini ialah, perubahan-perubahan demografis tidak disebabkan oleh faktor ekonomi (Sitem Tanam Paksa) tetapi oleh sebab-sebab non ekonomis. Demikian pula perubahan sosial-ekonomi (kemelaratan, kebodohan, keterbelakangan) di satu pihak, dan munculnya elit desa di lain pihak.

Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920)*. Dari buku ini dapat terlihat dengan jelas bahwa



ilmu-ilmu sosial sangat berguna untuk mendeskripsikan masyarakat desa tradisional dan hubungan horisontal dan vertikalnya. Tanpa penguasaan teori sosial, topik-topik tentang apanage, bekel, status sosial, perubahan sosial, mobilitas sosial, elit pedesaan, dan keresahan sosial tidak akan menjadi jelas. Pendek kata *the logics of social sciences* sangat diperlukan dalam penulisan sejarah yang sangat kompleks, seperti topik tentang perubahan sosial itu.

Sistem apanage kerajaan-kerajaan tradisional menyatakan bahwa seluruh tanah adalah milik raja. Ada desa-desa khusus untuk raja (desa *pangrembe*). Selain itu raja memberikan gaji kepada keluarga serta pegawai raja dan kerajaan berupa *apanage* (desa, tanah, dan penduduknya). Pada gilirannya seorang pemegang apanage (disebut *patuh*) mengangkat seorang *bekel*, penarik pajak, untuk tiap desa. Para bekel di desa yang besar diawasi oleh seorang *demang*.

Buku ini memberikan deskripsi dan analisis ketika desa-desa berubah statusnya dari desa di bawah kerajaan tradisional menjadi desa agro-industri di bawah sistem kapitalis, sesudah Perang Diponegoro, 1830-1920. Dalam perkembangan politik (Bab III) itu diceritakan reaksi beberapa lapisan sosial, seperti bangsawan, elit agama, dan petani, serta munculnya Sarekat Islam dan gerakan-gerakan radikal. Bab IV menceritakan akibat-akibat dari perubahan sosial, seperti liberasi tanah, komersialisasi tenaga kereja, ekonomi petani, dan perubahan kekuasaan bekel. Bab V melukiskan keresahan-keresahan sosial yang terjadi di pedesaan Surakarta, yaitu gerakan-gerakan sosial (gerakan mesianisme, gerakan keagamaan (revivalisme Islam, mileniarisme Jawa, nativisme anti-asing) dan kriminalitas (kecu, begal, pembunuhan, pembakaran, pencurian ternak).



Transformasi struktural terjadi di pedesaan ketika Pemerintah Kolonial menghapuskan sistem apanage, pembentukan pemerintahan desa, dan bekel menjadi kepala desa.

Kuntowijoyo, *Raja, Priyayi, dan Kawula: Surakarta, 1900-1915*. Buku pendek ini adalah sejarah kejiwaan (*psychohistory*) tentang raja, sejarah mentalitas tentang priyayi dan kawula, dan sejarah sensibilitas tentang ketiganya. Asumsi teoretis yang dipakai berdasar ilmu budaya dan sosiologi pengetahuan, bahwa manusia tidak secara langsung melihat realitas, tapi melalui budaya atau melalui tafsir bersama atas realitas itu. Demikianlah, raja, priyayi, dan kawula melihat satu terhadap lainnya melalui simbol-simbol.

Dimulai dengan deskripsi tentang simbol pribadi dan publik yang dimiliki oleh raja, simbol para priyayi, dan ketidakpunyaan simbol kawula. Raja mempunyai *world image* (yang keliru) bahwa dialah yang berkuasa. Priyayi mempunyai *political mysticism* terhadap raja, sementara mereka melihat kawula sebagai wong cilik. Kawula yang berada di tangga sosial terbawah dan tak sanggup membayar “ongkos perubahan kota” hanya bisa mempunyai *counter culture*, berupa mimpi, ilusi, dan halusinasi.

Ketika muncul lembaga-lembaga, priyayi bergabung pada Abipraya (± 1900) dan Boedi Oetomo (1908) yang afirmatif pada raja, stratifikasi sosial, dan penguasa kolonial. Sementara rakyat pada Sarekat Islam (1911) bersikap afirmatif terhadap raja tetapi kritis pada stratifikasi sosial dan kekuasaan kolonial. Namun, ketika pada 1915 ada peristiwa perkawinan raja yang kedua kalinya (permaisuri pertama tidak menghasilkan anak laki-laki), baik priyayi maupun kawula merayakannya, sebagai simbol nasionalisme Jawa. ***



KUANTIFIKASI

PENTINGNYA inferensi (kesimpulan) dan metode statistik untuk penjelasan sejarah sudah dikemukakan dalam Bab I. William O. Aydelotte (sejarawan Amerika) mengatakan bahwa kuantifikasi dalam studi sejarah berguna untuk memverikasikan generalisasi (pernyataan-pernyataan umum).¹⁰⁷ Selanjutnya, ia mengatakan bahwa dengan kuantifikasi berakhirlah sejarah yang impresionistik. Pernyataan-pernyataan yang mengandung generalisasi - generalisasi faktual - seperti “signifikan”, “meningkat”, “menyebar”, dan “tipikal”, sebenarnya adalah pernyataan kuantitatif. Dengan kuantifikasi pernyataan-pernyataan yang kabur itu bisa diukur secara persis.

¹⁰⁷ William O. Aydelotte, “Quantification in History” dalam Robert P. Swierenga (ed.), *Quantification in American History: Theory and Research* (New York: Atheneum, 1970), hlm. 75.



Namun, tidak semua jenis penulisan sejarah memerlukan kuantifikasi. Sejarah pemikiran dan sejarah kejiwaan, misalnya, tidak dapat dikuantifikasikan. Pendek kata, semua yang berhubungan dengan kesadaran manusia, tidak akan dikuantifikasikan. Kalau kesadaran dikuantifikasikan, itu berarti menafikan nilai-nilai kemanusiaan, sebuah dehumanisasi. Dalam sejarah, dehumanisasi tidak mungkin terjadi.

Tetapi, dalam ilmu sosial lainnya dehumanisasi dimungkinkan. *Attitude*, misalnya, dapat dikuantifikasikan. Sejarah, sebaliknya, yang hanya menggunakan statistik secara terbatas (*descriptive statistics* bukan *predictive statistics*) tidak mungkin melakukan dehumanisasi. Perbedaan antara *descriptive statistics* dan *predictive statistics* terletak dalam jenis statistik yang digunakan. *Descriptive statistics* hanya berkisar seputar teknik untuk mendeskripsikan data dalam angka, yaitu distribusi, pengukuran hubungan antara dua variabel (korelasi, regresi), *content analysis*, dan *time series* (termasuk korelasi dan regresi dalam *time series*). Sementara itu, *predictive statistics* sangat berguna dalam penelitian eksperimental, terutama untuk mengukuhkan generalisasi, tetapi sedikit saja relevansinya untuk penelitian sejarah. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran akan sejarah yang *dehumanized*, sejarah tidak menafikan unsur manusia.

Bahkan untuk sejarah Indonesia kekhawatiran semacam itu semakin tidak beralasan. Sejarah politik, misalnya, di tempat lain bisa dikuantifikasikan, tetapi di Indonesia tidak. Perilaku pemilih Indonesia tidak rasional. Mobilitas sosial berpengaruh pada perilaku pemilih di dunia Barat, tetapi di Indonesia tidak. Mobilitas sosial tidak ada hubungannya dengan perilaku pemilih. Sebaliknya,



pemilih dipengaruhi oleh *charismatic politics*, *patron-client politics*, dan *politics of meaning*.

Keterbatasan itu masih harus ditambah lagi dengan masalah teknis. Sejarah sosial di Indonesia (terutama di Vorstenlanden) data-data statistik tidak tersedia. Dari buku Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, kita tahu bahwa alokasi tanah apanage dan penduduk di dalamnya tidak mencantumkan angka-angka nominal, tetapi dengan ukuran tradisional (*jung* untuk tanah, *cacah* untuk jumlah penduduk, sekalipun para peneliti Belanda kemudian bisa menominalkan). Data statistik hanya ada pada tahun-tahun tertentu - berkat para peneliti - tetapi tidak dari tahun ke tahun. Akibatnya, kita tidak tahu presis apa yang terjadi setiap kali tanah dipecah lantaran semakin banyak orang yang mendapat alokasi, misalnya sampai berapa jauh secara angka proses pemiskinan. Juga kita tidak tahu angka-angka dari setiap jenjang sosial ketika patrimonialisme tradisional digantikan oleh kapitalisme Barat.

Berbeda dengan daerah Vorstenlanden, untuk sejarah sosial di daerah Gubernemen data-data statistiknya tersedia sesudah adanya Sistem Tanam Paksa. Data-data statistik itu dapat kita lihat, misalnya, dalam buku Djoko Suryo, *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900*. Kewajiban penduduk untuk menanam kopi dan tebu, misalnya, tersedia dari tahun ke tahun sampai tingkat distrik. Hubungan berat-ringan kewajiban menanam dengan perpindahan penduduk juga tersedia. Demikian pula angka demografis tiap distrik.

Untuk sejarah Eropa kelangkaan data hampir-hampir tidak ada. Data statistik bahkan menjangkau sampai Abad Tengah. Maka, metode kuantitatif tidak mengalami kendala apa pun. Oleh karena



itu, kata E. Le Roy Ladurie, yang penting bukan metodenya tetapi pertanyaannya.¹⁰⁸ Bahkan dengan optimistis dikatakan oleh Ladurie (sekitar 1970) yang banyak menggunakan analisis statistik, “sejarawan di masa depan haruslah seorang programmer, atau dia tidak akan jadi sejarawan”. Tetapi, karena ekses penggunaan statistik di masa lalu itu, Ladurie sendiri - menjelang 1980 - menolak penggunaan komputer yang berlebih-lebihan dan sejarah haruslah tetap jadi “ketrampilan seni”. Demikian juga Lawrence Stone (sejarawan Amerika) menyatakan bahwa komputer harus digunakan bila tidak terelakkan.¹⁰⁹ Perlu dicatat bahwa kekhawatiran itu terletak pada *craftmanship* ilmu sejarah, tidak pada dataran filosofis (dehumanisasi).

Sekalipun terdapat baik optimisme maupun peringatan-peringatan akan eksesnya, pentingnya statistik untuk sejarawan tidak dapat dipungkiri, terutama untuk menganalisis data sejarah yang banyak dan jangka waktu yang panjang. Untuk metode statistik kiranya sejarah Indonesia kontemporer menyediakan data statistik yang hampir-hampir tidak terbatas kalau kita pandai mencarinya. Tinggal lagi - seperti kata Ladurie - apakah kita sendiri dapat mengajukan pertanyaan yang tepat.

Berikut ini adalah contoh-contoh penggunaan statistik dalam artikel-artikel sejarah. Di dalamnya sejarawan Indonesia akan tahu keuntungan dan keterbatasan statistik. Di sini hanya akan ditunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, kemudian penggunaan statistiknya. Sejarah memang unik, sekali terjadi, tidak terulang. Tetapi, pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipecahkan melalui statistik dapat pula jadi pertanyaan di tempat dan waktu lain.

108 E. Le Roy Ladurie, *The Territory of the Historian* (Chicago: The University of Chicago Press, 1979).

109 Daniel Herlihy, “Numerical and Formal Analysis in European History” dalam Theodore K. Rabb dan Robert I. Rotberg (eds.), *The New History: The 1980s and Beyond* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1982), hlm. 115.



Artikel-artikel itu semuanya berasal dari tiga buku, yaitu William O. Aydelotte *et al.* (eds.) *The Dimensions of Quantitative Research in History*,¹¹⁰ Robert P. Swirengga (ed.) *Quantification in American History: Theory and Research*,¹¹¹ dan Y.M. Yeung & C.P. Lo, *Changing South-East Asian Cities: Reading on Urbanization*.¹¹² Artikel-artikel yang berasal dari perbendaharaan sejarah non-Indonesia hanya mempunyai nilai *heuristic* (memberi petunjuk) ke arah penulisan. Semuanya dipilih yang kira-kira *replicable* dalam kesempatan lain, dalam hal jenis pertanyaan, dan tentu saja dalam metodenya. Pada dua artikel yang berasal dari sejarah Amerika, pertanyaan yang dikemukakan dapat diterapkan dalam sejarah Indonesia, sedang artikel lainnya mengenai sejarah kota di Asia Tenggara mempunyai nilai pada artikel itu sendiri.

Stephan Thernstrom, "Religion and Occupational Mobility In Boston, 1860-1963" dalam William O. Aydelotte *et al.*, *The Dimensions of Quantitative Research in History*, hlm. 124-158. Artikel ini kita pilih dengan harapan bahwa artikel serupa muncul dalam sejarah Indonesia. Apakah agama dan etnisitas menentukan jenis pekerjaan seseorang di kota-kota? Korelasinya berapa? Bagaimana mobilitas kerja mereka? Kapan ada perubahan jenis kerja? Data agama seseorang tersedia dalam sensus, KUA, register gereja, catatan sipil, dan dengan mudah orang melakukan interview. Adakah hubungan antara tingginya perolehan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) pada

¹¹⁰ William O. Aydelotte *et al.* (eds.), *The Dimensions of Quantitative Research in History* (Princeton: Princeton University Press, 1972).

¹¹¹ Robert P. Swierengga (ed.), *Quantification in American History: Theory and Research* (New York: Atbeneum, 1970).

¹¹² Y. M. Yeung & C. P. Lo, *Changing South-East Asian Cities: Readings on Urbanization* (Singapore: Oxford University Press, 1976).



Pemilu 2004 (+7%) dengan mobilitas pekerjaan santri muda? Adakah hubungannya dengan tingkat urbanisasi karena di Jakarta teratas, sedangkan di kota-kota yang lebih kecil tidak demikian?

Tulisan ini dirangsang oleh tesis Max Weber tentang “the Protestant ethic” dan “spirit of capitalism”. Pertanyaannya apakah tesis itu berlaku untuk kota Boston pada 1880-1963? Sarjana lain (Seymour M. Lipset dan Reinhard Bendix) telah membuktikan bahwa tesis itu tidak berlaku untuk Amerika pada 1952. Setelah memeriksa mobilitas pekerjaan dan agama di Boston, artikel ini menyimpulkan bahwa tesis Weber itu tidak berlaku secara universal, tetapi sangat situasional, tergantung waktu, tempat, dan kondisi. Mobilitas pekerjaan yang rendah dari orang-orang Katolik tidak disebabkan oleh agamanya, tetapi oleh struktur masyarakat secara keseluruhan.

Karena masalah agama tidak terdapat dalam sensus resmi (agama adalah urusan pribadi), maka cara mencari data statistik diambil melalui sampel yang pada umumnya berasal dari lisensi perkawinan, dari catatan kelahiran oleh ayah, dan dari interview langsung kepada responden.

Artikel ini juga membicarakan tentang pola mobilitas karier. Pertanyaannya: karier itu ditentukan oleh agama ataukah oleh nasionalitas, diskriminasi, kekurangan-kekurangan (buta huruf, tidak bisa bahasa Inggris, tidak punya keahlian, tidak akrab dengan kehidupan kota), tinggal di kampung kumuh (*ghetto*), tinggi-rendah fertilitas, *cohesiveness* sebuah patembayan (*institutional completeness*), dan nilai-nilai budaya.

Tulisan ini penuh dengan tabel (enam buah) yaitu : (1) perbedaan agama dalam mobilitas karier; (2) perbedaan agama dalam mobilitas karier dari dekade ke dekade; (3) perbedaan agama

dalam pencapaian karier pada waktu akhir kerja: anak-anak kelas pekerja; (4) perbedaan agama dalam pencapaian karier: anak-anak kelas menengah; (5) agama, pekerjaan, dan keberlangsungan dari para sampel di kota di atas puluhan tahun; (6) pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan dari imigran generasi kedua (umur 25-44) dibandingkan dengan pendidikan dan pekerjaan ayah. Tabel 1 akan direproduksi di bawah ini.

**PERBEDAAN AGAMA DAN MOBILITAS KARIER
DARI PEKERJAAN PERTAMA SAMPAI PEKERJAAN TERAKHIR**

Pasangan waktu lahir dan agama	Persen dari Grup				Jumlah
	Mulai dengan White-Collar	Berakhir dengan White-Collar	Naik dari Blue-Collar	Turun dari White-Collar	
1840-59					
Katolik	14	33	28	33	105
Protestan	59	65	26	9	196
1860-79					
Katolik	41	43	20	24	207
Protestan	65	64	25	14	340
Yahudi	73	85	57	5	26
1880-89					
Katolik	32	44	20	23	203
Protestan	41	50	23	10	151
Yahudi	43	60	43	19	37
Pengadilan	33	53	33	6	49
1900-09					
Katolik	6	22	18	20	76
Protestan	38	39	13	20	133
Yahudi	71	82	55	7	35

Analisis Thernstrom adalah sebagai berikut. Anak-anak muda Yahudi terkonsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan *white-collar*.



Sebaliknya, pemuda-pemuda Katolik di Boston memegang pekerjaan yang rendah, yang pada mula karirnya lebih banyak daripada anak-anak muda Protestan. Sementara itu, anak-anak muda Protestan mempunyai pekerjaan *blue-collar*, yang pada mulanya dan cenderung punya pekerjaan yang sama pada akhirnya. Anak-muda Yahudi cepat dapat pekerjaan otak; pemuda Katolik cenderung pada pekerjaan-pekerjaan kasar, sedangkan pemuda Protestan merata pada pekerjaan *blue-collar* dan *white-collar*.

Richard L. Merrit, "The Emergence of American Nationalism: A Quantitative Approach" dalam Robert Swierenga (ed.), *Quantification in American History: Theory and Research*, hlm. 81-95. Makalah ini kita ambil karena memberikan *insight* pada penelitian serupa di Indonesia untuk meneliti dengan metode *content analysis* pada buku, surat-surat, pidato, koran-koran, dan cara komunikasi lainnya mengenai satu bentuk pemikiran. Kapan muncul ide kemajuan? Mengenai nasionalisme? Mengenai Revolusi? Mengenai PRRI/Permesta? Seperti diketahui peran wartawan dan koran-koran daerah belum ada penelitian sama sekali. Pekerjaan peneliti terbatas pada pusat-pusat gerakan di Jawa. Artikel ini diharapkan dapat mendorong penelitian ke arah hal-hal itu, tidak sekedar impresi tetapi dihitung secara persis.

Content analysis ialah tabulasi sistematis dari frekuensi simbol yang muncul dalam data berupa koran, surat-surat, buku, pidato, atau bentuk komunikasi lainnya yang terekam dalam periode tertentu. Esai di bawah ini ialah mengenai timbulnya nasionalisme di Amerika, yaitu kapan para kolonis Amerika menyebut diri sebagai Amerika untuk tanah yang mereka diami.



Analisis simbol di sini berasumsi bahwa 'kata' melambangkan sikap mereka secara sadar. Seperti juga para penulis novel yang secara sadar menulis perwatakan dengan nama yang buruk atau baik untuk memberi gambaran mengenai tokoh-tokoh mereka. Dalam masyarakat Amerika kata seperti "komunis", "ateis", dan "totalitarian" mempunyai konotasi yang jelek. Sebaliknya, kata "pahlawan rakyat", "*friend of peace*", dan "Amerika tulen" mempunyai konotasi yang baik.

Sebagai kontras, ada penggunaan simbol yang secara tak sadar muncul di permukaan berupa pola bicara, tulisan tangan, postur tubuh, dan gerakan-gerakan anggota badan yang *involuntary*. Analisis simbol pada umumnya memfokuskan diri pada simbol-simbol yang sadar, tidak pada simbol yang tak sadar.

Analisis simbol juga tidak berusaha memverifikasi fakta, misalnya tentang nyanyian apa yang diteriakkan oleh pasukan Jerman pada 1930-an. Pendek kata, data-data semacam itu harus dicari dengan cara lain. Bukan tugas analisis simbolis untuk mencarinya, meskipun nyanyian juga simbol.

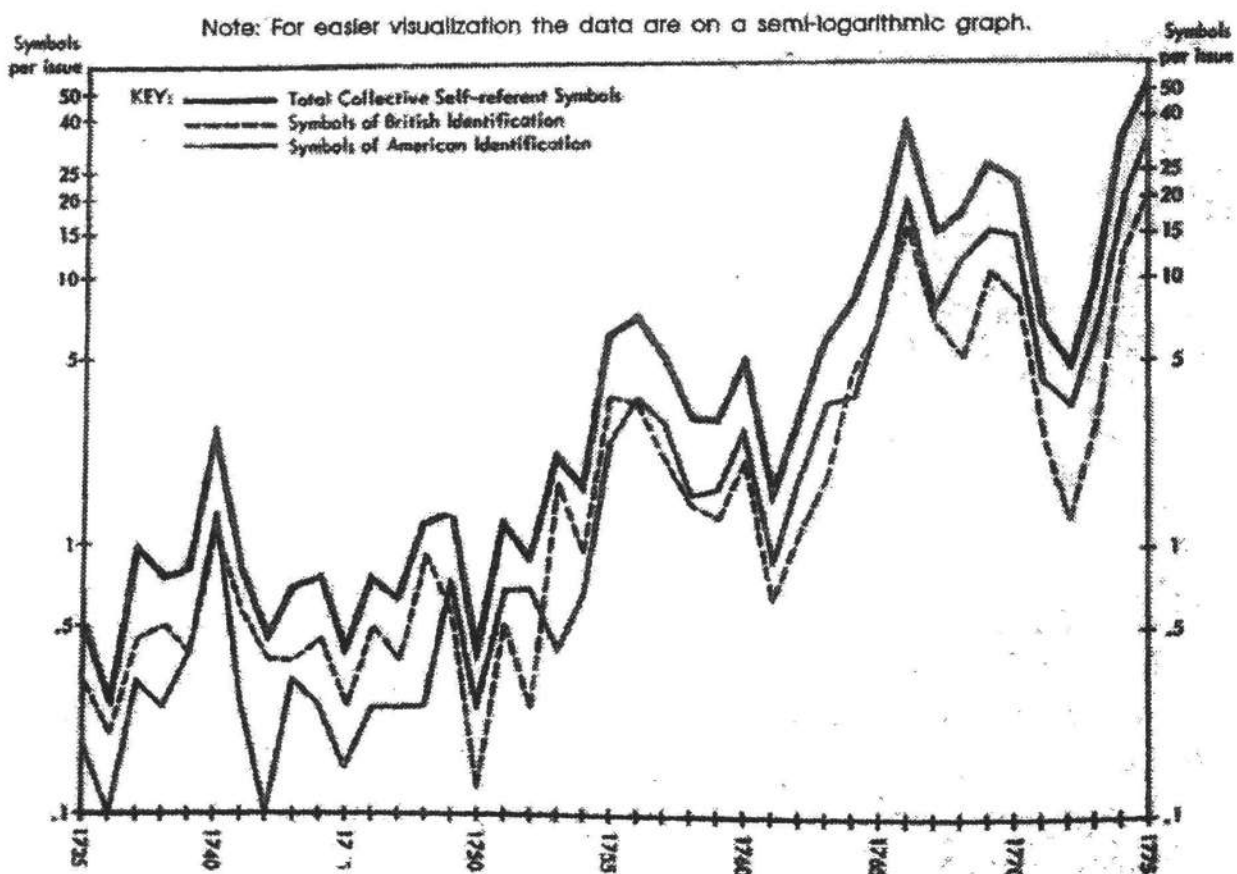
Hal yang perlu dihitung seorang analis ialah kapan, apa, dan bagaimana sebuah data yang dicarinya. Untuk itu perlu seorang analis membaca-baca berbagai sumber kepustakaan yang berkenaan dengan topiknya, sehingga dia punya kerangka-kerja yang jelas. Sesudah itu - kalau data sudah ditemukan - sebagai karya sejarah dia harus memperhatikan pertumbuhan, sebuah *continuum*.

Dalam artikel ini dicari frekuensi penggunaan simbol-simbol dalam koran-koran antara 1735-1775 yang melambangkan nasionalisme Amerika, berbeda dengan simbol-simbol yang melambangkan diri sebagai rakyat Inggris. Simbol-simbol nasionalisme nampak dalam sebutan koran-koran bahwa Amerika adalah "America",

“United Colony”, “north American”, atau “country”. Amerika bukanlah “British-America”, “royal colonist”, “crown colonist”, atau “His Majesty’s subjects in America”.

Pada tahun 1730-an koran-koran belum banyak memuat referensi-diri sebagai bangsa Amerika. Perkembangan nasionalisme meningkat tajam pada tahun-tahun 1735-1775. Referensi-diri secara kolektif itu mencapai puncaknya pada tahun-tahun 1740, 1756, 1769, dan 1775. Meskipun referensi-diri itu berfluktuasi, tapi ada kecenderungan naik. Namun, seperti terlihat dalam grafik, identifikasi diri sebagai orang Inggris itu masih nampak bahkan pada saat-saat terakhir menjelang Perang Kemerdekaan.

THE FREQUENCY OF COLLECTIVE SELF-REFERENT SYMBOLS IN THE COLONIAL PRESS, 1735-1775



Sumber: Richard L. Merrit, “The Emergence of American Nationalism: A Quantitative Approach” dalam Robert Swierenga (ed.), *Quantification in American History: Theory and Research*, hlm. 93.



Sheldon Hackney, "Southern Violence" dalam *Quantification in American History: Theory and Research*, hlm. 348-365. Dalam artikel ini disuguhkan perbandingan antara bunuh diri dan pembunuhan. Emile Durkheim mengemukakan bahwa kekerasan berhubungan dengan anomie. Di Amerika ada penelitian bahwa kekerasan itu disebabkan oleh frustrasi-agresi, atau disebabkan cara pengasuhan anak. Tetapi, di Indonesia kebanyakan karena dendam. Artikel ini mengingatkan kita akan wilayah-wilayah "lunak" tempat banyak bunuh diri, wilayah-wilayah "keras", pembunuhan disebabkan oleh emosi, seperti Madura (carok). Tetapi, bagaimana distribusi dan frekuensinya dari tahun ke tahun? Bagaimana efek dari modernisasi, pendidikan, pendapatan, kemiskinan, dan umur? Analisis *multiple regression* akan dapat menghitung secara statistik variabel "sebab" itu.

Ada lima perhitungan statistik dalam artikel ini, yaitu rasio bunuh diri-pembunuhan di Amerika 1920-1964 pada umumnya (Tabel 1); *rate* bunuh diri-pembunuhan dari kelompok warga (Tabel 2); *rate* bunuh diri-pembunuhan di AS selatan dan di beberapa negara bagian (Tabel 3); analisis *multiple-regression* dari urbanisasi, pendidikan, pendapatan, pengangguran, kekayaan, umur, dan daerah selatan pada 1940 (Tabel 4); dan persentase kepemilikan senjata api (Tabel 5). Di bawah ini akan direproduksi Tabel 1 beserta analisisnya.

Kekerasan banyak dikerjakan oleh orang-orang kulit putih Selatan dan orang Negro Selatan, tetapi tidak oleh orang kulit putih di Utara yang mengikuti pola Eropa (Suicide + Homicide Ratio, SHR), dengan bunuh diri lebih banyak dari pembunuhan, SHR 80. Di Selatan pada 1930-1964, perbedaan pembunuhan dan bunuh diri dinampakkan dalam Tabel 8.2. Di Selatan, orang-orang Hitam lebih banyak melakukan pembunuhan daripada bunuh diri. Adapun orang-



orang Kulit Putih di Selatan juga cenderung kepada pembunuhan daripada bunuh diri. Laju pertumbuhan kekerasan ditunjukkan dalam Tabel 1 (reproduksi - red) di bawah ini.

RASIO BUNUH DIRI-PEMBUNUHAN DI AMERIKA 1920-1964

Year	United States White SHR	Southern White SHR	United States Negro SHR	Southern Negro SHR
1920	69.3	43.4 *	11.2	05.6 *
1925	70.9	53.5 *	09.2	05.0 *
1930	75.0	61.1 *	11.9	06.0 *
1935	76.2	59.9	11.4	06.3
1940	83.3	68.5	09.6	06.5
1945	80.3	66.4	11.1	06.8
1950	82.4	69.8	12.4	09.3
1955	88.3	73.1	15.6	09.7
1960	82.0	74.4	17.0	12.2
1964	81.1	73.2	16.7	11.1

Richard Jensen, "Quantitative Collective Biography: An Application To Metropolitan Elite" dalam *Quantification in American History: Theory and Research*, 389-405. Sebenarnya banyak sumber untuk biografi kolektif di Indonesia: *Oost-Indische Besluiten* dari catatan-catatan Hindia-Belanda, almanaak-almanaak terbitan Jaman Jepang (Kementerian Shumubu), dan banyak "Apa dan Siapa". Untuk anggota-anggota eksekutif, pasti ada catatan (kita tidak tahu, barangkali ada di Sekretariat Negara). Untuk anggota-anggota legislatif di Jaman Orde Baru sudah dibuat biografinya. Pasti ada catatan biografis untuk anggota-anggota legislatif di Jaman Reformasi. Belum diketahui apakah ada catatan (semacam "directory") untuk setiap usaha di Indonesia pada Jaman Belanda.

Kuantifikasi biografi kolektif akan membebaskan sejarawan dari generalisasi acak-acakan yang dibuat jurnalis, novelis, dan biografi



dari orang-orang terkenal. Kuantifikasi biografi kolektif berusaha mencari hubungan antara umur dan mobilitas, pekerjaan dan afiliasi kepartaian, agama dan pendidikan, fanatisme golongan dan organisasi teknis, semuanya yang semula hanya ditebak-tebak menjadi angka-angka yang eksak.

Sebelum melakukan kuantifikasi atas biografi kolektif perlu (1) mendefinisikan masing-masing kata, misalnya apa “elit”, “pemimpin”, “editor”, sehingga dengan mudah data-data dapat dimasukkan dalam tabel; (2) variabel yang dicari; dan (3) jumlah sampel yang diperlukan, makin banyak makin baik.

Ada sebelas tabel, yaitu (1) pekerjaan pertama dan pekerjaan sekarang, elit Chicago 1911; (2) pendidikan dan agama, Chicago 1911; (3) tempat kelahiran dan umur, Chicago 1911; (4) kedekatan tanah kelahiran, Witchita 1929; (5) tempat kelahiran dan umur, Chicago 1926; (6) perpindahan dari kelahiran dan umur, Chicago 1926 versus 1911; (7) kepartaian dan kelompok kerja dari para elit profesional, 1907-1929; (8) kepartaian dan tempat, kapitalis 1911; (9) asosiasi teknis dan kepartaian, Chicago 1911; (10) kepartaian dan umur serta pekerjaan, Chicago 1911; (11) kepartaian dan umur serta pekerjaan, Saint Louis 1912. Di bawah ini direproduksi Tabel 1.



**PEKERJAAN PERTAMA DAN PEKERJAAN SEKARANG
ELIT CHICAGO TAHUN 1911**

	<i>Pekerjaan Sekarang</i>						
<i>Pekerjaan Pertama</i>	<i>Keuangan</i>	<i>Perdagangan & Transportasi</i>	<i>Pabrik</i>	<i>Hukum</i>	<i>Kedokteran</i>	<i>Pekerjaan Profesional lain</i>	<i>Semua</i>
Keuangan	44.6%	2.6%	2.1%	0.8%	0.0%	0.0%	7.9%
Perdagangan & Transportasi	23.2	65.6	15.5	2.3	3.1	8.7	25.9
Pabrik	1.8	3.1	59.2	2.3	0.0	0.0	12.9
Hukum	7.1	5.1	1.4	80.6	0.0	1.1	16.8
Kedokteran	1.8	0.5	0.7	0.8	84.4	1.1	8.0
Pekerjaan Profesional lain	6.3	6.7	4.9	7.0	9.4	81.5	15.8
Manual	2.7	4.6	5.6	3.9	1.6	1.1	3.8
Pekerjaan lain & yang tak diketahui	12.6	11.8	10.5	2.3	1.6	6.5	9.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	746
Jumlah	112	195	142	129	64	92	746

Pauline Dublin Milone, "Contemporary Urbanization in Indonesia" dalam Y. M. Yeung & C. P. Lo, *Changing South-East Asian Cities: Reading on Urbanization*, hlm. 91-99. Meskipun data-data sejarah hanya sampai Sensus 1961 - termasuk Sensus 1930, tetapi contoh bagaimana ia bekerja dengan urbanisasi dapat ditarik sampai masa kini, tentu dengan penambahan data dari banyak sensus. Demikian juga, kiranya tiap kota mempunyai data kuantitatif, sebab bahan Badan Pusat Statistik (BPS) menjangkau sampai kawedanan (dulu) dan kecamatan. Maka, bahkan apa yang pada 1961 masih jadi kota kawedanan atau kecamatan, pada tahun 2005 mungkin sudah menjadi kota.

Ada kesulitan dalam menggarap masalah transnasional urbanisasi, sebab setiap negara menggunakan ukuran yang berbeda untuk menyebut kota. Tetapi, biasanya kita memakai ukuran urbanisasi adalah konsentrasi penduduk di atas 20.000.

Ada lima tabel dalam makalah itu, yaitu (1) kota besar di Indonesia pada Sensus 1961; (2) kota yang mengalami pertumbuhan tercepat dalam Sensus 1961; (3) ranking pulau-pulau menurut level urbanisasi dan kepadatan pada Sensus 1961; (4) provinsi menurut ranking urbanisasi dan kepadatan pada Sensus 1961; dan (5) wilayah menurut level urbanisasi pada Sensus 1930. Di bawah ini akan direproduksi Tabel 9.4, yaitu provinsi, urbanisasi dan kepadatan pada Sensus 1961.

PROVINSI, URBANISASI DAN KEPADATAN PENDUDUK
PADA SENSUS TAHUN 1961

<i>Propinsi</i>	<i>Derajat Urbanisasi</i>	<i>Wilayah (km²)</i>	<i>Kepadatan (per km²)</i>
<i>Java dan Madura</i>			
1. Djakarta Raja	87.2%	577	5,152
2. Jawa Barat	11.93	46,300	380
3. Jawa Tengah	10.20	34,206	538
4. Jogjakarta	16.36	3,169	707
5. Jawa Timur	12.85	47,922	455
<i>Sumatra</i>			
6. Sumatra Selatan	18.63	158,163	31
7. Riau	9.73	94,562	13
8. Djambi	21.57	44,924	17
9. Sumatra Barat	14.15	49,778	47
10. Sumatra Utara	16.94	70,787	70
11. Atjeh	7.69	55,392	29
<i>Kalimantan</i>			
12. Kalimantan Barat	13.18	146,760	11
13. Kalimantan Tengah	14.11	152,600	3-3



14. Kalimantan Selatan	22.67	37,660	39
15. Kalimantan Timur	32.76	202,440	2·7
<i>Sulawesi</i>			
16. Sulawesi Utara/Tengah	14.95	88,578	23
17. Sulawesi Selatan/Tenggara	15.92	100,457	51
<i>Bali and Nusatenggara</i>			
18. Bali	8.79	5,561	321
19. Nusatenggara Barat	5.62	20,177	90
20. Nusatenggara Timur	5.36	47,876	41
21. Maluku	20.70	74,505	11
22. Irian Barat	unknown	421,951	1·8



SEJARAH NARATIF

SEJARAH naratif ialah menulis sejarah secara deskriptif, tetapi bukan sekedar menjejerkan fakta. Setidaknya kita temukan tiga syarat cara menulis sejarah naratif, yaitu *colligation*, *plot*, dan struktur sejarah.

Pertama, *colligation*. Hal ini dikemukakan oleh W. H. Walsh dalam *Philosophy of History: An Introduction*.¹¹³ Teori ini mengatakan bahwa menulis sejarah itu ialah mencari *inner connection* (hubungan dalam) antar peristiwa sejarah. Setelah prosedur metode sejarah sebagai biasanya terlampaui, tibalah saat kita melakukan *colligation*.

¹¹³ W. H. Walsh, *Philosophy of History: An Introduction* (New York, NY: Harper Torchbooks, 1967), hlm. 25.



Kedua, *plot*. Sejarah, seperti novel, memerlukan *plot*. Apakah *plot*? Pertama, *plot* adalah cara mengorganisasikan fakta-fakta menjadi satu keutuhan. Orang tidak mungkin melakukan penulisan sejarah secara “universal”, tetapi harus memecahnya menjadi bagian-bagian, seperti sejarah politik, sejarah agama, sejarah keluarga, dan sebagainya. Cara ini dikemukakan oleh Paul Veyne dalam *Writing History: Essay on Epistemology*.¹¹⁴ Kedua, *plot* dalam sejarah mirip dengan *plot* dalam sastra, yaitu interpretasi dan eksplanasi. Selanjutnya, mengutip E. M. Forster dalam *Aspects of the Novel*, Lee Benson, sejarawan Amerika, mengatakan dalam artikel “Causation and the American Civil War: Two Appraisals” bahwa kalau ada cerita “permaisuri meninggal, lalu raja mati”, itu bukan *plot* tapi narasi. Sebaliknya, kalau ada cerita “permaisuri meninggal, kemudian raja mati karena sedih” itu baru sebuah *plot*.¹¹⁵ *Plot* berbeda dengan kausalitas, sekalipun keduanya adalah *sequence*. *Plot* itu *sequence* yang harus berurutan peristiwanya, sedangkan kausalitas tidak harus berupa peristiwa tetapi bisa hanya berupa kondisi yang dapat jauh (*necessary*) atau dapat dekat (*sufficient*).

Ketiga, struktur sejarah. Menurut *Webster's New College Dictionary* struktur adalah cara mengorganisasikan. Perlunya struktur sejarah sebagai “rekonstruksi yang akurat” dikemukakan oleh Michael Stanford dalam *Nature of Historical Knowledge*.¹¹⁶

Ada banyak sekali contoh penulisan sejarah naratif. Di bawah ini kita cukupkan dengan memilih tujuh buku saja, lima buku tentang Indonesia dan dua buku non-Indonesia - untuk menunjukkan

114 Paul Veyne, *Writing History: Essay on Epistemology* (Middletown, Connecticut: Wealeyan University Press, 1971), hlm. *passim*.

115 Lee Benson, “Causation and the American Way: Two Appraisals” dalam A. S. Eisenstadt (ed.) *The Craft of American History. Vol. I.* (New York: Harper Torchbooks, 1966), hlm. 34-62.

116 Michael Stanford, *Nature of Historical Knowledge* (New York, NY: Basil Blackwell, 1986), hlm. 11.



bahwa sejarah naratif ada di mana-mana.¹¹⁷ Buku-buku Indonesia itu ialah Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*,¹¹⁸ Helius Sjamsuddin, *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906*,¹¹⁹ C.L.M. Penders, *Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in North-East Java, Indonesia*,¹²⁰ George D. Larson, *Prelude to Revolution: Palace and Politics in Surakarta, 1912-1942*,¹²¹ dan Takashi Shiraishi, *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926*.¹²²

Buku-buku non-Indonesia ialah Peter Laslett, *The World We Have Lost: England Before the Industrial Age*,¹²³ dan Samuel P. Hays, *The Response to Industrialism 1885-1914*.¹²⁴

Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara: Melacak Akar-Akar Pembaruan Islam di Nusantara*. Ada dua keuntungan yang terkandung dalam buku ini. Pertama, buku ini penuh dengan

117 Di dalam proses penulisan naskah ini, penulis buku ini, Prof. Kuntowijoyo baru mengulas lima contoh buku tentang Indonesia, sedangkan dua buku non-Indonesia yang sudah disebutkannya, yakni karya Peter Laslett dan Samuel P. Hays, belum sempat diulas lantaran beliau jatuh sakit, dan kemudian meninggal dunia (red).

118 Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1994).

119 Helius Sjamsuddin, *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

120 C.L.M. Penders, *Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in North-East Java, Indonesia* (Jakarta: PT Inti Rahayu, 1984).

121 George D. Larson, *Prelude to Revolution: Palace and Politics in Surakarta, 1912-1942* (Dordrecht-Holland: Foris Publication, 1987).

122 Takashi Shiraishi, *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926* (Ithaca: Cornell University Press, 1990).

123 Peter Laslett, *The World We Have Lost: England Before the Industrial Age* (New York: Charles Scribner's Sons, 1965).

124 Samuel P. Hays, *The Response to Industrialism 1885-1914* (Chicago: The University of Chicago Press, 1957).



informasi yang sangat detil tentang silsilah keilmuan para ulama dari Timur Tengah maupun dari Nusantara. Kedua, buku ini adalah contoh yang baik bagaimana sejarah pemikiran mesti ditulis. Kalau strukturalisme dalam sejarah “menyelam ke kedalaman peristiwa-peristiwa sejarah”, maka sejarah pemikiran “berenang di permukaan peristiwa-peristiwa sejarah”. Dengan strukturalisme orang tidak akan dapat menerangkan transformasi pemikiran. Gagasan mengenai sejarah pemikiran itu dikemukakan oleh Michel Foucault dari post-strukturalisme dalam *The Archaeology of Knowledge*.¹²⁵ Sejarah pemikiran suatu kurun sejarah selalu menunjukkan uniformitas antar-sistem simbol, sehingga *unities of discourse*.

Kita di sini tidak akan menggelar kembali jaringan intelektual tokoh-tokoh Islam yang sangat rumit itu, tapi hanya ajarannya. Demikianlah buku ini menunjukkan satunya pemikiran keagamaan di Nusantara pada abad ke-17 dan ke-18, yaitu neo-Sufisme. Ulama penganut neo-Sufisme itu ialah Al-Raniri, Al-Sinkili, dan Al-Maqassari pada abad ke-17, serta pada abad ke-18 ada Al-Palimbani, Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Muhammad Nafis bin Idris bin Husayn Al-Banjari dari Kalimantan Selatan, dan Dawud bin 'Ab Allah Al-Fatani dari Patani.

Neo-Sufisme adalah tasawuf yang diperbaharui, tasawuf yang telah dilucuti kandungan eskatis dan metafisiknya, digantikan oleh dalil-dalil dari ortodoksi Islam. Tasawuf model baru ini menekankan faktor moral dan kontrol-diri yang puritan dengan mengorbankan ciri-ciri berlebihan dari tasawuf populer yang menyimpang. Pusat perhatian dari neo-Sufisme adalah rekonstruksi sosio-moral

125 Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge* (New York: Routledge, 1991).



masyarakat Islam. Neo-Sufisme - Azyumardi mengutip Fazlur Rahman - adalah puritan dan aktivis.

Helius Sjamsuddin, *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906*. Buku tebal yang berasal dari disertasi di Monash University (Australia) ini menceritakan tentang perlawanan yang terlama terhadap kolonialisme dalam sejarah Indonesia. Di bagian “Kesimpulan” ada ringkasan buku, dari mana uraian di bawah ini kita ambil. Konflik dinasti Kerajaan Banjar yang terjadi pada abad ke-18 telah mengundang campur-tangan Belanda dengan mendukung salah satu pihak yang sedang bertikai. Oleh Belanda yang mengadakan ekspansi, konflik Kesultanan Banjar diselesaikan dengan membagi dua Kesultanan Banjar, yaitu daerah Gubernemen yang berada di bawah pemerintahan Belanda secara langsung dan tanah-tanah Sultan sebagai “pinjaman” (*fief*) di bawah dinasti baru yang didukung Belanda, Panembahan Nata.

Pada abad ke-19 keturunan Panembahan Nata menghadapi konflik internal karena harus mengakomodasikan kepentingan-kepentingan Belanda. Pada 1840-an sedimen-sedimen batubara ditemukan di Kesultanan Banjar. Belanda meminta konsesi pertambangan dari Sultan, yang akhirnya diperoleh. Kemudian, konflik dinasti kembali melanda Kesultanan Banjar, Pangeran Hidayatullah dan Tamjidillah. Belanda mendukung pihak yang sanggup menguntungkan, Tamjidillah.

Asal-usul peperangan dimulai di sini. Pangeran Antasari - cucu Pangeran Amir yang diasingkan - bersama Pangeran Hidayatullah mengadakan pemberontakan. Pangeran Hidayatullah yang bersikap mendua terhadap Belanda, menyerah pada 1862. Pangeran Antasari



yang semula sendirian lalu bergabung dengan kepala suku Dayak (Muslim), Temenggung Surapati. Dengan dukungan Surapati, Antasari dijadikan Panembahan Amirudin Khalifatul Mukminin. Antasari kemudian mengangkat Surapati menjadi Pangeran Surapati - keturunan Surapati bergelar Temenggung. Ini berarti bangkitnya dinasti lama.

Antasari meninggal pada tahun 1862, dan dinasti Panembahan Nata berakhir dengan diasingkannya baik Tamjidillah maupun Hidayatullah. Sepeninggal Antasari, Kerajaan Banjar diteruskan oleh dua orang puteranya. Keduanya menjadi raja dengan pemerintahan yang disebut Pegustian. Perlawanan panjang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh keturunan Antasari dan Surapati berlangsung sampai tahun 1906 dengan meninggalnya Gusti Berakit pada 6 Agustus 1906.

C.L.M. Penders, *Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in North-East Java, Indonesia*. Buku ini dimulai dengan pembicaraan Politik Etis (irigasi, emigrasi, edukasi) di Kabupaten Bojonegoro, Karesidenan Rembang. Buku ini pertama-pertama membahas irigasi di area Bojonegoro. Bojonegoro mengalami gagal-panen sepanjang tahun 1904-1906, banjir bergantian dengan kekeringan yang menyebabkan kelaparan. Daerah-daerah yang tinggi kekurangan air, sedangkan daerah rendah terkena banjir. Karenanya, kemudian waduk-waduk dibangun untuk mengontrol air. Proyek yang dimulai pada 1927 itu tidak berhenti ketika depresi datang pada 1930-an, tetapi terus berjalan sampai 1939.

Sementara itu, di desa-desa Bojonegoro kebutuhan uang meningkat, dan merekalah pelepas uang, terutama orang-orang Cina dan India. Untuk mengatasi kebutuhan uang dan para pelepas uang, Pemerintah pada 1914 mendirikan *afdeelingbank* di Bojo-



negoro, cabang dari *Volkscredietwezen* (VCW) yang berdiri secara nasional pada 1912. Di bawahnya, pada 1924 ada 30 bank desa (dan 158 lumbung desa), 61 bank desa pada 1927, dan 110 bank desa pada 1927. Tetapi, pada 1932 bank desa di Bojonegoro mencatat kerugian akibat kredit macet sebanyak 22.000 gulden, jumlah yang sangat besar waktu itu. Penyebabnya ialah korupsi dan penyelewengan para pejabat desa, sebab bank desa ada di bawah pengawasannya. Seorang pejabat VCW menyimpulkan, "Pribumi mempunyai bakat luar biasa untuk menjadikan tindakan yang bermaksud baik menghasilkan akibat yang salah".

Politik Etis dalam pendidikan juga merambah Bojonegoro, meskipun kurang intensif dibanding wilayah lain. Pada awal abad ini didirikan *Eerste Klasse School* (sekolah umum lima tahun) dengan mata pelajaran ilmu bumi, sejarah, dan ilmu alam di kota. Di luar kota ada *Tweede Klasse School* (tiga negeri, satu swasta penuh, dan satu swasta bersubsidi). Di samping itu, sekolah-sekolah desa (tiga tahun) untuk pribumi biasa juga berdiri. Demikian juga ELS (*Europeese Lagere School*) untuk orang Eropa dan pribumi yang berbahasa Belanda di rumah, dan HIS (*Hollands-Inlandsche School*) untuk golongan atas pribumi yang tidak berbahasa Belanda di rumah di kota Bojonegoro. Selain itu ada dua sekolah khusus untuk putri dan satu sekolah dagang. Jumlah sekolah terus meningkat. Pada 1932 ada 196 sekolah desa, sembilan sekolah putri, enam *Tweede Klasse School*, delapan belas *Vervolgschool* (sekolah penghubung sekolah desa dan *Tweede Klasse School*).

Pemerintah juga memajukan pertanian dan peternakan. Pertanian dimajukan dengan bermacam cara: perluasan tanah pertanian, sekolah pertanian, penyediaan pupuk, penyediaan bibit unggul, dan tanah percontohan. Peternakan dimajukan dengan inse-



minasi sapi lokal. Pada 1891 Pemerintah mengimpor sapi Bengala, dan jumlahnya berkembang menjadi 170 pada 1904. Harga ternak sapi unggul lebih tinggi 50% dibanding sapi lokal.

Bagaimanapun keras usaha-usaha untuk menaikkan taraf hidup masyarakat, tetapi semuanya kandas akibat Depresi tahun 1930. Ditambah dengan naiknya harapan dan agitasi gerakan-gerakan nasional, penulis mengkhawatirkan adanya ketidakpuasan masyarakat pada kebijakan-kebijakan Politik Etis.

George D. Larson, *Prelude to Revolution: Palace and Politics in Surakarta, 1912-1942*. Buku ini menceritakan nasib dua kerajaan pada masa akhir Pemerintah Hindia-Belanda, Kasunanan dan Mangkunegaran. Ketika ada perubahan ekonomi, reformasi keuangan, hukum, dan agraria atas inisiatif Belanda, Mangkunegaran di bawah Mangkunegoro VII bersimpati, tetapi Kasunanan di bawah Pakubuwana (PB) X menolaknya. Kebijakan yang dimaksudkan untuk menaikkan taraf hidup rakyat itu dianggap sebagai usaha mengurangi kekuasaan raja. Oleh karenanya, Belanda berusaha mengikis ambisi politik Kasunanan.

Dua kerajaan (adipati, Sunan) itu memang banyak berbeda. Pertama, Mangkunegaran (di bawah Mangkunegoro VI) mempunyai semangat pembaharuan sosial dan usaha ekonomi, sedangkan Kasunanan (di bawah PB X) masih mengandalkan kebesaran simbolis. Karenanya respons terhadap langkah-langkah Belanda juga berbeda. Kedua, dalam politik, Kasunanan pada mulanya menunjukkan semangat nasionalisme Jawa. Kasunanan bersimpati pada Sarekat Islam, sedangkan Mangkunegaran tidak menunjukkan sikapnya. Demikian juga ketika kepemimpinan Boedi Oetomo pindah dari Yogya ke Solo, dua anak Sunan Solo menjadi pengurus, sedangkan



Mangkunegaran tidak. Ambisi politik Sunan ketahuan Belanda dan berusaha mencegahnya. Ketiga, dalam kebudayaan nampak ketika ada gerakan untuk memajukan kebudayaan Jawa (1918), Mangkunegoro VII menjadi ketua kehormatan, sedangkan Sunan yang diangkat jadi pelindung menolak hadir. Sebaliknya, Sunan malah mendukung gerakan kebudayaan yang lainnya, yaitu *Het Comité voor Javaansche Cultuurontwikkeling* (Komite untuk Pembangunan Kebudayaan Jawa).

Dalam politik, di Surakarta ada radikalisme agraris yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Insulindo, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Haji Misbach. Haji Misbach ingin mengkombinasikan Islam dan Komunisme. Target mereka adalah kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda yang sangat merugikan rakyat (upah yang rendah, tenaga kerja paksaan, kondisi kerja) dan kedua kerajaan Jawa tempat kebijakan itu dijalankan.

Ketika radikalisme agraris dan gerakan komunis itu berhasil diberantas Pemerintah, Kasunanan mencoba lagi untuk membangkitkan nasionalisme Jawa. Dalam rangka nasionalisme Jawa itulah pada 1931 Kasunanan berusaha mencaplok Mangkunegaran, satu langkah yang membuat hubungan keduanya semakin buruk.

Tetapi, Kasunanan yang berusaha mendukung gerakan nasional - orang-orang Kraton masuk Parindra - dengan menentang kebijakan Pemerintah itu berakhir dalam ironi sejarah. Kasunanan dan Mangkunegaran dilikuidasi oleh Revolusi.

Takashi Shiraisi, *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926*. Buku yang sangat mendetil dan sulit diringkas ini memperdalam buku George D. Larson mengenai Surakarta. Kalau fokus Larson ialah hubungan istana-politik, maka buku ini bergerak ke



tingkat bawah dan membicarakan hubungan politik rakyat-pergerakan. Banyak tokoh pelaku radikalisme serta organisasinya dibicarakan di dalam buku ini, seperti Tjokroaminoto, Agoes Salim, Abdoel Moeis, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Marco Kartohadikromo, Semaoen, Darsono, bahkan mencakup pula nama-nama yang tak pernah disebut dalam pelajaran sejarah. Demikian juga organisasi-organisasi pergerakan seperti Sarekat Islam, PKI (Perserikatan Komoenis di India), SH (Sarekat Hindia), Sarekat Abangan, PFB (*Personel Fabriek Bond*). Majalah-majalah pergerakan - yang banyak di antaranya ia kutip - juga disebutkan.

Buku ini dimulai dengan masuknya pemodal Belanda yang mengusahakan perkebunan di Surakarta. Dalam bab yang sama juga diceritakan reorganisasi hukum dan pemilikan tanah dengan maksud untuk mempermudah masuknya modal. Mulailah kapitalisme swasta masuk. Dengan masuknya modal ke daerah pedesaan, timbullah pergerakan-pergerakan. Pergerakan itu ialah Sarekat Islam (SI) yang memperoleh kemajuan sebagai gerakan massa ketika dipimpin Tjokroaminoto, tapi SI yang didirikan pada mulanya sebagai perkumpulan dagang, dan agama tidak menyentuh petani. Meskipun kepemimpinan Tjokroaminoto itu mendapat kritik dari Marco - pimpinan redaksi *Doenia Bergerak* - tetapi kepemimpinannya tidak surut. Pada waktu itu pula muncul Semaoen dari Perserikatan Komoenis di India (PKI) yang revolusioner. Tjokroaminoto pun mengalami radikalisasi, dan mulailah SI memelopori pemogokan-pemogokan di daerah perkebunan. Radikalisasi itu juga memunculkan tokoh-tokoh *Insulindo*, yakni Tjipto Mangoenkoesoemo dan Douwes Dekker. Surakarta memanas. Pemogokan dan rapat-rapat umum yang memprotes peranan pemerintah makin sering terjadi, bahkan di tempat-tempat terpencil seperti Polanharjo.



Namun, yang paling menarik dalam buku ini ialah pembicaraan tentang peran Hadji Mohammad Misbach yang disebutnya sebagai mubaligh. Ia memadukan antara Islamisme dan Komunisme - yang tidak disebut-sebut oleh generasi masa kini. Ia lebih suka bergabung dengan PKI daripada dengan gerakan-gerakan Islam. Misbach yang aktif dalam pergerakan dan memimpin pemogokan-pemogokan, kembali dari penjara di Pekalongan pada Agustus 1922, setelah menjalani hukuman selama dua tahun tiga bulan. Akan tetapi, ia kemudian dibuang ke Manokwari, Papua, dan pada 18 Juli 1924 ia berlayar bersama keluarga ke pembuangan. Ia kecewa dengan gerakan Islam, seperti Moehammadijah, karena tidak peka dengan penindasan kapitalisme. Disebutnya, mereka sebagai Islam *lamisan* (Islam palsu, munafik) yang takut pada manusia, sedangkan seharusnya Islam sejati (mukmin). Dengan bahasa yang kasar, ia akan tendang Muslim yang palsu. Dialah satu-satunya orang yang kenal dengan Islam dan ideologi dunia (Marxisme).

Orang lain, misalnya, Mangoenatmodjo, tokoh Sarekat Abangan (SA) yang berdiri tahun 1920, bersandar pada budaya Jawa. Ia mengajarkan Islam abangan. Buku pegangannya ialah *Serat Seh Siti Jenar* karangan Raden Panji Natarata dari Yogyakarta yang mengajarkan Islam abangan di Surakarta tahun 1860-an. Pengaruh SA hanya terbatas pada satu desa di Delanggu. Ia juga menjadi ketua SI Delanggu.

Sepanjang perjalanan dengan kapal ke Manokwari di Papua, di setiap pelabuhan Misbach disambut oleh orang-orang PKI, dan melaporkan keberadaan PKI di daerah-daerah itu. Ia berjanji akan menulis secara lengkap hubungan Islam dan Komunisme yang akan memberi pencerahan bagi orang Islam dan orang Komunis. Ia benar-benar menulisnya, dan dimuat di *Medan Moeslimin* secara bersambung sejak penerbitan majalah itu pada 1925. Tulisan terakhir-



nya ialah pada 1926, beberapa waktu sebelum meninggal. Nampaknya, ia tetap tegar menghadapi hukuman dan terus bergerak dengan mendirikan SA di Manokwari. Pada 24 Mei 1926 Misbach meninggal, dikuburkan di samping istrinya.

Sepeninggal Misbach ke pembuangan, Surakarta tetap terus bergerak di bawah pimpinan PKI, SA dan simpatisannya. Pemerintah Hindia-Belanda menangkap mereka dan membuang ke Digul pada November 1926 dengan tuduhan "anarkis". ***



DAFTAR BACAAN UNTUK REVIEW

BAB 2. PERIODISASI (7 sumber bacaan)

1. *Sejarah Nasional Indonesia* (Jakarta: Depdikbud, PN Balai Pustaka, 1974-1984).
2. M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia* (London: The Macmillan Press, Ltd., 1982).
3. Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia: Dari Emporium Sampai Imperium* (Jakarta: PT Gramedia, 1987), Jilid I.
4. Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), tiga jilid besar.
5. *Sejarah Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1987).
6. Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia* (Jakarta: Kompas, 1995), Buku I.
7. Kuntowidjojo, *Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia: Mitos, Ideologi, dan Ilmu* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah, Universitas Gadjah Mada, 2001).



BAB 3. KAUSALITAS (11 sumber bacaan)

- Analisis Monokausal

8. John Ingleson, *Road to Exile: the Indonesian Nationalist Movement 1927-1934* (Singapore: Heineman Educational Books (Asia), Ltd., 1980).
9. Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1989).
10. Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982).

- Analisis Multikausal

11. Sartono Kartodirdjo, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888. Its Condition, Course, and Sequences. A Case Study of Social Movements in Indonesia* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966).
12. A.P.E. Korver, *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?* (Jakarta: PT Grafiti Pres, 1985).

- Studi Perubahan

Tentang Struktur

13. Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 1974).
14. Richard L. Bushman, *From Puritan to Yankee: Character and the Social Order in Connecticut, 1690-1765* (New York: W. W. Norton & Company, Inc., 1970).
15. Robert Stauffer, *The Development of an Interest Group: The Philippine Medical Association* (Quezon City: University of the Philippine Press, 1966).

Tentang Sistem

16. W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change* ('s-Gravenhage: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, 1959).
17. Thomas C. Cochran, *Social Change in America: The Twentieth Century* (New York: Harper & Row, Publishers, 1972).
18. Sam Bass Warner, Jr., *The Private City: Philadelphia in Three Periods of Its Growth* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1973).



BAB 4. ANALISIS STRUKTURAL (9 sumber bacaan)

- Struktur Budaya

19. Clifford Geertz, *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa* (Jakarta: Grafitipers, 1986).
20. Clifford Geertz, *Negara Teater: Kerajaan-kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000).
21. Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987).
22. Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).
23. Brian May, *The Indonesian Tragedy* (Singapore: Graham Brash [PTE] Ltd., 1978).

- Struktur Sosial

24. Darsiti Soeratman, "Kehidupan Dunia Kraton Surakarta, 1830-1939" (Disertasi UGM, 1989).
25. Nina Herlina, "Kehidupan Kaum Menak Priangan, 1800-1942" (Disertasi UGM, 1997).
26. Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital* (Canberra: ASAA, 1986).

- Struktur Materiil

27. Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura, 1850-1940* (Yogyakarta: MataBangsa, 2002).

Bab 5. PARALELISME (7 sumber bacaan)

- Tentang Kemiripan

28. Clifford Geertz, *Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns* (Chicago: Chicago University Press, 1971).
29. Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under the Dutch Colonialism* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989).
30. Sartono Kartodirdjo, "Beberapa Perspektif dalam Studi Revolusi Perancis dan Revolusi Indonesia" dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (Eds.),



Panggung Sejarah: Persembahkan kepada Prof. Dr. Denys Lombard (Jakarta: EFEO, 1999), hlm. 105-116.

31. Soegijanto Padmo, *The Cultivation of Vorstenlands Tobacco in Surakarta Residency and Besuki Tobacco in Besuki Residency and Its Impact on Peasant Economy and Society: 1860-1960* (Yogyakarta: Aditya Media, 1994).
32. Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002).

• Tentang Pengulangan

33. Clifford Geertz, "Politics Past, Politics Present: Notes on the Uses of Anthropology in Understanding the New States" dalam *Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, Inc., Publishers, 1973), hlm. 327-346.
34. Benedict R. O'G. Anderson, "Gagasan tentang Kuasa dalam Masyarakat Jawa" dan "Negara Lama, Masyarakat Baru: Orde Baru Indonesia dalam Perbandingan Persepektif Kesejarahan" dalam *Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia* (Yogyakarta: MataBangsa, 2000), hlm. 35-169 dan hlm. 203-260.

BAB 6. GENERALISASI SEJARAH (9 sumber bacaan)

35. Roland Mousnier, *Peasant Uprisings in the Seventeenth-Century France, Russia, and China* (New York: Harper & Row Publishers, 1970).
36. Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries* (Kuala Lumpur: Oxford University, 1972).
37. Michael Adas, *Ratu Adil: Tokoh dan Gerakan Milenarian Menentang Kolonialisme Eropa* (Jakarta: Rajawali, 1988).
38. Barrington Moore, Jr., *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World* (Boston: Beacon Press, 1967).
39. Eric R. Wolf, *Peasants Wars of the Twentieth Century* (New York: Harper Torchbooks, 1973).



40. James C. Scott, *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia* (New Haven: Yale University, 1976).
41. Rupert Emerson, *From Empire to Nation: The Rise to Self-Assertion of the Asian and African Peoples* (Boston: Beacon Press, 1970).
42. Sidney Hook, *The Hero in History: A Study in Limitation and Possibility* (Boston: Beacon Press, 1969).
43. Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1971).

BAB 7. RAPPROCHEMENT: SEJARAH DAN TEORI SOSIAL (7 sumber bacaan)

44. M. N. Srinivas, *Social Change in Modern India* (Berkeley: University of California Press, [1972] 1984).
45. John Demos, *A Little Commonwealth: Family Life in Plymouth Colony* (New York: Oxford University Press, 1971 [1974]).
46. Elly Touwen-Bouwsma, *Staat, Islam, en lokale leiders in West Madura, Indonesia* (Kampen: Uitgeverij Mondiss, 1988).
47. Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh, 1874-1912* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).
48. Djoko Suryo, *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900* (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial UGM, 1989).
49. Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920)* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991).
50. Kuntowijoyo, *Raja, Priyayi, dan Kawula: Surakarta, 1900-1915* (Yogyakarta: Ombak, 2004).

BAB 8. KUANTIFIKASI (5 sumber bacaan)

51. Stephan Thernstrom, "Religion and Occupational Mobility In Boston, 1860-1963" dalam William O. Aydelotte et al., *The Dimensions of Quantitative Reseach in History*, hlm. 124-158 (Princeton: Princeton University Press, 1972).
52. Richard L. Merrit, "The Emergence of American Nationalism: A Quantitative Approach" dalam Robert Swierenga (ed.), *Quantification in American History:*



Theory and Research, hlm. 81-95 (New York: Atbeneum, 1970).

53. Sheldon Hackney, "Southern Violence" dalam *Quantification in American History: Theory and Research*, hlm. 348-365 (New York: Atbeneum, 1970).
54. Richard Jensen, "Quantitative Collective Biography: An Application To Metropolitan Elite" dalam *Quantification in American History: Theory and Research*, 389-405 (New York: Atbeneum, 1970).
55. Pauline Dublin Milone, "Contemporary Urbanization in Indonesia" dalam Y. M. Yeung & C. P. Lo, *Changing South-East Asian Cities: Reading on Urbanization*, hlm. 91-99 (Singapore: Oxford University Press, 1976).

BAB 9. SEJARAH NARATIF (7 sumber bacaan)

56. Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1994).
57. Helius Sjamsuddin, *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
58. C.L.M. Penders, *Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in North-East Java, Indonesia* (Jakarta: PT Inti Rahayu, 1984).
59. George D.Larson, *Prelude to Revolution: Palace and Politics in Surakarta, 1912-1942* (Dordrecht-Holland: Foris Publication, 1987).
60. Takashi Shiraishi, *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926* (Ithaca: Cornell University Press, 1990).



INDEKS

A

Abdoel Moeis, 156

ABRI, 95

accepted history, 32, 33, 69

Adas, Michael, 98, 99, 104, 107

*Ratu Adil: Tokoh dan Gerakan
Milenarian Menentang
Kolonialisme Eropa* (1988),
99, 104

Adrian B. Lopian, 28

*Panggung Sejarah:
Persembahan kepada Prof.
Dr. Denys Lombard* (1999),
28, 81

Agoes Salim, 156

agricultural deficiency, 75

agricultural involution, 49

Alfian, 80, 81, 83

*Muhammadiyah: The Political
Behavior of a Muslim
Modernist Organization
Under the Dutch
Colonialism* (1989), 81

Al-Palimbani, 150

Al-Raniri, 150

Amanat Sejarah Umat Islam, 32



Amri Marzali, 63

Anderson, Benedict R. O'G. 90, 92, 93

Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia (2000), 90, 92, 93

Anglicanisme, 20, 123

Ankersmit, F.R., 62

Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah (1987), 62

Annales, madzab (*Annales d'histoire économique et sociale*, 1929), 9, 22, 27, 28, 29, 33, 60, 61, 118

anomi, 141

apanage, 126, 129, 130, 133

architectonic unities, 76

Aydelotte, William O., 131, 135
The Dimensions of Quantitative Research in History (1972), 135

Azyumardi Azra, 28, 149

"Historiografi Kontemporer Indonesia", 28

B

bekel, 129, 130

Bendix, Reinhard, 136

Benson, Lee, 36, 148

"Causation and the American Civil War: Two Appraisals" (1966), 36, 148

D

Darsiti Soeratman, 70, 71

Darsono, 156

Dawud bin 'Ab Allah Al-Fatani, 150

demang, 129

Demos, John, 119, 120, 123

A Little Commonwealth: Family Life in the Plymouth Colony (1974), 120

descriptive statistics, 132

Dewa Ruci, 93

diakronis (diachronic), 5, 7, 21, 23, 26, 27, 28, 33, 117

Dilthey, Wilhelm, 2, 3, 5

discursive discourse, 77

Djoko Suryo, 120, 126, 133

Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900 (1989), 120, 126, 133

Doenia Bergerak, majalah, 45, 156

Douwes Dekker, 156

Droysen, J. G., 16

Durkheim, Emile, 141

E

ecological materialism, 63, 74

Eerste Klasse School, 153

Elias, Nobert, 71

ELS (Europeese Lagere School), 153

Evers, Hans-Dieter, 80



Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia (1982), 80

exemplary center, doktrin, 91
expressive politics, konsep, 91

F

fasisme, 108, 110

Febvre, Lucien, 9, 60, 61, 118

feodalisme, 13, 20, 82, 90, 110

Forster, E. M., 36, 148

Aspects of the Novel, 148

Foucault, Michel, 31, 75, 76, 77, 150

Discipline and Punishment: The Birth of the Prison (1982), 77

prinsip unities of discourse, 76, 150

The Archaeology of Knowledge (1991), 75

French, Valerie, 10, 97, 98

Historians and the Living Past: The Theory and Practice of Historical Study (1976), 10, 97, 98

G

Galtung, John, 5

Theory and Method of Social Research (1969), 5

Gandhi, Mahatma, 111

Gardiner, Patrick, 10, 11

The Nature of Historical Explanation (1961), 10

Geertz, Clifford, 47, 48, 63, 65, 80, 81, 83, 90, 91, 127

"Politics Past, Politics Present: Some Notes on the Uses of Anthropology in Understanding the New States'" (1973), 90

Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia (1974), 47, 48

Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa (1986), 63

Negara Teater: Kerajaan-kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas (2000), 63

Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns (1971), 80, 81

The Interpretation of Cultures (1973), 90

Geisteswissenschaften (ilmu-ilmu kemanusiaan, 2, 3, 4

general laws, 98, 117

generalisasi 10, 13, 20, 97, 98, 99, 100, 108, 116, 131, 132, 142

kausal, 13

konseptual, 13

makna

~ empiris, 98

~ sejarah, 97, 98, 99, 100

inferensi statistik, 98, 123

silogisme, 97

gerakan Arya Samaj, 122

Gerakan Kelas Terbelakang (the Backward Classes Movement), 122



gerakan protes petani, 101
 ~ *anti-extortion* (anti-penghisapan), 101
 ~ lokal, 101
 ~ mesianistis, 101, 102
 ~ revivalis dan sektarian, 103
 Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia), 40
 Goeroe Ordonnantie 1925, 84
 Golkar, 67, 95
 Gottschalk, Louis, 98
 Understanding History: A Primer of Historical Method (1967), 98
 Gurr, Ted Robert, 99
 Why Men Rebel (1971), 99
 Gusti Berakit, 152

H

hacienda, 113
Hackney, Sheldon, 141
 Hadji Mohammad Misbach, 155, 157
 Haji Rasul, 84
 Haji Rifa'i, 103
 Hatta, 39
 Hays, Samuel P, 149
 The Response to Industrialism 1885-1914 (1957), 149
 Helius Sjamsuddin, 149, 151
 Hempel, Carl G., 13
 Hendlin, Oscar, 50
 hermeneutika (*hermeneutics*), 3, 10

Het Comité voor Javaansche Cultuurontwikkeling (Komite untuk Pembangunan Kebudayaan Jawa)., 155
heuristic, 135
Hikayat Perang Sabil, 68
 HIS (*Hollands-Inlandsche School*), 153
 historiografi, 9, 21, 25, 26, 30, 32, 51, 62
 ~ Amerika, 9, 119
 ~ Perancis, 9, 119
 historisisme, 3
 Hobsbawn, E. J., 74
 Hook, Sidney, 99
 The Hero in History: A Study in Limitation and Possibility (1969), 99
 Huguenots, 20
 Huizinga, Johan, 16, 71
human agent, 55
 Hurgronje, Snouck, 45

I

Ibrahim Alfian, 63, 68, 120
 Perang di Jalan Allah: Perang Aceh, 1873-1912 (1987), 120
ideographic, 7, 117
 IDI (Ikatan Dokter Indonesia), 53
imagined community, 94
 Imam Mahdi, 34, 46, 102
 Ingleson, John, 38
 Road to Exile: the Indonesian Nationalist Movement 1927-1934 (1980), 38



inner coherence, 12
Inner Indonesia, 48
 Insulindo, 155, 156
interdisciplinary history, 119
interpretive anthropology, 65
Islamic Studies, 87

J

Jainisme, 121
 Jakob Oetama, 31
Jensen, Richard, 142

K

Kalimasada, 93
 Katolisisme, 20
 kausalitas
 ~ monokausal, 21, 37, 59
 ~ multikausal, 37, 42, 43, 44
 Ken Arok, 93
 Keraton Surakarta, 46
 Kesultanan Banjar, 151
 Khoiruddin Nasution, 81, 87
 KNIL, 94, 95
 komunisme, 42, 72, 108, 110,
 112, 155, 157
 KOSTRAD, 94
 kuasa
 konsep - Eropa modern, 92
 konsep - Jawa tradisional, 92,
 93
 kultus raja-dewata, 65
 Kung Ch'an Tang (Partai Komunis
 Cina - PKC), 114

Kuntowijoyo 22, 33, 74, 120, 130
 "Periodisasi Sejarah Kesadaran
 Keagamaan Umat Islam
 Indonesia: Mitos, Ideologi,
 dan Ilmu" (2001), 22, 33
 *Perubahan Sosial dalam
 Masyarakat Agraris:
 Madura, 1850-1940*, 74
 *Raja, Priyayi, dan Kawula:
 Surakarta, 1900-1915*
 (2004), 120, 130

Kuo Min Tang (KMT), 114

L

Ladurie, Emmanuel Le Roy, 27,
 62, 118, 134
 Carnival in Romans (1981), 27
 Montaillou (1980), 27
 The Peasant of Languedoc
 (1974), 27
 Larson, George D., 149, 154, 155
 *Prelude to Revolution: Palace
 and Politics in Surakarta,
 1912-1942* (1987), 149, 154
 Laslett, Peter, 149
 *The World We Have Lost:
 England Before the Industrial
 Age* (1965), 149
 Lekra, 31
 Lichtman, Alan J., 10, 97, 98
 *Historians and the Living Past:
 The Theory and Practice of
 Historical Study* (1976), 10,
 97, 98
 Lipset, Seymour M., 136
living traditions, 30
 Lloyd, Christopher, 54, 60, 62,
 63, 74, 117



- Explanation in Social History*, 54, 60, 63, 117
- Lo. C. P., 135
Changing South-East Asian Cities: Reading on Urbanization (1976), 135, 144
- Lombard, Denys, 22, 26, 28, 30, 31
Nusa Jawa: Silang Budaya (1996), 22, 26, 28
- longue durée*, 11, 15, 27, 61
- Lorenz, Chris, 10, 11, 15, 16
De Constructie van het Verleden: Een Inleiding in de Theorie van de Geschiedenis (1987), 10, 15
- Lucas, Anton E., 38, 40
Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi (1989), 38
- Lutheranisme, 20
- M**
- Madero, Francisco, 113
- Majapahit, 91
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), 22, 31, 32
Sejarah Umat Islam Indonesia (1987), 22
- Maji-Maji, pemberontakan, 105, 107
- mandala, konsep, 93
- Mangkunegoro VI, 154
- Mangkunegoro VII, 154, 155
- Mangoenatmodjo, 157
- Mao Tse-tung, 114
- Marco Kartohadikromo, 156
- Marx, Karl, 90
Asian mode of production, 90
- Marxisme, 39, 59, 60, 157
- Masjumi, 67
- Max Weber, 71, 73, 82, 119, 136
- May, Brian, 63, 69
The Indonesian Tragedy (1978), 63, 69
- McCullagh, C. Behan, 10, 11, 12, 13
Justifying Historical Description (1984), 10
- Meiji, Kaisar, 110
- Merli, Frank J., 17
Makers of American Diplomacy: From Theodore Roosevelt to Henry Kissinger (1974), 17
- Merrit, Richard L., 14, 138
Symbols of American Community, 1735-1775 (1966), 14
- mesiah (*messiah*), 46, 102, 103
- mesianisme, 93, 101, 102, 129
- MIAI, 84
- Milone, Pauline Dublin, 144
- missionary zeal* (semangat pendakwah), 52
- modernisasi, madzab, 54
- Mohamad Idris, 102
- Monash University, 151
- Moore, Jr., Barrington, 99, 108
Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and



Peasant in the Making of the Modern World, 99

Mousnier, Roland, 98, 100

Peasant Uprisings in the Seventeenth-Century France, Russia, and China, 98

Muhammad Arsyad Al-Banjari, 150

Muhammad Nafis bin Idris bin Husayn Al-Banjari, 150

Muhammadiyah

~ dan modernisme, 84

~ dan puritanisme, 84

multiple-regression, analisis, 141

N

Naturwissenschaften (Ilmu-ilmu alam), 2, 3, 4

negara kuno, 91

neo-Sufisme, 150

Nina Herlina, 70, 71

"Kehidupan Kaum Menak Priangan, 1800-1942" (1997), 70, 71

nomothetic, 7, 117

NU, 67, 75, 125, 126

nuclear family, 123, 124

O

Oetoesan Hindia, koran, 45

Outer Indonesia, 48

P

P. Swantoro, 31

Pakubuwana (PB) X, 154

Palmier, Leslie, 42

Communists in Indonesia:

Power Pursued in Vain, 42

Panembahan Nata, 151, 152

Pangeran Amir, 151

Pangeran Antasari, 151

Pangeran Diponegoro, 104, 105

Pangeran Hangabehi, 46

Pangeran Hidayatullah, 151

pangrembe, 129

Parakitri T. Simbolon, 22, 31, 33, 51

Menjadi Indonesia (1995), 22, 31, 33, 51

paralelisme, 79, 80, 81, 83, 87, 93, 97

~ horisontal, 79

~ hukum adat, 80

~ vertikal, 79

Parindra (Partai Indonesia Raya), 40, 155

Paterson, Thomas G., 17

The Origins of the Cold War (1970), 17

patrimonialism, 72

neo-patrimonialisme, 73

patron-client politics, 133

Pax Britannica, 106, 111, 122

PBI (Persatuan Bangsa Indonesia), 40

pegustian, 149, 151, 152

Penders, C.L.M., 149, 152

Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in North-East Java (1984), 149, 152

penjelasan kausal, 1, 10, 12



penjelasan sejarah, 1, 2, 10, 12,
 13, 14, 15, 16, 22, 25, 34, 60,
 69, 71, 97, 131
 enam kaidah -, 10
 generalisasi, 12
 inferensi statistik dan
 metode statistik, 13
 multi-interpretable, 16
 narrative history, 15
 pembagian waktu dalam
 sejarah, 14
 regularity, 10, 11, 12, 37
 makna -, 10
 tekanan utama -, 10
 Penn, Wiliam, 57
 Perang Aceh, 63, 66, 68, 69, 120
 Perang Diponegoro, 66, 129
 Perang Paderi, 66
 Peristiwa Sabidin, 43
 perkawinan
 PP No. 9 Tahun 1975, 88
 Undang-undang Perkawinan
 Malaysia, 89
 UU No. 1 Tahun 1974, 88
 Permi, 67
 PERMI (Persatuan Muslimin
 Indonesia), 84
 Perserikatan Komoenis di India
 (PKI), 156
 Persis, 67
 PETA, 94
 PFB (*Personel Fabriek Bond*), 156
 PKI, 41, 42, 84, 156, 157, 158
 PKI (Perserikatan Komoenis di
 India), 156
 PKS (Partai Keadilan Sejahtera),
 135

Plato, 3
 PMA (*The Philippine Medical
 Association*), 51, 52
 PNI-Baru (Pendidikan Nasional
 Indonesia), 39
politics of meaning, 133
 Politik Etis, 54, 152, 153, 154
 PPPKI (Permufakaran
 Perhimpunan-perhimpunan
 Politik Kebangsaan Indonesia),
 39, 84
 Prajoedi Atmosoedirdjo, 80
 Pramoedya Ananta Toer, 29
 Cerita dari Blora, 29
predictive statistics, 132
 Protestantisme, 20
 PRRI/Permesta, 138
 PSI, 67
 PSII, 67
 puritanisme, 13, 84, 121, 123

R

Raden Panji Natarata, 157
 Serat Seh Siti Jenar, 157
rapprochement, 9, 12, 117
 Ratu Adil, 34, 42, 44, 46, 98, 99,
 102, 104, 106
 Ratu Sunda, 102
relative deprivation, 99
 Restorasi Kekaisaran (Jepang)
 1868, 110
 Restorasi Meiji, 83



revolusi, 8, 12, 41, 47, 85, 100,
 110, 111, 112, 113, 114, 116,
 117, 122
 ~ sosial, 85
 ~ Indonesia, 8, 12, 81, 84, 85,
 117
 ~ Perancis, 8, 12, 81, 84, 85,
 109
 ~ Viet Nam, 115
 ~ Cuba, 115

Revolusi Republik (China) 1911,
 114

Ricklefs, M. C., 21, 25
A History of Modern Indonesia
 (1982), 21, 25, 26

Robison, Richard, 70, 72, 73
Indonesia: The Rise of Capital
 (1986), 70, 72

S

samurai, 110

sanskritisasi, 120, 121
 model-model, 121

Sarekat Abangan (SA), 156, 157

Sarekat Islam (SI), 44, 45, 46, 67,
 75, 84, 156, 157

Sartono Kartodirdjo, 22, 26, 28,
 31, 42, 51, 81, 84, 98, 101,
 118, 119

Pendekatan Ilmu Sosial dalam
Metodologi Sejarah (1992),
 119

Pengantar Sejarah Indonesia:
Dari Emporium Sampai
Imperium (1987), 22, 26, 51
Protest Movements in Rural
Java: A Study of Agrarian
Unrest in the Nineteenth

and Early Twentieth
Centuries (1973), 98, 119
Sejarah Nasional Indonesia [SNI]
 (1974-1984), 21, 22, 24, 25,
 26, 119

The Peasants' Revolt of Banten
in 1888. Its Condition,
Course, and Sequences. A
Case Study of Social
Movements in Indonesia
 (1966), 42

scientific history, 9, 74, 118
 social ~, 9, 119

Scott, James C., 99
The Moral Economy of the
Peasant: Rebellion and
Subsistence in Southeast Asia
 (1976), 99

segmentary state, 90

sejarah deskriptif, 11, 16

sejarah deskriptif-naratif, 16

sejarah historiografi, 9, 118

sejarah kejiwaan (psychohistory),
 130, 132

sejarah mentalitas, 28, 30, 31,
 60, 120, 130

sejarah naratif, 11, 27, 147, 148
 syarat penulisan ~, 147
colligation, 15, 147
plot, 36, 147, 148
 struktur sejarah, 147, 148

sejarah perbandingan
(comparative history), 80

sejarah peristiwa-peristiwa
(l'histoire évenementielle), 15

sejarah total, 26, 27, 30, 76

sejarah, hakikat ~



- ilmu diakronis, 5
 ilmu kemanusiaan, 3
 mandiri, 2
 memanjang dalam waktu,
 terbatas dalam ruang, 5
 menafsirkan, memahami,
 mengerti, 2
 menuturkan gejala tunggal
 (*ideographic*), 7
 Semaon, 156
 SH (Sarekat Hindia), 156
 Shiraishi, Takashi, 149
 *An Age in Motion: Popular
 Radicalism in Java, 1912-
 1926* (1990), 149, 155
sinking status, konsep, 91
 sinkronis, 5, 7, 23, 26, 27, 28, 30,
 118
 Sistem Tanam Paksa, 48, 95, 127,
 128, 133
 Sjahrir, 39
Social Science Research Council, 17
social scientific history, 9, 119
 Soegijanto Padmo, 81, 86
 Soeharto, 41, 91, 92, 93, 94, 95
 Soekarno, 31, 39, 41, 91, 92, 93,
 94
 Somervell, D.C., 13
 The World and the West, 13
 Srinivas, M.N., 119, 120
 Social Change in Modern India
 (1984), 119, 120
 Stanford, Michael, 148
 Nature of Historical Knowledge
 (1986), 148
 statistik, metode, 11, 14, 98,
 131, 134
 inferensi -, 98, 123
 Stauffer, Robert, 48, 51
 *The Development of an Interest
 Group: The Philippine
 Medical Association* (1966),
 48, 51
 Stone, Lawrence, 134
structural conductiveness, 69
structural strain, 69
 strukturalisme, 59, 60, 61, 150
 post-strukturalisme, 150
 strukturasionisme
 (*structurationism*), 70, 71
 Suhartono, 120, 128, 133
 *Apanage dan Bekel: Perubahan
 Sosial di Pedesaan Surakarta
 [1830-1920]* (1991), 120,
 128, 133
 Sultan Cakraningrat VIII, 126
 Sutomo, 39
 Swierenga, Robert P., 131, 138
 *Quantification in American
 History: Theory and Research*
 (1970), 131, 135, 138, 141,
 142
 Sya San, 105, 107
 Syafi'i, madzab, 87, 88
symbolic realisme, 62
synchronic, 5, 117

 T
 Tamjidillah, 151, 152
 Taufik Abdullah, 28, 63, 66, 67,
 68, 69



*Islam dan Masyarakat:
Pantulan Sejarah Indonesia*
(1967), 63, 66

Te Ua Hau, 106

Temenggung Surapati, 152

The Duque Modification, 52

The Glorious Revolution (1688),
108

The Mayuga Plan, 52

The New History (1912), 9, 118,
134

Thernstrom, Stephan, 135, 137
"Religion and Occupational
Mobility In Boston, 1860-
1963" (1972), 135

Tjipto Mangoenkoesoemo, 155,
156

Tjokroaminoto, 46, 156

Tokugawa Iyasu, 110

Towen-Bouwisma, Elly, 120, 125
*Staat, Islam, en lokale
leiders in West Madura,
Indonesia: Een historisch-
antropologische studie*
(1988), 120

Toynbee, Arnold J., 13
A Study of History, 13

Tuanku Muhammad Daud Syah, 69
Tweede Klasse School, 153

U

unities of discourse, 76, 150

Urban Revolution, 91

V

varna dharma, 121

verhalende verklaringsmodel
(model penjelasan sejarah
bercerita), 11, 15

verstehen, 3, 4, 10

Veyne, Paul, 148

*Writing History: Essay on
Epistemology* (1971), 148

VOC, 30, 48, 94, 101, 125

Volkscredietwezen (VCW), 153

von Ranke, Leopold, 9, 16, 35,
118

W

Wahyu Makutoromo, lakon
wayang, 93

Walsh, W. H., 15, 147

*Philosophy of History: An
Introduction* (1967), 147

Warner, Jr., Sam Bass, 53, 56, 57
*The Private City: Philadelphia
in Three Periods of Its
Growth* (1973), 53, 56

Wertheim, W. F., 53

westernisasi, 120, 122

William, William Appleman, 18
*The Tragedy of American
Diplomacy* (1971), 18

Wilson, Theodore A., 17
dan Frank J. Merli, *Makers of
American Diplomacy: From
Theodore Roosevelt to Henry
Kissinger* (1974), 17

Windelband, Wilhelm, 7

Wittfogel



konsep *hydraulic state*, 90

Wolf, Eric R., 80, 99, 112, 116
*Peasant Wars of the Twentieth
Century* (1973), 99

world image, 130

Y

Yahya A. Muhaimin, 38, 41, 42
*Perkembangan Militer dalam
Politik di Indonesia 1945-
1966* (1982), 38

Yeung, Y. M., 135

*Changing South-East Asian
Cities: Reading on
Urbanization* (1976), 135,
144

Z

Zapata, Emilio, 113

Zinn, Howard, 18
*The Postwar America: 1945-
1971* (1973), 18



BIODATA

(Alm) Prof. Dr. KUNTOWIJOYO
[1943-2005]

Kuntowijoyo semula dikenal sebagai pengarang novel dan sajak. Setelah tamat studi S1 (1969) di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada (UGM), ia melanjutkan kuliah di The University of Connecticut USA (M.A., American Studies, 1974), dan di Columbia University sampai meraih gelar Ph.D Ilmu Sejarah (1990), dengan disertasi berjudul "Social Change in an Agrarian Society: Madura 1850-1940".

Profesinya sebagai dosen Jurusan Sejarah Fakultas Sastra (kini Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Gadjah Mada —tahun 1970 hingga akhir hayatnya (22 Februari 2005)— telah mengedepankan gagasan-gagasan intelektualnya selaku sejarawan. Jabatan Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Budaya UGM diterimanya pada 2001 melalui pidato pengukuhan yang berjudul "Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia: Mitos, Ideologi, dan Ilmu" (21 Juli 2001). Di samping itu, ia juga dikenal sebagai pengamat kebudayaan yang sangat cermat.

Karya-karya Kuntowijoyo: •**NON-FIKSI**: *Maklumat Sastra Profetik* (Grafindo Litera Media, 2006); *Peran Borjuasi Dalam Transformasi Eropa* (Ombak, 2005); *Raja, Priyayi, dan Kawula* (Ombak, 2004); *Metodologi Sejarah*, edisi kedua (Tiara Wacana, 2003); *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas* (Mizan, 2002); *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura, 1850, 1940* (MataBangsa, 2002); *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental* (Mizan,



2001); *Identitas Politik Umat Islam* (Mizan, 1997); *Pengantar Ilmu Sejarah* (Bentang, 1995); *Demokrasi dan Budaya Birokrasi* (1994); *Radikalisasi Petani* (Bentang, 1993); *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Mizan, 1991); *Budaya dan Masyarakat*, (1987; terbit ulang 2006); *Dinamika Sejarah Umat Islam* (1985) • **PUISI**: *Makrifat Daun, Daun Makrifat* (1995); *Isyarat* (1976); *Suluk Awang-Uwung* (1975) • **FIKSI**: *Topeng Kayu*, drama (2001); *Mantra Penjinak Ular*, novel (2000); *Mengusir Matahari*, kumpulan fabel (1999); *Hampir Sebuah Subversi*, kumpulan cerpen (1999); *Impian Amerika*, novel (1998); *Dilarang Mencintai Bunga-Bunga*, kumpulan cerpen (1992); *Khotbah di Atas Bukit*, novel (1976, terbit ulang 1993); *Pasar*, novel (1972, terbit ulang 1994); *Kereta Api yang Berangkat Pagi Hari*, novel (1966);

Beberapa penghargaan yang diterimanya: • Penghargaan Penulisan Sastra, dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1999). • S.E.A. Write Award, dari Pemerintah Thailand (1999); • Kalyanakretya Utama untuk Teknologi Sastra, dari Menristek (1999); • Mizan Award (1998) • Satya Lencana Kebudayaan RI (1997); • Penghargaan Kebudayaan ICMI (1995); • ASEAN Award on Culture (1997); • Penghargaan Penulisan Sastra, dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, untuk kumpulan cerpen *Dilarang Mencintai Bunga-Bunga* (1994) • Penghargaan Sastra Indonesia, dari Pemda DIY (1986).

Beberapa hadiah yang pernah diterima Kuntowijoyo: • *Harian Kompas*, cerpen "Anjing-anjing Menyerbu Kuburan" (1997) • *Harian Kompas*, cerpen "Laki-laki yang Kawin dengan Peri" (1995); • Dewan Kesenian Jakarta; drama "Topeng Kayu" (1973); • Panitia Hari Buku Internasional, novel "Pasar" (1972); • Dewan Kesenian Jakarta, naskah drama "Tidak Ada Waktu bagi Nyonya Fatmah, Barda, dan Carta" (1972); • BPTNI (Badan Pembina Teater Nasional Indonesia), naskah drama "Rumput-Rumput Danau Bento" (1968); • Majalah Sastra, cerpen "Dilarang Mencintai Bunga-Bunga" (1968).

Prof. Dr. JOKO SURYO

Guru Besar bidang Sejarah di Universitas Gadjah Mada (UGM) ini meraih gelar Ph.D. bidang Sejarah dari Monash University, Australia (1984). Beberapa jabatan profesor dipercayakan kepadanya, seperti pada Pascasarjana UGM (1984-sekarang); Pascasarjana, UNS (1986-sekarang); dan Pascasarjana UIN (1993-sekarang). Di samping itu, ia sempat pula menjadi profesor tamu pada Departemen Sejarah, Thammasat University, Bangkok, Thailand (1996) dan pada Sekolah Pascasarjana, International



Area Studies, Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), Seoul, Korea Selatan (1998-1999).

Beberapa karyanya antara lain: • "Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900-1990", dalam Freek Colombijn et al., *Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota-kota di Indonesia, Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan* (Penerbit Ombak, 2005) ; • *Sejarah Korea*, (Pusat Studi Korea UGM & The Academy of Korean Studies, 2005); • *Kraton Jogja, The History and Cultural Heritage* (PT Jayakarta Agung Offset, 2002); • *The Study of Prambanan Area, Toward Sustainable Tourism Development. The Indonesia-Japan Relationship thorough History* (Gadjah Mada University Press, 1999); • *Indonesian Society in the Historical Dynamic: Continuity and Change*, Gadjah Mada University Press, 1998).

"Secara implisit buku ini telah berhasil meramu hakikat penjelasan sejarah yang selama tiga dekade pada abad XX telah menjadi bahan perdebatan dan ketidaksepakatan di antara kaum positivis dan kaum idealis dalam pendekatan sejarah."

— Prof. Dr. Djoko Suryo (Guru Besar bidang Sejarah, UGM) —

Materi buku ini bertumpu pada dua bahasan mendasar dalam ilmu sejarah, yakni (a) hakikat ilmu sejarah dan (b) cara memahami jenis-jenis penjelasan sejarah. Bagi Kuntowijoyo, ilmu sejarah tidak lain merupakan serangkaian upaya untuk menafsirkan, memahami dan mengerti (*hermeneutics* dan *verstehen*), dan karenanya ilmu sejarah merupakan ilmu yang mandiri, dalam arti memiliki filsafat ilmu sendiri, persoalan sendiri, serta penjelasan sendiri. Dan setiap penjelasan sejarah dimaksudkan agar unit-unit sejarah menjadi dapat dimengerti secara cerdas (*intelligibility*).

Lantas, bagaimanakah penjelasan sejarah harus dikerjakan? Kuntowijoyo mengajak pembaca untuk mengamati bagaimana sejarawan bekerja (*historians at work*), melalui review secara konkret terhadap enam puluh (60) sumber bacaan (baik buku maupun artikel) dari penulis dalam negeri dan luar negeri.

Dengan kajian seperti itu, buku ini amat pantas untuk digunakan sebagai acuan dan buku pegangan para dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam pengembangan teori dan metodologi ilmu sejarah.***